

ISSN 2086-910x
Volume 07 No 02
Juli 2016

KORIDOR

JURNAL **ARSITEKTUR** & PERKOTAAN



Diterbitkan oleh :
Program Studi Magister Teknik Arsitektur
Universitas Sumatera Utara

IDENTIFIKASI MOTIF UKIRAN PADA ARSITEKTUR RUMAH LIMAS PALEMBANG

Setyo Nugroho, Widya Fransiska F. Anwar
Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya
Email: setyongr@yahoo.com

ABSTRAK

Rumah Limas Palembang adalah salah satu kekayaan arsitektur tradisional Sumatera Selatan. Saat ini masih banyak ditemui rumah Limas baik di kota Palembang maupun di daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan. Sayangnya kelangsungan arsitektur ini terancam dengan hilangnya pengrajin rumah Limas. Saat ini sudah sulit ditemui pengrajin baik sebagai pembuat rumah maupun ukirannya. Ukiran kayu pada rumah Palembang masih banyak ditemui. Namun dokumentasi mengenai ukuran, motif dan filosofi dibalik ukiran masih sangat minim. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi ukiran kayu pada sebuah rumah limas yang berusia kurang lebih 100 tahun. Variable yang diteliti adalah posisi, motif, bentuk dan fungsi ukiran. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif dengan meneliti posisi ukiran pada denah keterkaitan dengan fungsi panel dimana ukiran tersebut diposisikan. Panel ukiran digambar ulang untuk dipelajari jenis motif yang dipakai. Perletakkan masing masing motif pada panel kemudian diteliti untuk mendapatkan komposisi disain dan polapanel ukiran. Hasil menunjukkan bahwa ukiran didominasi oleh motif flora dengan komposisi simetris. Penempatan ukiran didominasi pada area publik rumah untuk menunjukkan status sosial pemilik rumah.

Kata Kunci: Ukiran kayu, rumah limas, Palembang.

PENDAHULUAN

Arsitektur Tradisional Daerah merupakan ciri khas suatu daerah tertentu. Bangunan tradisional sering digunakan untuk menunjukkan identitas suatu daerah. Rumah tradisional Palembang yang terkenal dengan rumah Limas merupakan identitas Propinsi Sumatera Selatan. Selain bentuk bangunan, ukiran dalam bangunan Limas juga merupakan kekayaan arsitektur.

Kekhasan motif menjadi pembeda antara ukiran suatu daerah dengan daerah lainnya. Saat ini keberadaan pengrajin ukiran di rumah Limas sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Kemampuan mengukir tidak diketahui didapat dari mana, dan tidak diturunkan pada generasi sekarang. Dengan kondisi seperti ini ukiran Palembang pada rumah Limas tengah terancam keberadaannya. Untuk itulah penelitian ini bermaksud untuk mempelajari dan mendokumentasikan motif ukiran pada rumah Limas agar kekayaan arsitektur dapat terjaga kelestariannya. Lebih lanjut diharapkan dengan adanya dokumentasi,

maka kosakata arsitektur tradisional akan menjadi kaya.

Dari sisi edukasi, kosa kata ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda mengenai perkembangan keahlian ukiran Palembang. Dari sisi pengembangan skill disain, kosa kata ini dapat digunakan untuk mengasah kemampuan disain bangunan modern yang kontekstual dengan identitas daerah. Kemampuan disain yang dimaksud dapat berupa pelestarian penggunaan motif, menggunakan proporsi, yang penerapannya dalam suatu disain merupakan kemampuan *skill* disain yang didapat dari kepekaan dan pengalaman bertahun-tahun. maka hal ini perlu di dukung oleh suatu rumusan proprosi yang terukur untuk menjadi acuan dalam proses transformasi bentuk arsitektur tradisional dalam disain

Arsitektur tradisional nusantara sebenarnya memiliki proporsi tertentu. Hal ini baru dapat dirasakan berdasarkan pengamatan dan kepekaan visual dari arsitek profesional saat mendisain bangunan dengan preseden arsitektur tradisioanal. Kepekaan inilah yang tidak sama antar satu arsitek dengan yang lain. Tidak

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Bustami Syam, Dr. Ir., MSME

PEMIMPIN REDAKSI

Dwira Nirfalini Aulia, Dr., Ir., M.Sc

KETUA DEWAN REDAKSI

Beny O.Y Marpaung, ST, MT, PhD

DEWAN EDITOR

Salmina W. Ginting, ST, MT

Wahyuni Zahrah, ST, MS

R. Lisa Suryani, ST, MT

PENYUNTING AHLI

Prof. Julaihi Wahid, Dipl.Arch, B.Arch, M.Arch, PhD

Prof. Abdul Ghani Salleh, B.Ec, M.Sc, PhD

Prof. Ir. M. Nawawiy Loebis, M.Phil, PhD

PELAKSANA TEKNIS, DESAIN, DAN TATA LETAK

SEKRETARIAT

Novi Yanthi

Sri Agustina

ALAMAT PENERBIT

Program Studi Magister Teknik Arsitektur Gedung J7

Fakultas Teknik

Jalan Perpustakaan Kampus USU

Universitas Sumatera Utara

Medan 20155 Indonesia

Telp/Fax. 061-8219525

E-mail: marsitektur@usu.ac.id; mtausu2002@yahoo.com

Website: <http://mta.usu.ac.id>

DITERBITKAN OLEH

Program Studi Magister Teknik Arsitektur

Universitas Sumatera Utara

Medan

DAFTAR ISI

IDENTIFIKASI MOTIF UKIRAN PADA ARSITEKTUR RUMAH LIMAS PALEMBANG <i>Setyo Nugroho, Widya Fransiska F. Anwar</i>	1-7
KE-TIDAKARIF-AN PENGEMBANGAN WISATA DI KAWASAN BERSEJARAH <i>Johannes Adiyanto</i>	9-14
RELASI KUASA/PENGETAHUAN DALAM PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN KOTA JAKARTA <i>Sri Suryani</i>	15-25
MAKNA YANG TERSIRAT & TERSURAT DALAM VISUALISASI BANGUNAN RUMAH GADANG DI MINANGKABAU <i>Sri Rustiyanti</i>	27-32
STRATEGI DIFERENSIASI ARSITEKTUR PERUMAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENCAPAI KEUNGGULAN BERSAING <i>Kartini Harahap</i>	33-40
STRATEGI DIFERENSIASI ARSITEKTUR PERUMAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENCAPAI KEUNGGULAN BERSAING <i>Sari Desi Minta Ito Simbolon</i>	41-48
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI WUJUD PESONA INDONESIA DALAM ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN BINAAN MASYARAKAT <i>Rozali Jauhari Alfanani, Hendra Prasetyo</i>	49-52
PRINSIP-PRINSIP REGIONALISME KRITIS KENNETH FRAMPTON DAN KESAMAANNYA DENGAN PEMIKIRAN SERTA KARYA MANGUNWIJAYA <i>Imaniar Sofia A, Arsyil Zahra, Fajar Ikhwan Harnomo</i>	53-64
PRINSIP-PRINSIP REGIONALISME KRITIS KENNETH FRAMPTON DAN KESAMAANNYA DENGAN PEMIKIRAN SERTA KARYA MANGUNWIJAYA <i>Dwi Lindarto H, Sirojuzilam, Badaruddin, Dwira Nirfalini Aulia</i>	65-72

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN <i>Irin Caisarina</i>	73-79
ARSITEKTURAL DAN DESAIN INTERIOR LEMBAGA TERAPI AUTIS DI BANDUNG <i>Kharista Astrini Saky, Imam Santosa</i>	81-88
PENGARUH WISATA <i>BACKPACKERS</i> TERHADAP TRANSFORMASI SPASIAL KAWASAN PERMUKIMAN: STUDI EMPIRIS <i>Vika Haristianti, Wiwik Dwi Pratiwi, Widjaja Martokusumo</i>	89-95

Jurnal Arsitektur dan Perkotaan "**Koridor**" adalah jurnal ilmiah dalam bidang arsitektur serta ilmu-ilmu terapannya dalam bidang-bidang: perancangan arsitektur, perancangan tapak dan lingkungan, perkotaan dan permukiman, teknologi bangunan, serta teori dan kritik arsitektur.

Bagi penulis yang berminat memasukkan tulisan dalam jurnal ini harap merujuk pada ketentuan dan format penulisan pada bagian dalam sampul belakang.

Jurnal Arsitektur dan Perkotaan "**Koridor**" diterbitkan oleh Program Magister Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, dengan frekuensi penerbitan dua kali (nomor) untuk setiap tahun (volume).

Ide maupun opini yang tertuang dalam tulisan yang dimuat di jurnal ini merupakan murni berasal dari penulis, dan sama sekali tidak mencerminkan pandangan, kebijakan, maupun keyakinan dari anggota Dewan Redaksi, penyunting maupun Program Magister Teknik Arsitektur USU sebagai institusi penerbit.

Jurnal ini dapat dilihat secara online di alamat : <http://isjd.pdii.lipi.go.id/>

Panduan Penulisan Jurnal dapat diakses secara online di alamat: mta.usu.ac.id

adanya kesepakatan rumusan proporsi ini menyebabkan terkadang ditemui bentuk bangunan dengan preseden arsitektur daerah yang terlihat tidak tepat proporsinya.

Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa penelitian sejenis telah membahas tentang proporsi bangunan tradisional. Beberapa penelitian mengenai arsitektur tradisional Jawa antara lain Kawruh Kalang menggunakan patokan ukuran badan manusia seperti *kilan*, *depo* dan *langkah* (Suyatno, 1990; Kridosasono, 1976 dalam Wiyono, 1991). Atmadi (1979) dalam Wiyono (1991) menemukan bahwa ornamen Candi Borobudur yang berbentuk relief pada dinding candi sebagai dasar pedoman perancangan candi. Rasio yang dirumuskan tidak dikaitkan sebagai suatu keterkaitan proporsi tertentu, sehingga sulit dipakai untuk membuat proporsi bangunan gedung keseluruhan.

Studi lain yang tentang rumah tradisional Sumatera Selatan adalah penelitian bangunan Lamban Tuha (Siswanto, 1998). Penelitian ini telah membahas proporsi bangunan secara sederhana. Dalam penelitian ini diamati dua objek rumah tua lamban tuha. Keduanya memiliki proporsi bangunan yang berbeda. Metoda perumusan hanya berdasarkan pengukuran mentah masing masing bangunan. Mengingat objek yang diamati hanya berjumlah dua bangunan, maka metode ini perlu untuk dikembangkan dengan uji statistik non para metrik.

Rumah tradisional Ulu Berundak masih dianggap salah satu tipikal rumah Limas Palembang. Dalam studi yang dilakukan oleh Lusetyowati dan Siswanto (1998) hanya terdapat identifikasi rumah tradisional daerah Musi Rawas tsb, proporsi bangunan keseluruhan belum dirumuskan. Studi rumah tradisional lainnya adalah studi rumah Limas yang dilakukan oleh Siswanto. Rumah limas yang dipilih sebagai objek penelitian berjumlah 10 buah dan hasil penelitian ini telah merumuskan ratio bangunan. Namun ratio dibuat hanya berdasarkan perhitungan sederhana tanpa pengujian keterkaitan elemen bangunan terukur satu dengan lainnya dalam uji statistik. Secara objek penelitian, penelitian ini sangat mendekati tujuan penelitian, namun metodenya perlu dikembangkan lebih lanjut (Siswanto, 1997) Penelitian lain yang mendekati tujuan adalah penelitian tentang proporsi bangunan Jawa Doregopak dan Kampung Srotong (Wijono, 1991). Dalam penelitian ini digunakan

pengukuran 80 objek rumah. Penelitian berhasil merumuskan sebuah rumusan ratio yang telah diuji melalui uji *chi square* terhadap sebaran datanya. Penelitian ini mendekati tujuan berdasarkan metode yang dilakukan.

Metode mempelajari motif tradisional telah dilakukan dengan banyak cara, dan dengan penekanan studi yang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh Yulianto, 2004; Hidayat, 2004; Purwadi, 2012; Tyas, 2013, Minarsih, 2013) tentang motif tradisional. Yulianto (2004) yang menjelaskan filosofi motif ukiran dan proses pembuatannya ukiran rono dari daerah Trenggalek. Hidayat (2004), Purwadi (2012), Tyas (2013) dan Minarsih dan melakukan studi pada filosofi motif batik Jawa, batik Samarinda dan ukiran kayu khas Minangkabau. Sebagian besar penelitian tersebut menjelaskan secara kualitatif seperti tentang pemilihan motif, makna, dan penggunaan motif tersebut pada medianya. Penelitian dengan menerapkan metode kuantitatif dilakukan untuk menghitung bentuk dan pengembangan motif tradisional menjadi motif modern melalui proposi dengan bantuan bahasa pemrograman komputer. Seperti yang dilakukan oleh Wardani (2013) pada motif batik.

Studi Perbandingan motif dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan perkembangan motif tradisional. Metoda yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif, perkembangan disain dapat dilakukan dengan mengamati gambar planar (2D) motif. Dengan menghitung nilai Variance to Mean Ratio (VTMR) dari setiap ukiran, maka dapat dibandingkan nilai VTMR suatu motif ukiran dengan motif ukiran yang lain. Sebagaimana yang dilakukan pada penelitian motif ukiran kayu Kelantan dan Trengganu oleh Nursuriani Shaffee dan Ismail Said (2011).

Untuk penelitian mengenai motif tradisional Palembang masih sangat terbatas. Penelitian oleh Putra dan Kahdar (2013) meneliti tentang motif songket dengan penekanan pada proses pembuatannya. Ritzyan (2013) mengamati motif songket Palembang, dengan menggunakan metode kuantitatif dengan software MATHLAB R2009a. Hasil penelusuran sementara, keterbatasan penelitian ukiran Palembang menambah perlunya dokumentasi awal perkembangan motif ukiran Palembang. Untuk itu penelitian ini akan melengkapi kekurangan tersebut

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah motif ukiran yang terdapat pada bangunan limas di Kota Palembang. Mengingat hal ini merupakan penelitian identifikasi awal, penelitian ini akan mencari tahu hal yang berkaitan dengan ukiran Palembang sebagai berikut:

1. Pada bagian manakah elemen bangunan ukiran Palembang digunakan pada rumah Limas.
2. Bagaimana penerapan ukiran pada bangunan Limas dalam hal ini motif, bentuk, fungsi dan komposisi ukiran.

METODE PENELITIAN

Latar belakang utama dari penelitian ini adalah melakukan dokumentasi ukiran limas Palembang. Variable tujuan penelitian adalah posisi, motif, bentuk dan fungsi ukiran. Untuk itu penelitian ini menitik beratkan pada pengamatan panel dan lokasi ukiran dengan metoda kualitatif deskriptif. Panel ukiran digambar ulang untuk dipelajari jenis motif yang dipakai. Perletakkan masing-masing motif pada panel kemudian diteliti untuk mendapatkan komposisi disain dan pola panel ukiran.

Pengukuran objek, dilakukan terhadap elemen panel ukiran yaitu luas panel, tampak 2 dimensi dan detil motif. pengambilan data ukiran dilakukan pada kedua sisi depan dan belakang agar data yang diambil akurat. Untuk memperkuat keakuratan data, foto frontal ukiran juga dilakukan dalam pengambilan data. Data ukiran yang didapat kemudian didigitasi dengan program Adobe photoshop. Membuat kompilasi data, dengan menggambar ulang (tracing) komponen ukir ke dalam gambar 2D (CAD), mengidentifikasi pola pada data spatial yang didapat dari gambar komponen ukiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Limas Palembang merupakan rumah tradisional Khas Provinsi Sumatera Selatan. Istilah lain untuk rumah ini (Gambar 1) adalah rumah Bari (dibaca Bahi). Umumnya rumah ini berbentuk rumah panjang hingga lebih dari 30m. Ciri fisik dari rumah Bari adalah atap berbentuk limas piramida terpenggal, berdinding papan, lantainya bertingkat (kijing), memiliki ornamen, struktur menopang diatas tiang yang tertanam di tanah (Pebi, 2009 dalam Triyuli, Yona dan Juliantina, 2013).



Gambar 1. Rumah Bari Perumahan Poligon Palembang

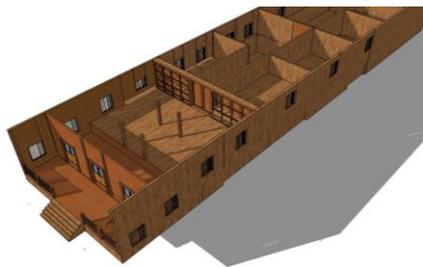
Secara tata ruang, rumah ini relatif simetris. Ruang terbagi menjadi tiga zona yaitu publik, semi privat, private dan servis. Ruang jogan, teras dan ruang kekeejeng berada pada zona publik. Ruang pangkeng gegajah berada pada zona semi privat. Ruang pangkeng berada di zona private, ruang garang/pawon, pelempahan berada pada area servis.

Area publik dimulai dengan ruang jogan yang merupakan ruang penghubung ke tangga yang menjadi akses masuk ke rumah limas yang berstruktur panggung. Kemudian terdapat ruang teras yang memiliki elemen vertikal transparan pembatas ruang luar rumah dengan ruang teras yang terdiri dari bilahan papan kecil disusun seperti pagar, sehingga disebut ruang pagar tenggalong. Selanjutnya ruang publik lainnya adalah ruang pamarekan yang terdapat kekeejeng. Ruang ini yang merupakan ruang utama rumah. Kekeejeng adalah split level setinggi 15-40cm yang berada di ruang ini. Split level sebagai indikasi tempat duduk tamu sesuai strata sosialnya. Level tertinggi adalah ruang gegajah yang merupakan tempat duduk tamu yang berstrata sosial tinggi.

Ruang gegajah terhubung dengan area private yang dengan pintu berada di tengah ruangan. Sisi pintu ini merupakan pusat perhatian ruangan karena di apit oleh dua lemari built in sebagai showcase koleksi tuan rumah. Disisi inilah terdapat banyak ukiran, baik di panel ventilasi diatas pintu, dan di lemari *built in*.

Pangkeng adalah ruang kamar yang berada disini kanan dan kiri pintu gegajah. Masing-masing pangkeng terhubung dengan selasar yang juga merupakan area penghubung

ke bagian belakang rumah seperti ruang keluarga, ruang pelimpahan dan dapur (garang). Rumah limas amatan adalah rumah limas milik Hj.Ayu Ning yang berlokasi di kelurahan 9 Iilir kota Palembang. Lokasi rumah ini berada di tepian Sungai Sei Bendung, dan berjarak sekitar 566 m dari muara ke sungai Musi. Rumah ini (Gambar 2) berusia 100 tahun lebih dan pemilikinya saat ini adalah generasi ketiga. Lokasi rumah merupakan lokasi asli, bukan hasil pemindahan dari lokasi lain. Ruang utama rumah ini (ruang gegajah) memiliki dua level ketinggian (kekijing).

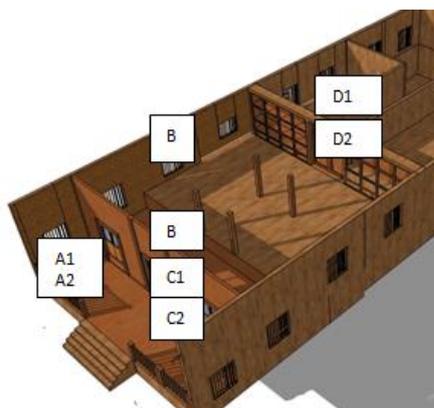


Gambar 2. Ilustrasi Interior Rumah 9 Iilir

Pada bangunan rumah limas ini, data ukiran yang diambil terletak pada area ruang depan rumah, dengan perincian sebagai berikut:

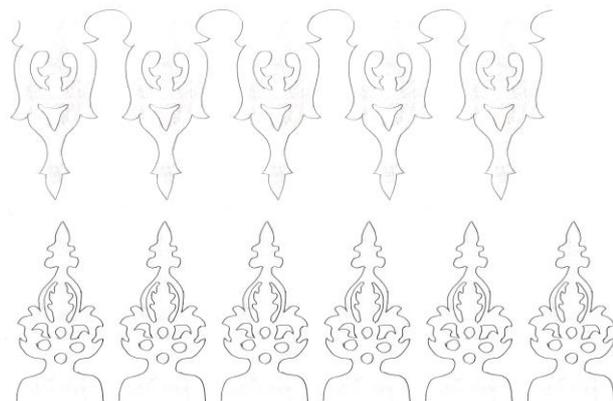
1. Ukiran pagar tenggalong (A1 dan A2)
2. Ukiran atas pintu dan jendela (B)
3. Ukiran pintu ruang kekijing bawah (C1 dan C2)
4. Ukiran pintu ruang gegajah, kekijing atas (D1 dan D2)

Lokasi ukiran pada rumah Limas 9 Iilir tertera pada Gambar 3.



Gambar 3. Perletakan Ukiran di Rumah 9 Iilir

Pagar tenggalong (kode A) adalah dinding transparan yang memisahkan bagian luar rumah dengan ruang transisi rumah (teras). Bentuknya yang terdiri dari bilah kayu memanjang vertikal menyebabkan ia disebut sebagai pagar. Susunan bilah kayu vertikal relatif rapat, sehingga cukup menjadi pembatas fisik dari dalam rumah. Pada rumah 9 Iilir, pagar tenggalong (Gambar 4) memiliki ukiran di bagian atas dan bawah bilah kayu tersebut. Bentuk panel ukiran gabungan antara segitiga dan persegi panjang, diatur secara vertikal. Motif yang terdapat pada ukiran ini adalah motif flora.



Gambar 4. Ukiran Pagar Tenggalong

Ukiran selanjutnya terdapat pada pintu dinding ruang utama (ruang gegajah) yang terdapat pada level kekijing terendah. Dinding ini merupakan pembatas antara ruang teras dengan ruang utama rumah. Terdapat tiga pintu pada dinding ini dan ukiran ini terdapat pada bagian pintu. Bentuk panel ukiran bagian atas adalah kurva, dipasang secara horizontal (Kode B). Bentuk panel ukiran bagian bawah persegi panjang, dipasang secara horizontal dan vertikal (Kode C1 dan C2). Motif ukiran adalah flora. (Gambar 5, dan 6).



Gambar 5. Ukiran Bagian Atas Pintu Kekijing Bawah Limas 9 Iilir (Kode B)



Gambar 6. Ukiran Bagian Bawah Pintu Kekijing Bawah Rumah Limas 9 Ilir (C1 atas dan C2 bawah)

Bagian yang paling banyak terdapat ukiran adalah ukiran pada panel ventilasi diatas pintu ruang gajah yang berada di level kekijing tertinggi. Pintu dan dinding ini merupakan penghubung ruang utama ke ruang kamar pengantin. Secara sosial, pintu ini berada pada ruang pada kekijing tertinggi yang diperuntukkan sebagai tempat bagi tamu yang dihormati dan/atau memiliki status sosial tinggi. Ukiran ini terletak pada bagian atas lubang pintu, dan dinding kiri dan kanan pintu (sebagai bingkai dari pintu), dipasang pada posisi mendatar, sebagai list ataupun hiasan panel ventilasi (Gambar 7).



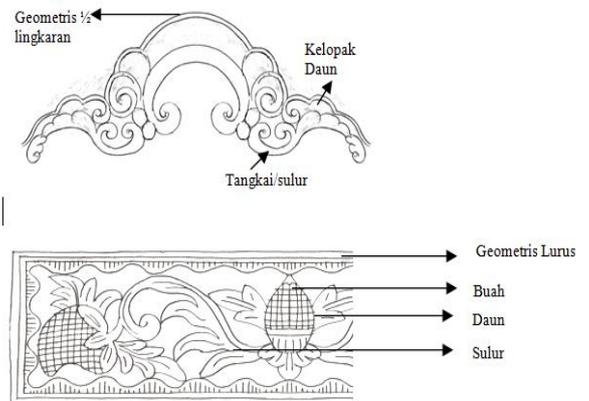
Gambar 7. Ukiran Pintu Ruang Kekijing atas Rumah 9 Ilir (D1 atas dan D2 bawah)

Bagian lain yang memiliki ukiran adalah daun jendela. Ukiran ini juga terletak pada bagian atas pintu kekijing bawah (lihat gambar 5.5) Bentuk ukiran adalah kurva lengkung setengah lingkaran dipasang horizontal (Gambar 8).



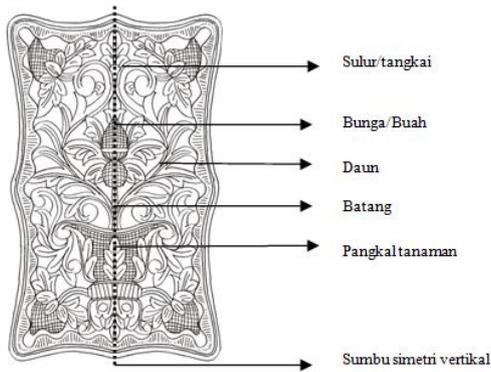
Gambar 8. Ukiran Bagian atas Lubang Jendela dan Pintu Rumah 9 Ilir Kode B

Dari data yang didapat, sebagian besar motif yang dipakai dalam ukiran adalah motif flora. Terdiri dari bunga, buah, tangkai, kelopak daun. Selain motif flora juga ditemukan motif geometris yang menjadi pembatas panel ukiran. Motif geometris ini berupa setengah lingkaran dan garis lurus (Gambar 9).



Gambar 9. Macam Motif Ukiran

Umumnya komposisi motif adalah simetris. Motif dimulai dari titik awal yang biasanya berupa pangkal dahan, dilanjutkan dengan batang tanaman, bunga dan sulur daun. Secara komposisi, didisain secara simetris sama identik, dengan garis pencerminan di tengah dan vertikal (Gambar 10).



Gambar 10. Komposisi Simetris

Secara sederhana, bisa dilihat kesamaan penempatan ukiran pada kedua bangunan limas yang diamati. Ruang gegajah merupakan ruangan yang memiliki banyak ukiran. Sebagai ruang utama, panel dinding yang menghadap ke bagian depan rumah merupakan pusat perhatian ruang tersebut. Oleh karenanya ukiran terbesar berada dibagian atas pintu pembatas ruang gegajah (Kode D). Selain ruang gegajah, ukiran juga ditempatkan di ruang teras yaitu pada lisplank dan pagar tenggalong. Pagar tenggalong merupakan dinding transparan seperti pagar yang memisahkan ruang luar rumah dengan ruang teras sebagai transisi dari ruang luar ke ruang dalam (gegajah). Secara dimensi, ukiran di area ini relatif lebih kecil dimensinya. Walaupun dimensinya kecil namun letaknya yang berderet menyebabkan ukiran ini cukup menarik perhatian

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Limas yang diamati memiliki ukiran pada bagian ruang utama (ruang gegajah). Ukiran ditempatkan di panel pintu, jendela, lisplank, pagar, dan ventilasi. Secara umum panel ukiran berbentuk horizontal memanjang.. Unsur geometris yang digunakan adalah persegi, kurva lengkung dan segitiga. Motif ukiran pada umumnya adalah geometris dan flora. Komposisi 2D ukiran adalah simetris. Penerapan simetris ini berlaku pada masing-masing panel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Makalah ini merupakan salah satu publikasi dari penelitian Sains Teknologi dan Seni yang didanai oleh Universitas Sriwijaya

tahun anggaran 2015. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas atas dukungan pendanaan yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Hj. Ayuning atas kesediaannya menjadi narasumber pada makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ching, F.D.K (1979) *Architecture: Form, Space and Order*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Dina, R.R. (2015) Makna dan Nilai Filosofis Masyarakat Palembang yang terkandung dalam bentuk dan arsitektur rumah Limas, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, Vo. 17 No.2. November 2015, h.275-282.
- Lusetyowati, Tutur dan Ari Siswanto (1998) *Langgam Arsitektur Rumah Ulu Berundak di Kabupaten Dati II Musi Rawas*, Laporan Penelitian OPF, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- Minarsih (2013) Korelasi antara Motif Hias Songket dan Ukiran Kayu di Propinsi Sumatera Barat, *Humanus* Vol.XII, No.1, hal.1-10.
- Nursuriani Shaffee dan Ismail Said (2011) *A Multidisciplinary Approach for the Carved Fenestration in Floral Design of Malay Vernacular Architecture*, Prosiding The 12th International Seminar on Environment and Architecture, Universitas Brawijaya.
- Putra, MRH dan Kahdar, K (2013) *Aplikasi Motif Songket Palembang dengan Teknik Devore untuk Produk Tekstil*, *Jurnal tingkat Sarjana bidang Seni rupa dan Disain FSRD-ITB*, No.1, hal. 1-7.
- Riztyan, A et.al (2013) *Analisa Pengenalan Motif Songket Palembang Menggunakan Algoritma Propogasi Balik*, STMIK MDP Palembang.
- Siswanto, Ari (1997) *Rumah Limas Palembang Mengungkap Aspek Konstruksi, Bahan Bangunan, Detail dan Filosofi dengan Pendekatan Arsitektur*, Laporan

Penelitian Dikti/Dana Rutin, Lembaga
Penelitian Universitas Sriwijaya,
Palembang.

Siswanto, Ari (1998) *Analisis aspek arsitektur dan konstruksi bangunan lamban Tuha tipikal rumah ulu yang tahan gempa di kab. OKU*, laporan Penelitian, Dikti/peneliti Muda, Lembaga Penelitian, Universitas Sriwijaya.

Smithies, KW. (1991) *Principles of Design in Architecture*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.

Triyuli, W, Yona, SD dan Juliandini, AT (2013) Identifikasi Rumah Tradisional di Lorong Firma Kawasan 3-4 Ulu Palembang, Prosiding Temu Ilmiah IPPLI 2013.

Tyas, FY. (2013) *Analisa Semiotika Motif Batik Khas Samarinda*, eJournal Ilmu Komunikasi, Vol 1 No,4, hal 328-339.

Wijono, D. (1991) *Patokan Proporsi Rancang Bangun Arsitektur Tradisional Jawa*, FT. UGM.

KE-TIDAKARIF-AN PENGEMBANGAN WISATA DI KAWASAN BERSEJARAH

Studi Kasus: Kawasan Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang

Johannes Adiyanto

Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya

Email: johannesadiyanto@yahoo.com

ABSTRAK

Pengembangan wisata didasarkan pada suatu potensi yang dimiliki daerah tersebut. Kawasan bersejarah merupakan salah satu daerah yang punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. UU no 11 tahun 2010 dengan tegas menyatakan bahwa kawasan bersejarah wajib dilestarikan memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Disisi lain pengembangan wisata membutuhkan sarana-sarana penunjang. Disinilah terjadi benturan antara pengembangan wisata dan usaha pelestarian. Metode pembahasan digunakan metode deskripsi komparatif, dan metode analisa digunakan metode space syntax. Deskripsi bahasan berdasarkan perbandingan kondisi kawasan Kampung Kapitan berdasarkan peta dan foto udara, pada tahun 2014 dan dibandingkan dengan keadaan tahun 1971 dan 1930-1945. Kawasan Kapitan 7 Ulu Palembang salah satu contoh dari ke-tidakarif-an pengembangan wisata di kawasan bersejarah; sebab dengan adanya sarana wisata, makna dan peran kampung bersejarah menjadi terabaikan. Kesimpulan ini dicapai karena penempatan sarana wisata di depan Kampung Kapitan, justru menghilangkan makna dan keberadaan Kampung Kapitannya.

Kata Kunci: Pengembangan wisata, Cagar Budaya, Metode analisa *Space Syntax* dan Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang.

PENDAHULUAN

Kota Palembang terkenal dengan kota dengan sejarah yang panjang. Hari lahir kota Palembang ditentukan tanggal 17 Juni 688 berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Palembang juga dikenal sebagai ibukota kerajaan Sriwijaya (Muljana, 2006:3). Palembang juga memiliki kawasan kolonial Belanda, yang diduga dirancang oleh Thomas Karsten (Zulfikri, 2014:B 53).

Jaman kemerdekaan, pembangunan kota Palembang ditandai dengan dibangunnya Jembatan Ampera, yang proses pembangunannya April 1962 dan diresmikan tahun 1965, yang menghubungkan sisi Ilir dan Ulu Kota Palembang (Subadyo, 2012:20).

Perkembangan kota Palembang menjadi semakin pesat saat Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah perlehatan Pekan Olahraga Nasional XVI tahun 2004 kemudian berlanjut dengan menjadi tuan rumah SEA (*South East Asian*) GAMES ke 26 tahun 2011. Konsekuensi dari

pehelatan olahraga itu adalah pembangunan besar-besaran untuk sarana olahraga dan sarana pendukungnya. Subadyo bahkan menyatakan bahwa efek dari perlehatan olah raga tersebut mengubah wajah kota Palembang dan bahkan terabaikannya sejumlah bangunan yang memiliki nilai sejarah (Subadyo, 2012: 21).

Pada penelitian ini mencoba menguji pernyataan Subadyo tersebut dengan mengangkat salah satu kawasan bersejarah yaitu Kampung Kapitan di kelurahan 7 Ulu Palembang. Kampung Kapitan adalah sebuah hunian untuk pemimpin rakyat Tiongkok yang ditunjuk oleh Belanda. Pimpinan Masyarakat China Palembang yang pertama masa pemerintahan Belanda adalah Tjoa Kie Tjuan yang mendapat gelar/ pangkat Mayor. Ia memegang jabatan sebagai pemimpin China dari tahun 1830 – 1855 di Kawasan 7 Ulu, kemudian digantikan oleh putranya bernama Tjoa Ham Him dengan pangkat Kapten. Selain itu juga diangkat seorang Letnan yang bernama Tjia King Tjun, dan diangkat seorang Mayor

bernama Lim Hut Siang. Mayor, Kapiten atau Letnan ini diberi suatu kebebasan untuk mengatur pemerintahan di daerah sendiri dengan cara memberi upeti kepada Pemerintah Hindia Belanda. (Widowati, 2007). Kampung Kapitan ini diduga telah berdiri sejak pertengahan abad 19 (Gambar 1).



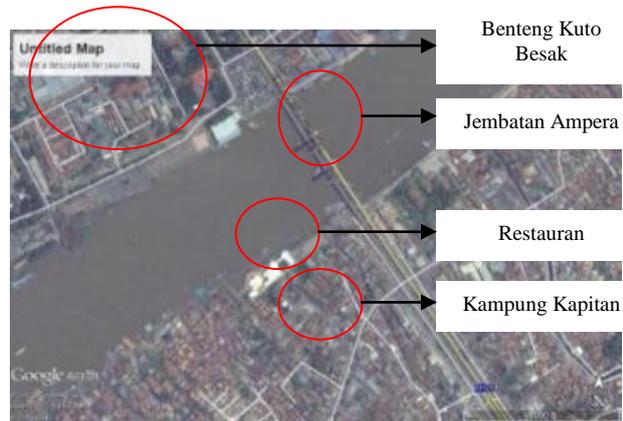
Gambar 1. Suasana Kampung Kapitan
Sumber: Koleksi Pribadi, 2015

Posisi Kampung Kapitan ini sangat strategis, berada berhadapan langsung dengan Benteng Kuto Besak, yang merupakan ruang publik yang terkenal di Palembang; dan juga tidak jauh dengan jembatan Ampera. Sejak tahun 2013, di tepian Sungai Musi pada kawasan Kampung Kapitan berdirilah sebuah restoran, yang mengambil nama Restoran Kampung Kapitan (Gambar 2).



Gambar 2. Restaurant Kampung Kapitan
Sumber: <http://www.kampungkapitan.com/>

Telihat bahwa posisi Kampung Kapitan sangatlah sentral dan punya potensi yang besar untuk dikembangkan (Gambar 3). Penelitian ini akan melakukan apakah yang sudah dikembangkan pemerintah Kota Palembang sudah sesuai dengan karakter Kampung Kapitan itu sendiri?



Gambar 3. Lokasi Kampung Kapitan dan sekitarnya
Sumber: *google earth* Tahun 2014

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan metode deskripsi komparatif. Hal yang dibandingkan adalah kondisi kampung Kapitan dari pelbagai tahun. Dalam penelitian ini digunakan kondisi tahun 1945 berdasarkan data peta tahun 1937 – 1945 yang dibuat oleh Belanda (Diessen, 1998). Kondisi kedua adalah kondisi tahun 2006, kondisi ini berdasar pada peta garis yang dibuat oleh Pemda Kota Palembang berdasarkan foto udara tahun 2004-2005. Kondisi ini menggambarkan Kampung Kapitan sebelum terkena dampak dari pelbagai perlehatan Olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Kondisi terakhir adalah kondisi tahun 2014, yang mendasarkan pada peta dari *google earth*.

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

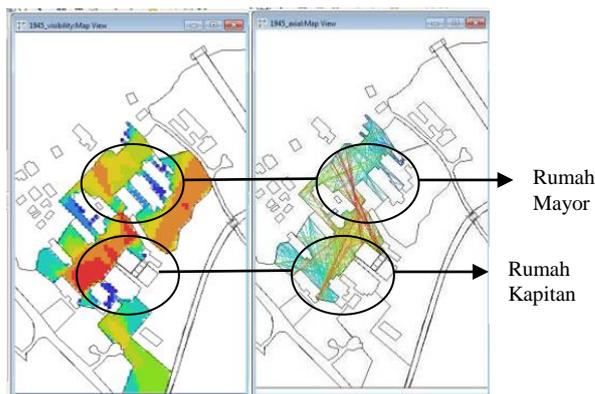
1. Tahap pengumpulan data/peta. Peta yang didapat adalah peta tahun 1945 dan peta tahun 2006. Untuk kondisi tahun 2014 didasarkan pada foto udara dari *google earth*.
2. Tahap kedua adalah tahapan persiapan analisa. Tahap ini merubah peta/foto udara ke dalam format dxf (dengan program CAD) agar mampu dibaca dan di analisa oleh program *depthmapX-0.30 for window*.
3. Tahap ketiga adalah tahap analisa dengan metode analisa *space syntax*, yang dibantu dengan software *depthmapX-0.30 for window*. Analisa dilakukan berdasarkan *axial map* dan *visual graph*.
4. Tahap keempat adalah tahap interpretasi. Tahap ini membandingkan hasil pembacaan analisa *space syntax* dengan

bantuan software terhadap ketiga kondisi di Kampung Kapitan. Tahap interpretasi ini menggunakan metode deskripsi komparatif. Metode ini melakukan perbandingan (komparasi) secara deskriptif (apa adanya) terhadap kondisi Kampung Kapitan dari tiga masa yang berbeda.

PEMBAHASAN

Kondisi Tahun 1945

Dengan dasar peta Palembang tahun 1937-1945 (Diessen, 1998), didapatkan kondisi sebagai berikut (Gambar 4).



Gambar 4. Analisa *Visual graph* (kiri) dan Analisa *Axial map* (kanan) untuk kondisi tahun 1945

Dalam analisa *visual graph* terlihat bahwa ruang terbuka di depan Rumah Kapitan menjadi sentral dari seluruh kampung Kapitan (ditunjukkan dengan warna merah); dan ruang terbuka ini memiliki akses yang kuat terhadap arah sungai dan rumah mayor (garis merah pada analisa *axial map*).

Hal ini menunjukkan bahwa ruang terbuka di depan Rumah Kapitan adalah ruang terbuka yang menyatukan seluruh ruang solid pada kawasan Kampung Kapitan. Selain ruang terbuka yang menjadi sentral, korelasi antar gugus hunian dan Sungai Musi juga tergambar jelas. Hal ini menjelaskan bahwa orientasi Kampung Kapitan ini menghadap ke Sungai Musi. Dua hal itulah (ruang terbuka dan arah hadap ke Sungai Musi) yang menjadi karakter kawasan Kampung Kapitan secara tataran meso atau kawasan.

Kondisi Tahun 2006

Kondisi ini didasarkan pada Peta Garis tahun 2006 yang disusun Pemda Kota Palembang berdasarkan peta udara tahun 2004 – 2005. Peta ini menggambarkan keadaan

Kampung Kapitan sebelum terjadinya pembangunan Restoran Kampung Kapitan.

Kondisi tahun 2006 ini terlihat bahwa Kampung Kapitan amat padat dengan permukiman informal. Kita melihat ruang solid dengan ukuran yang kecil-kecil dibanding dengan Rumah Kapitan atau Rumah Mayor. Namun walaupun begitu kondisi ruang terbuka di depan Rumah Kapitan masih terjaga/tetap menjadi ruang terbuka penting. Hanya karena padatnya Kawasan Kampung Kapitan, ruang terbuka ini berubah dari ruang terbuka dengan skala merah menjadi ruang dengan warna kuning muda (lihat *visual graph*), artinya ruang terbuka ini 'mulai' diabaikan. Namun kita masih melihat bahwa ruang terbuka ini masih terkoneksi dengan Sungai Musi (lihat analisa *axial map*) (Gambar 5).



Gambar 5. Analisa *Visual graph* (kiri) dan Analisa *Axial map* (kanan) untuk Kondisi Tahun 2006

Dari foto terlihat bahwa ruang terbuka ini 'agak terabaikan' dengan ada beberapa genangan air dan rumput tidak terawat. Disisi lain ada perkerasan tepat di depan rumah Kapitan. Hal ini membuat aktifitas terjadi di perkerasan tersebut, dan menempatkan ruang terbuka tanpa perkerasan hanya sebagai resapan (Gambar 6, dan 7). Dua karakter Kampung Kapitan secara meso/kawasan yaitu ruang terbuka dihadapan Rumah Kapitan dan orientasi ke Sungai Musi di tahun 2006-2007 masih terjaga.



Gambar 6. Suasana Ruang Terbuka di Depan Rumah Kapitan Tahun 2007
Sumber: Koleksi Pribadi

Kampung Kapitan dan juga taman di ruang terbuka Rumah Kapitan (Gambar 9).



Gambar 9. Taman di depan Rumah Kapitan (sumber: Koleksi Pribadi, 2014).

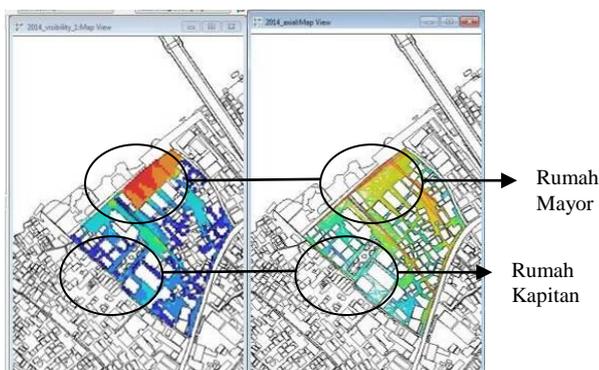


Gambar 7. Perkerasan di depan Rumah Kapitan
Sumber: Koleksi Pribadi, 2007

Dari hasil analisa *visual graph* terlihat bahwa ruang terbuka benar-benar ditinggalkan. Hal ini terkait juga dengan dibangunnya taman, seperti yang terlihat di atas. Taman yang dibangun Pemda mempunyai ketinggian diatas tinggi mata manusia, sehingga secara visual, rumah Kapitan agak terhalang, dan memutus hubungan antar bangunan di sekitar Rumah Kapitan tersebut. Analisa *visual graph* menunjukkan bahwa banyak ruang terbuka yang tidak punya makna visual (warna biru muda hingga tua). Terjadi banyak ruang yang tidak mempunyai koneksi visual di kawasan ini. Hanya pada bagian depan rumah Mayor yang terbuka lebar dan masih mempunyai koneksi secara visual dengan Sungai Musi. Pusat Kawasan Kampung Kapitan jadi bergeser kearah Rumah Mayor secara visual. Analisa *axial map* juga menunjukkan hal yang serupa. Aksesibilitas dari ruang terbuka di depan Rumah Kapitan menjadi terhalang oleh adanya taman tersebut. Efeknya aksesibilitas menuju sungai dari arah Rumah Kapitan menjadi tidak terjadi (warna biru pada analisa *axial map*). Warna kuning hingga merah terfokus pada daerah terbuka di depan Rumah Kapitan.

Kondisi Tahun 2014

Kondisi tahun 2014 didasarkan pada foto udara dari *google earth* dan juga survey lapangan. Jika dari foto udara didapat hasil sebagai berikut (Gambar 8).



Gambar 8. Analisa *Visual graph* (kiri) dan Analisa *Axial map* (kanan) untuk Kondisi Tahun 2014

Dua analisa diatas membuktikan bahwa ada pergeseran pusat kawasan Kampung Kapitan menuju ke arah sungai terutama di depan Rumah Mayor (Gambar 10).

Pada kondisi tahun 2014 terjadi perubahan besar di Kawasan Kampung Kapitan. Hal ini karena munculnya fasilitas Restoran



Gambar 10. Suasana dari Teras Rumah Mayor
Sumber: Koleksi Pribadi, 2015

Dengan kondisi ini maka pada tahun 2014-2015, kampung Kapitan hanyalah sebuah nama sebab karakter kawasan ini telah hilang dan bergeser. Aksesibilitas ke arah sungai ‘terhalang’ baik secara visual maupun secara aksesibilitas jalan. Karakter ruang terbuka di depan Rumah Kapitan juga telah ‘hilang’ karena bukan lagi ruang terbuka yang menjadi ‘pusat’ kawasan, tapi menjadi taman pasif yang tidak bermakna sama sekali terhadap kawasan Kampung Kapitan (Gambar 11).



Gambar 11. Suasana Bagian Belakang Restoran Kampung Kapitan yang Menutupi Akses dan Visual dari Rumah Kapitan
Sumber: Koleksi Pribadi, 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakarifan Pengembangan Wisata

Dengan perbandingan tiga masa perkembangan kawasan Kampung Kapitan terlihat bahwa basis pengembangan sarana wisata khususnya di kawasan ini benar-benar tidak mempertimbangkan karakter kawasan. Pengembangan hanya didasarkan pada kebutuhan sarana penunjang pariwisata, yaitu sebuah restoran.

Hal yang lain lagi yang menunjukkan ketidakarifan dalam pengembangan wisata di kawasan ini adalah penggunaan nama Kampung Kapitan untuk restoran tersebut, akan tetapi justru menutup akses dari arah Kampung itu (lihat foto 8). Bahkan menurut Mulyadi, sebagai ahli waris Rumah Kapitan, tidak ada pembicaraan tentang penggunaan nama Kampung Kapitan, oleh pihak pengembang dengan pihak ahli waris. (Mulyadi, 2015). Tidak ada etika dalam pembangunan sarana ini.

Bahkan Mulyadi dalam wawancara itu juga mengatakan bahwa pihak ahli waris tidak pernah diajak berdiskusi dalam pembuatan taman di depan Rumah Kapitan oleh pihak pemerintah daerah. Efek dari taman tersebut secara ekologis sangatlah besar, sebab air tidak lagi bisa terserap oleh tanah, sebab seluruh taman dilakukan perkerasan. Efeknya, air hujan justru tidak bisa mengalir ke arah Sungai Musi dan justru menggenangi bagian bawah kolong Rumah Kapitan. Ini yang membuat beberapa bagian menjadi cepat lapuk. (Mulyadi, 2015).

Pengembangan Wisata Budaya

Pengembangan kawasan bersejarah seperti Kampung Kapitan ini perlu pengembangan berbasis budaya, yang kemudian dikenal dengan *cultural tourism*. ICOMOS (International Scientific Committee on Cultural Tourism) menyatakan pemahaman *cultural tourism*.

“Cultural tourism can be defined as that activity which enables people to experience the different ways of life of other people, thereby gaining at first hand an understanding of their customs, traditions, the physical environment, the intellectual ideas and those places of architectural, historic, archaeological or other cultural significance which remain from earlier times. Cultural tourism differs from recreational tourism in that it seeks to gain an understanding or appreciation of the nature of the place being visited.” (ICOMOS Charter for Cultural Tourism, Draft April 1997 dalam (Csapo, 2012)).

Jika pengembangan wisata, seperti halnya Kampung Kapitan ini, mengacu pada pengembangan wisata budaya maka tidak akan terbangun restoran yang menutupi kampung, atau pembangunan taman yang tidak bermakna dan merusak suasana kampung; sebab pembangunan berbasis wisata budaya justru

mengajak wisatawan untuk lebih memahami peran dan tradisi yang terjadi di kawasan itu.

Csapo menyatakan lebih detail lagi dari lingkup wisata budaya, yaitu wisata bersejarah yang merupakan fenomena baru dalam wisata budaya. Lebih lanjut Csapo menyatakan dengan mengacu pernyataan Timothy and Boyd:

"heritage can be classified as tangible immovable resources (e.g. buildings, rivers, natural areas); tangible movable resources (e.g. objects in museums, documents in archives); or intangibles such as values, customs, ceremonies, lifestyles, and including experiences such as festivals, arts and cultural events".

Pada kasus Kampung Kapitan, wisata budaya pada kawasan bersejarah dapat dikembangkan tidak hanya pada yang ragawi / *tangible*, (baik yang *immovable* maupun yang *moveable*) namun juga yang tanragawi / *intangible*. Potensi besar ada di Kawasan Kampung Kapitan. Pengembangan wisata berbasis budaya yang juga merupakan kawasan bersejarah memerlukan pemikiran dan konsep pengembangan wisata yang teliti dan panjang. Hal ini dilakukan agar karakter kawasan bersejarah tidak hilang atau terlewatkan/terabaikan, sebab justru nilai-nilai itulah yang akan menjadi alasan datangnya wisatawan. Jika dikaitkan dengan UU Cagar Budaya No 11 tahun 2010, justru pelestarian bangunan/kawasan bersejarah bukan hanya pelestarian fisik bangunan/kawasan semata akan tetapi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan mengembangkan wisata budaya di kawasan bersejarah, usaha pelestarian menjadi semakin nyata dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Csapo, J. (2012) *The Role and Important of Cultural Tourism in Modern Tourism Industry*. Intech Open Acess Publisher .
- Diessen, J. V. (1998). *Stedenatlas Nederlands-Indie*. Purmerend : Asia Maior.
- Muljana, S. (2006) *Sriwijaya*. Yogyakarta: LkiS.
- Mulyadi (2015, Juni 24). Cerita Kampung Kapitan. (J. Adiyanto, Interviewer).
- Subadyo, T. (2012) Optimasi Potensi Artefak Budaya pada Koridor Sungai Musi untuk Pengembangan Wisata Sejarah di Kota Palembang. *Seminar Nasional "Palembang: masa lalu, kini dan masa depan"* (pp. 17 - 24). Palembang: Unsri Press.
- Widowati, I. R. (2007) *Morfologi Tipologi Kampung Kapitan Cina 7 Ulu Palembang*. Semarang: (tidak dipublikasikan) Program Magister Teknik Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
- Zulfikri (2014) Citra Tata Ruang Kawasan Talang Semut Palembang. *Temu Ilmiah IPBLI* (pp. B 53 - B 58). Palembang: Program Studi Teknik Arsitektur FT UNSRI .

RELASI KUASA/PENGETAHUAN DALAM PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN KOTA JAKARTA

Studi Kasus: Kawasan Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang

Sri Suryani

MSc Graduate - Development Planning Unit
The Bartlett Faculty of Built Environment, University College London
Email: srisuryaniassociates@gmail.com

ABSTRAK

Jakarta, ibukota negara Indonesia, dibangun dan dikelola untuk menciptakan kota berskala global dan mewakili citra kemajuan negara. Sejak era paska kolonial, citra global dan modern didominasi oleh diskursus dari penguasa tentang kota modern. Tumbuhnya industri real estat turut mengkonstruksi citra pertumbuhan ekonomi sebagai wacana inti dari proyek pembangunan seperti kota baru dan pemukiman modern. Sementara itu, ibukota mengalami urbanisasi berupa aglomerasi kampung; pemukiman organik dan swadaya dan tak jarang masuk dalam kategori 'kumuh'. Dualisme ini menciptakan konflik diskursus dan identitas dalam pembangunan pemukiman dalam bentuk kebijakan Perumahan Rakyat. Menggunakan konsep Foucault tentang Kekuasaan/Pengetahuan, penelitian ini menginvestigasi bagaimana diskursus identitas kemajuan kota dan kampung diproduksi pada era politik yang berbeda. Dengan pendekatan analisis diskursus dalam kebijakan publik, penelitian ini mengupas relasi pembentukan diskursus sekaligus konstruksi relasi kuasa dalam bentuk arsitektur. Argumen yang diusulkan adalah diskursus pemukiman merupakan perangkat untuk menata kelola pembangunan Jakarta menuju kota global dengan penataan pemukiman kampung.

Kata Kunci: Diskursus, Perumahan Rakyat, Kampung, Kekuasaan/Pengetahuan.

PENDAHULUAN

Sejak era paska-kolonial, penataan kota Jakarta berorientasi pada kompetisi global. Arsitektur menjadi alat pernyataan yang mengkonstruksi pengetahuan dan kekuasaan dalam suatu kurun waktu. Dari konteks historis, berbagai upaya dilakukan penguasa dalam era yang berbeda-beda menciptakan citra kemajuan kota sekaligus representasi pembangunan negara. Sementara itu Jakarta adalah gabungan kantung-kantung perkampungan jauh sebelum era kolonial Belanda yang berkembang seiring bertumbuhnya kota sejak era industri seiring migrasi dari desa ke kota yang tak terbendung. Tata kelola pemerintahan mengarahkan wacana modern dalam pembangunan, termasuk dalam penyediaan perumahan, mengalami ketimpangan dalam praktek.

Kampung merupakan bentuk dari proses bermukim secara swadaya kaum miskin kota yang tidak terangkul dalam sistem perumahan formal. Karakter fisiknya dalam dicirikan

dengan rendahnya kualitas infrastruktur fisik, tingginya kepadatan hunian, atau seringkali disebut sebagai 'kumuh' (Kusno, 2000). Karena itu, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kampung menjadi isu perkotaan bagi pemerintah dalam skala nasional dan kota yang bervisi menciptakan kota global dan modern bagi metropolis seperti Jakarta. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menghubungkan keduanya, dalam bentuk perbaikan kawasan kumuh (slum upgrading) dalam program KIP pada tahun 1970an, hingga pembangunan rumah susun massal dalam proyek '1000 Tower' pada tahun 2007 (Kusno, 2012).

Ketika wacana atau diskursus pemukiman dan kota modern menjadi bagian dari tata kelola dalam pembangunan kota yang mendominasi media publik, terjadi konflik identitas dalam tingkat individu dan populasi. Ini yang disebut Michel Foucault dalam kekuasaan sebagai pengetahuan, sebagai konstruksi pengetahuan yang menciptakan subjek dalam kekuasaan. Penelitian ini adalah

bentuk investigasi tata kelola pembangunan kota Jakarta dan relasi kuasa yang yang mendorong transformasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendekonstruksi fenomena metropolis berskala global dengan menggunakan gagasan Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan.

Pendekatan yang dilakukan adalah studi konsep relasi kuasa dan pengetahuan sebagai lensa analisis fenomena pembangunan kota Jakarta. Dengan menggunakan lensa tersebut, pembangunan Jakarta merupakan konstruksi relasi kuasa melalui diskursus yang digunakan untuk memproduksi arsitektur sebagai manifestasi relasi yang ada. Dimulai dengan analisis historis pembangunan Jakarta serta relasi dengan ideologi pembentuknya sejak paska kolonial hingga kini, pembahasan diperdalam dengan analisis kebijakan perumahan rakyat sebagai bentuk pernyataan kuasa dan pengetahuan. Dari konstruksi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kebijakan perumahan rakyat merupakan konstruksi relasi kuasa yang dibangun pemerintah dengan produksi pengetahuan tentang kemiskinan, kualitas pemukiman, dan manajemen atau tata kelola ruang kota.

METODE PENELITIAN

Arkeologi dan Genealogi Pengetahuan/Kuasa

Michel Foucault, seorang filsuf ternama abad dua puluh asal Prancis, lahir tanggal 15 Oktober 1926 dan wafat pada tanggal 25 Juni 1984. Karyanya dalam dunia filsafat dan politik diminati dan mempengaruhi pemikiran para intelektual, seperti Gilles Deleuze, Paul Rabinow, Giorgio Agamben, dan Antonio Negri. Gagasannya tentang kekuasaan (*pouvoir*) digunakan untuk mendefinisikan ulang relasi antara negara dan masyarakat sejak tahun 1970 sampai 1980. Foucault menggali konsep kekuasaan dari konsep 'yuridis' dan 'liberal' yang menganggap kekuasaan sebagai komoditas yang bisa dimiliki. Ia berpendapat bahwa konsep kekuasaan seperti itu mengabaikan apa yang terjadi pada level kekuasaan yang berbeda. Ia juga mengkritisi gagasan Marx tentang kekuasaan dalam ranah ekonomi yang berkaitan dengan kepemilikan dan mereduksinya dalam lingkup negara dan kelas (Kelly, 2009).

Dari analisis historis, ia merekonstruksi konsep dominasi sebagai teknologi kuasa di era pra-modern. Landasannya adalah kekuasaan berada pada relasi, sebagaimana ia sebutkan;

"between every point of social body,..., exist relations of power which are not purely and simply a projection of sovereign's great power over individual but the concrete, changing soil in which sovereign's power is grounded the condition which make it possible for it to function."

"diantara tiap titik dari badan sosial, terdapat relasi kuasa yang tak hanya proyeksi dari kuasa pada penguasa atas individu, tapi (juga) tapak yang berwujud dan berubah dimana kuasa penguasa menanamkan kondisi yang membuatnya berfungsi" (Foucault, 1980, hal. 184 diterjemahkan oleh penulis).

Foucault menggagas mekanisme kekuasaan yang minim dikritisi dalam sejarah, terutama relasinya dengan pengetahuan dan ekonomi politik. Ia menekankan kuasa ada dalam artikulasi terus menerus dari kuasa pada pengetahuan dan pengetahuan pada kuasa. Lebih lanjut ia berargumen, "pergerakan kuasa itu sendiri menciptakan dan menyebabkan objek pengetahuan baru dan akumulasi badan informasi baru. Gerakan kuasa terus menerus menciptakan pengetahuan dan sebaliknya, pengetahuan menciptakan efek kuasa. Karena itu, humanisme modern keliru dalam membubuhkan garis antara pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lain, dan tak ada artinya memimpikan momen ketika pengetahuan mengurangi ketergantungan pada kekuasaan, ini seperti cara menghidupkan kembali humanisme dalam penyamaran yang utopis. Kekuasaan tidak mungkin bergerak tanpa pengetahuan, tidak mungkin bagi pengetahuan tidak menimbulkan kekuasaan" (Foucault, 1980, hal. 51-52 diterjemahkan oleh penulis). Lebih dalam Foucault menegaskan, "dalam masyarakat seperti kita, secara umum pada masyarakat apapun, terdapat jenis relasi kuasa yang menembus, mencirikan, dan mewakili badan sosial, dan relasi kuasa ini tak dapat berdiri sendiri, bergabung, terwujud tanpa produksi, akumulasi, sirkulasi, dan berfungsinya sebuah diskursus." (op cit, hal.93 diterjemahkan oleh penulis).

Foucault mengemukakan konsep genealogi dan arkeologi untuk menganalisis interdependensi pengetahuan dan kuasa. Menurut Foucault, genealogi merupakan "suatu upaya untuk membebaskan pengetahuan historis dari penaklukkan itu, untuk menjadikannya mampu pertentangan dan perjuangan menghadapi paksaan diskursus formal, seragam,

dan teoritis” (op cit, hal. 85 diterjemahkan oleh penulis). Pembebasan pengetahuan dilakukan dengan menghidupkan kembali pengetahuan lokal untuk menentang hirarki sains dari pengetahuan dan dampak kuasa dominan. Foucault membedakan genealogi dengan arkeologi dalam konteks fungsi, dimana “arkeologi merupakan metodologi yang tepat bagi analisis rasionalitas lokal, dan genealogi merupakan taktik dimana, mengacu pada deskripsi rasionalitas lokal, pengetahuan yang dimaksud, yang mana kemudian dibebaskan akan menjadi bagian dari permainan’ (op cit, hal.85 diterjemahkan oleh penulis). Arkeologi melihat kebenaran sebagai “sebuah sistem aturan prosedur dari prosedur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan praktek pembentukan diskursus, dimana genealogi memandang kebenaran sebagai ‘hubungan dalam relasi sirkuler sebuah sistem kuasa yang memproduksi dan melanjutkannya, dan penciptaan efek kuasa dan memperluasnya” (Rabinow, 1984, hal. 74 diterjemahkan oleh penulis). Dari paparan ini, menganalisis arkeologi dan genealogi merupakan upaya untuk memahami mekanisme penciptaan kuasa melalui pembentukan pengetahuan.

Lebih jauh Foucault menghubungkan produksi pengetahuan sekaligus kuasa dalam konteks geografi. Ia berargumen bahwa “sekali pengetahuan dapat dianalisis dalam bentuk wilayah, ranah, penanaman, pemindahan, transisi, seseorang dapat menangkap proses dimana pengetahuan berfungsi sebagai bentuk kuasa dan menyebarkan efek kuasa. Terdapat pengelolaan pengetahuan, politik pengetahuan, dan relasi kekuasaan yang bergulir dalam pengetahuan dimana, jika seseorang berusaha menuliskannya, hingga seseorang menyadari bentuk dominasi yang dirancang dari istilah tersebut sebagai ranah, wilayah, dan teritori.” (Foucault, 1980, hal. 69 diterjemahkan oleh penulis). Genealogi kuasa dan pengetahuan, menurut Foucault, tak lepas dari strategi mengatur wilayah atau teritori. Ia menegaskan, “pembentukan diskursus dan genealogi pengetahuan butuh untuk dianalisis, bukan hanya dalam konteks jenis-jenis kesadaran, persepsi, dan bentuk ideologi, tapi dalam bentuk taktik dan strategi kekuasaan. Taktik dan strategi dilancarkan melalui penanaman, distribusi, demarkasi, kontrol teritori dan organisasi dari ranah yang bisa membentuk geopolitik dimana preokupasi akan dikaitkan

dengan metode yang ada” (Foucault, 1980, hal. 77 diterjemahkan oleh penulis). Pada titik ini, konsep kuasa dan pengetahuan menyentuh ranah ruang fisik sebagai proses sekaligus produk pengaturan kuasa.

Arsitektur, Identitas, dan Tata kelola

Konsep Foucault mengenai artikulasi pengetahuan dan kuasa ini dijabarkan dalam dua konsep besar; melalui pembentukan diskursus dan tata kelola ruang sebagai manifestasi relasi antara pengetahuan dan kuasa. Dalam *The Order of Things* dan *Archaeology of Knowledge*, Foucault menganalisis relasi antara diskursus dan bangunan. Bangunan atau kumpulan struktur (klasifikasi, zonasi) merupakan pernyataan dan relasi wacana yang spesifik (Hirst, 2005). Bentuk baru relasi antara diskursus dan bangunan dapat diusut dengan menganalisis peran gagasan dan teori dalam arsitektur. Arsitektur dalam hal ini adalah bentuk objek yang terbangun sebagai komponen sebuah diskursus, dan menghubungkan praktek konstruksi, inklusi, dan eksklusi dari objek pada aturan dan pola pembentukan diskursus tentangnya (*op cit*). Dengan menganalisis gagasan dalam arsitektur dan konstruksi ruang, dapat dianalisis bagaimana diskursus memasuki konstruksi dan bagaimana konsekuensinya.

Pembentukan diskursus berhubungan dengan kondisi institusional yang kemudian menjadi sebuah praktek, dan produk dari praktek diskursus. Dengan konsep ini, analisis diskursus dilakukan pada arsitektur dan dalam arsitektur. Pada buku *Discipline and Punish* dan *History of Sexuality*, Foucault meneliti peran penjara sebagai manifestasi relasi baru antara kuasa dan pengetahuan di era modern. Mekanisme pengawasan dalam bentuk pendisiplinan atau ketertiban dibuat dalam normalisasi individual yang berbeda. Foucault mengangkat desain penjara Jeremy Bentham; *panopticon*, sebuah gagasan dalam arsitektur, dimana sedikit orang mengelola yang banyak orang. Penjara, dalam konteks institusi dan ruang, adalah manifestasi konsep pendisiplinan dan tata kelola dalam level individu dan kelipatannya. Hirst (2005) menyatakannya sebagai ruang yang memungkinkan konstruksi diskursus sekaligus pernyataan dalam konstruksi ruang gagasan tentang diskursus tersebut.

Manifestasi kuasa dalam bentuk institusi dan ruang juga dapat diidentifikasi dalam bentuk sekolah. Foucault mengakui

terdapat relasi antara pengetahuan tentang sejarah-geografi pada pendirian sekolah negeri Jules Ferry yang menanamkan semangat sipil patriotis. Hal ini turut dalam konsep produksi pengetahuan untuk menciptakan kuasa di level individu dalam bentuk mekanisme disiplin. Ia menyebutkan, "individual bukan entitas yang diberikan sebelumnya yang disesuaikan dari gerakan kekuasaan. Individu, dengan identitas dan karakteristiknya, adalah produk sebuah relasi dari praktek kuasa pada badan-badan, gerakan, keinginan, dan dorongan. Banyak yang bisa dikatakan masalah identitas regional dan konfliknya dengan identitas nasional" (Foucault, 1980, hal.73 diterjemahkan oleh penulis). Dengan kata lain, arsitektur merupakan produk pengetahuan sekaligus kuasa yang terwujud dan mewujudkan pengetahuan baru. Ia adalah teknologi pendisiplinan di bawah kuasa dan pengetahuan. Dalam identitas, melekat konstruksi pengetahuan dan kuasa dalam level individu yang berhubungan dengan konstitusi tertentu.

Konsep arsitektur sebagai gerakan pengetahuan dan kuasa ini mengkritik konsep kuasa yang bersifat represif. Foucault menyatakan, "jika kuasa tidak lain merupakan penindasan, jika ia tak melakukan apapun selain berkata 'tidak', apakah kau kira orang akan bergerak untuk mematuinya? Apa yang membuat kuasa menahan kebaikan, apa yang menjadikannya diterima, adalah sesederhana fakta bahwa ia tak hanya memberatkan kita dengan dorongan berkata tidak, tapi ia melintasi dan memproduksi benda, menimbulkan kesenangan, membentuk pengetahuan, menghasilkan diskursus. Ia perlu dipertimbangkan sebagai sebuah jaringan produktif yang mengalir badan sosial, lebih dari perihal negatif yang berfungsi sebagai penindasan" (op cit, hal.112 diterjemahkan oleh penulis). Jika diskursus menciptakan pendisiplinan di level individu, terdapat kuasa pada level populasi. Foucault menyebutnya dengan *governmentality* atau tata kelola. Gerakan kuasa ini bergulat dengan fenomena populasi, singkatnya untuk menjalankan administrasi, kontrol, dan pengarahan akumulasi modal dan sistem kuasa yang memerintahkan akumulasi manusia, sejak abad ketujuhbelas, sehingga berhubungan dan fenomena tak terpisahkan: karenanya, muncullah masalah demografi, kesehatan publik, kebersihan, kondisi pemukiman, harapan hidup, dan

kesuburan" (op cit, hal.125 diterjemahkan oleh penulis)

Foucault mengangkat konsep *dispositif* yang merupakan paduan dari produk pengetahuan dan kuasa dalam bentuk strategi tata kelola. Ia menjabarkan; "apa yang aku ingin sampaikan dengan istilah ini adalah, pertama, panduan heterogen yang sepenuhnya terdiri dari beberapa diskursus, institusi, bentuk arsitektur, keputusan regulasi, hukum, ukuran administratif, pernyataan ilmiah, proposisi filosofis, moral, dan filantropis singkatnya, yang diucapkan dan yang tak diucapkan. Dispositif sendiri adalah sistem relasi yang dibangun antara elemen-elemen ini. Ke dua, apa yang ingin kuintifikasi dari aparat ini adalah tepatnya hubungan alamiah yang berada antara elemen-elemen heterogen. Karenanya, suatu diskursus tertentu suatu waktu dapat berupa institusi program. dan lain waktu berfungsi sebagai upaya untuk menjustifikasi atau menutupi praktek diam-diam, atau sebagai reinterpretasi praktek ini, membuka rasionalisasi baru. Singkatnya, antara elemen-elemen ini, baik diskursif atau tidak, terdapat permainan perubahan posisi dan modifikasi fungsi yang bisa sangat bervariasi. Ke tiga, aku memahami istilah apparatus sebagai sejenis bentukan apart yang memiliki fungsi utama pada momen historis yang terjadi yang merespon kebutuhan khusus. Dispositif, karenanya, memiliki fungsi strategis yang dominan" (op cit, hal. 194-195 diterjemahkan oleh penulis).

Berdasarkan konsep di atas, dapat diajukan bahwa konsep kuasa dan pengetahuan tak lepas dari wujud arsitektur. Relasi kuasa berada pada level individu dan populasi dalam suatu teritori. Pengetahuan dapat dibentuk tanpa mengubah inti pengetahuan, demi mengkonstruksi relasi kuasa yang diinginkan. Hal ini tak lepas dengan konsep identitas yang melekat dalam individu maupun populasi. Dua entitas dengan level yang berbeda ini dapat ditelaah melalui analisis diskursus pemukiman dalam konteks pengembangan kota. Pemukiman (termasuk perumahan) mewakili konsep individu sekaligus populasi. Konstruksi identitas dalam sistem kuasa dikejawantahkan dalam bentuk kebijakan publik dalam upaya regenerasi kota. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana diskursus dan arsitektur berperan dalam konstruksi sosial yang menciptakan relasi kuasa dalam pengembangan kota? Hipotesis yang diajukan adalah relasi kuasa dalam pembangunan metropolis seperti Jakarta

memainkan peran diskursus untuk membentuk identitas melalui konstruksi arsitektur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas dan Arsitektur dalam Pembangunan Jakarta

Kota merupakan manifestasi dari akumulasi berbagai keputusan politik dalam suatu kurun waktu tertentu. Secara fisik, manifestasi keputusan tersebut menciptakan bentuk struktur maupun citra yang mengkonstruksi kota pada ruang fisik maupun non fisik. Karena itu, ia dapat menjadi sebuah taktik politik kepentingan tertentu untuk menciptakan sistem relasi kuasa atas jaringan keputusan politik yang ada didalamnya. Mengacu pada konsep Foucault tentang kuasa/pengetahuan, “sekali pengetahuan dapat dianalisis dalam bentuk wilayah, ranah, penanaman, pemindahan, transisi, seseorang dapat menangkap proses dimana pengetahuan berfungsi sebagai bentuk kuasa dan menyebarkan efek kuasa” (Foucault, 1980, hal. 69 diterjemahkan oleh penulis). Dalam konteks ini, bagaimana pengetahuan mengkonstruksi kuasa atas ruang kota? Bagaimana tata kelola diciptakan untuk mengarahkan sirkulasi materi di dalamnya?

Jakarta, sebagai ibukota negara Indonesia, dicirikan dengan kemakmuran dan semangat kompetitif negara. Di era paska kolonial, Jakarta dibangun dari semangat pengakuan dan kompetisi global melalui perangkat identitas modern sebagai identitas nasional (Kusno, 2000). Soekarno, presiden pertama Indonesia, menciptakan wacana modernitas melalui konstruksi ‘Nation Building’ atau ‘Pembangunan Bangsa’. Proyek ini merupakan upaya Soekarno untuk meninggikan derajat bangsa Indonesia dan menciptakan semangat bangkitnya bangsa dari belenggu penjajahan. Arsitektur menjadi sebuah pernyataan pembangunan identitas melalui pembangunan monumen, boulevard, dan bentuk arsitektur modern. Pembangunan Monumen Nasional, stadion untuk penyelenggaraan Asian Games tahun 1962, atau Masjid Istiqlal merupakan beberapa contoh dari manifestasi pembangunan karakter dan kemajuan bangsa melalui arsitektur modern. Dengan proyek ini, Jakarta berupaya memiliki posisi yang

kompetitif diantara kota-kota negara maju (*op cit*).

Upaya konstruksi identitas nasional dalam ibukota dilakukan dalam rangka mencapai tatanan kota yang kompetitif sejak tahun 1950-an. Pada konteks era Orde Lama dibawah kepemimpinan Soekarno, penduduk Jakarta tercatat masih di bawah dua juta jiwa dengan tingkat urbanisasi yang rendah (Douglass, 2010). Sementara itu, Jakarta telah memahat simbol kekuasaan dan perubahan nasib sejak kemerdekaan (Toer, 1955; Kusno, 2014). Ia merupakan magnet yang menarik arus migrasi dari desa-desa untuk mencari peluang ekonomi di ibukota. Okupasi ruang-ruang kebun dan pertanian dan membangun tempat tinggal di atasnya adalah strategi kaum migran untuk bertahan. Pemukiman yang berlipat ganda ini menjadi sebuah entitas organik yang tumbuh secara swadaya yang disebut sebagai kampung. Saunders (2010) menyebutnya sebagai *arrival city*, ruang transisi dimana kemungkinan-kemungkinan ekonomi, sosial, dan budaya diciptakan dari arus migrasi populasi. Konsekuensinya adalah imej modern berbenturan dengan realita bertumbuhnya kampung dengan infrastruktur minimum sesuai sumber daya yang tersedia. Pemukiman ‘ilegal’ ini mengokupasi lahan-lahan kosong, dimana Jakarta mulai diisi oleh pedagang kaki lima, dan pengemis (Abeyasekere, 1987). Kondisi transisi dari negara terjajah menjadi negara kesatuan dengan dinamika politik di berbagai daerah dan di taraf global, menyebabkan strategi perumahan dan pemukiman secara strategis belum bisa dilakukan terpusat oleh pemerintah. Dalam keberjalanannya, diskursus ini mengalami transformasi seiring dengan dinamika politik tanah air.

Masa pemerintahan Soeharto (1965-1998) menciptakan kondisi pemerataan pembangunan dengan perputaran ekonomi yang terpusat dan birokratis. Melalui gerakan disiplin nasional, Soeharto mengedepankan terkendalinya harga pasar dengan menciptakan masyarakat produktif dan politik yang stabil. Pada masa ini terjadi transisi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan dari Jakarta menuju Jabodetabek. Douglas (2010) menyatakan pertengahan tahun 1980-an hingga 1997 terdapat ekspansi besar dengan terbukanya ekonomi Asia Tenggara ke pasar global. Awal tahun 1990-an institusi perbankan dan pembiayaan terbuka pada investasi global,

berdampak pada suntikan modal besar-besaran pada pembangunan lahan kota. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan mega infrastruktur dalam bentuk jalan tol dan bandara, hingga pasar properti dalam bentuk kota baru baik dalam kota maupun peri-urban (Douglass, 2000; 2010).

Masifnya pembangunan berbasis perputaran ekonomi global demi kestabilan ekonomi taraf nasional pada era Soeharto dibarengi redupnya infrastruktur sosial politik. Orde Baru menciptakan mekanisme disiplin melalui pelarangan aktivisme di ruang publik untuk membentuk imej kota makmur dan pembangunan yang merata. Pembangunan kota baru menciptakan imej kota modern dengan nafas internasional dimotori oleh investasi global yang disediakan pengembang besar. Berbagai pembangunan kota baru menciptakan diskursus pengembangan kawasan bisnis dan komersial maupun hunian modern. Pembangunan skala besar ini menciptakan aglomerasi kota hingga perencanaan Jakarta kemudian melingkupi daerah regional menjadi JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Sementara itu, wajah kemiskinan dan kehidupan pekerja industri dan pengusaha kecil menyusupi di ruang-ruang antara masifnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jalan layang atau kolong jembatan, serta ruang antara gelembung pembangunan kota baru dan lokasi industri. Kedudukan pemukiman padat bagi kaum miskin kota yang tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan dan perencanaan pengembangan kota yang bersifat *top-down*. Pada masa ini tercatat terjadi beberapa kali alih fungsi lahan pemerintah menjadi area komersial maupun hunian di atas lahan yang diduduki warga miskin kota. Salah contoh adalah pembangunan super-blok komersial seperti Kemayoran Trade Centre sebesar 450 hektar dengan mengusur 30.000 warga kampung. Beberapa pengembangan baru memakan lahan dengan fungsi ruang terbuka hijau untuk area resapan kota (Kusno, 2011, 2013; Steinberg, 2007). Polarisasi kota tercermin dari wajah kontras arsitektur di dalamnya; gedung pencakar langit dan pusat komersial berseberangan sebagai simbol kemajuan ekonomi dengan perkampungan padat sebagai simbol kemiskinan.

Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara tahun 1997-1998, Jakarta menjadi ruang konflik akibat segregasi sosial dan

ekonomi yang meruncing. Jatuhnya nilai rupiah karena perputaran ekonomi yang bertumpu pada kondisi global menyebabkan kolapsnya industri dan meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah kampung bertambah dua kali lipat (Firman, 1999). Para pengembang mencaplok lahan-lahan besar untuk membangun kompleks hunian dan komersial terpadu untuk menarik kelas menengah atas kembali ke pusat kota (Kusno, 2014). Antara tahun 1996 hingga 2002, tercatat terdapat 39 kasus penggusuran dengan total 170.352 keluarga dengan 8.645 rumah menjadi korban di wilayah Jakarta dan sekitarnya (UPC, 2004). Pada awal tahun 2000-an, mega proyek mendapat proporsi lebih besar dibanding tahun 1990-an (Douglass dan Huang, 2007). Kondisi ini berpotensi kembali menciptakan ketegangan sosial politik di masa depan. Peresthu (2002) menyatakan perlunya mengintegrasikan keberadaan kampung dalam perencanaan pembangunan kota.

Jaminan kestabilan ekonomi didorong dengan reformasi politik terpusat pada Orde Baru menjadi demokrasi yang menekankan peran pemerintah daerah. Relasi kuasa yang diciptakan dalam demokrasi menekankan peran gubernur sebagai motor utama dalam mengelola pembangunan Jakarta. Kini, dengan populasi penduduk sebesar 10 juta jiwa saat malam hari dan 11 juta jiwa saat siang hari (BPS, 2015), Jakarta masih memegang kunci pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih menjadi orientasi pembangunan kota, didukung dengan tata kelola sirkulasi kapital dan populasi. Meskipun Gross Regional Domestic Product (GRDP) Jakarta hanya mencapai seperlima dari total Gross Domestic Product (GDP) Indonesia, ia mengontrol dua pertiga ekonomi nasional (Salim dan Kombaitan, 2009). Tanah sebagai aset utama properti masih menjadi ruang kontestasi dimana kampung berada dalam sistem tata kelola ruang kota melalui jaringan ekonomi didalamnya. Diskursus atas tanah mencakup sistem administrasi kepemilikan dan sistem tata kelola fungsi lahan menjadi dua diskursus yang mengkondisikan pengetahuan sebagai mekanisme kuasa seseorang atas tanah.

Kampung merupakan satu-satunya pilihan bagi kaum migran dengan tingkat ekonomi rendah untuk mencari penghidupan di Jakarta. Ia adalah bentuk arsitektur yang rasional untuk menghindari biaya administrasi pendaftaran tanah dengan syarat luas rumah minimum dan standar, termasuk tingkat kepadatan dan area hijau yang harus

dipersiapkan (dalam bentuk KDB, KLB, atau standar luas unit hunian) sebagai syarat perizinan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sementara itu, institusi pemerintah yang menangani wilayah perumahan dan pemukiman belum mampu mencapai penyediaan perumahan layak huni yang cukup dan menanggapi arus sirkulasi migran dari desa ke kota.

Kaum migran membangun kampung sebagai respon atas eksklusi pasar perumahan formal. Sebagai gantinya, mereka menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan kampung, tak tercantum pada peta, dimana sampah tidak diangkut, pajak tak dibayar, dan fasilitas publik tidak disediakan (UN HABITAT, 2003). Sementara itu, Jakarta membutuhkan populasi untuk memutar roda perekonomian negara, menjaga nilai tukar dan harga terjangkau dimana kampung menjawab kebutuhan tersebut.

Keberadaan kampung dalam kota bukan berada pada ruang vakum. Pada konteks Jakarta, keberadaan kampung mendapat tekanan dari dua diskursus yang diajukan sebagai konstruksi identitas. Dari sisi manifestasi fisik dalam bentuk arsitektur, kampung dengan pertumbuhan organik dan sistem pembangunan swadaya menciptakan ruang hunian padat yang tidak teratur dengan infrastruktur taktis, hingga seringkali disebut 'kumuh'. Sejak era Soekarno, keberadaan kampung tak lepas dari produksi pengetahuan oleh penguasa. Pembangunan identitas kota yang berorientasi pada simbol kemajuan dan pertumbuhan ekonomi berada dengan realitas masyarakat kota yang heterogen secara sosial, budaya, dan ekonomi. Kompromi identitas dan realitas tersebut tercermin pada konflik perebutan lahan untuk pembangunan. Konstruksi legalitas tanah yang mengeklusi populasi kampung untuk dapat mengklaim hak atas tanah di kota membuat keberadaan kampung sering terancam penggusuran atas nama pembangunan kota.

Di saat yang sama, ruang kota juga diproduksi oleh pemerintah dan para pengembang. Tiap lembaga memproduksi pengetahuan berdasar pada relasi kuasa yang ingin diciptakan. Pengetahuan tersebut diciptakan dalam kerangka kebutuhan suatu waktu. Sebagai contoh, pemukiman *cluster* terpadu dengan kawasan komersial dan bisnis menggunakan diskursus *green* atau *eco-settlements* kini mendominasi wacana pembangunan skala besar yang dimotori oleh

para pengembang (Kusno, 2011). '*Green Environment*', '*Eco Living*', '*Green Landscape*' menjadi branding pembangunan real estat oleh para pengembang. Diskursus ini mendominasi media dan menciptakan pengetahuan baru dalam konstruksi ruang kota, baik pada target properti, yaitu kelas menengah dan menengah atas, maupun populasi Jakarta secara keseluruhan.

Paralel dengan diskursus tersebut, pemerintah berupaya mencapai target ideal jumlah RTH (Ruang Terbuka Hijau) dalam kota sebesar 30% dengan mengklaim RTH yang kini diokupasi oleh kampung. Sementara alih fungsi Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh pengembang untuk memproduksi ruang komersial dan hunian luput dari upaya pembebasan lahan pemerintah (Kusno, 2011, 2013; Steinberg, 2007). Beberapa kritik muncul dalam konteks ini dimana diskursus *green city* atau kota hijau menjadi justifikasi perebutan lahan kota untuk alih fungsi lahan berorientasi profit (Jakarta Post, 2008). Diskursus kota hijau menjadi rasionalisasi politik untuk menciptakan relasi kuasa menentukan ruang hijau yang perlu 'normalisasi'. Kampung menjadi target pendisiplinan ruang kota melalui konstruksi pengetahuan atas relasi kuasa yang diciptakan pemerintah, pengembang, dan media.

Perumahan Rakyat dalam Tata Kelola Pembangunan di Jakarta

Diskursus perumahan dan pemukiman di Jakarta tak lepas dari tata kelola pembangunan baik pada level pemerintah dan masyarakat umum. Pada era pemerintahan Soekarno, perumahan rakyat "merupakan etika sosial untuk keberlangsungan sosial-politik bangsa, namun tidak dilihat sebagai penggerak produktivitas ekonomi" (Kusno, 2012, hal. 32 diterjemahkan oleh penulis). Perhatian akan isu perumahan dan pemukiman pada masa Soekarno, ditandai dengan 'Konferensi Perumahan Rakyat Sehat' pada tahun 1950 dan dibentuknya lembaga Djawatan Perumahan Rakyat tahun 1951 (Kusno, 2012). Diskursus rakyat mewakili populasi penduduk Indonesia, termasuk kelompok miskin yang hidup dengan kualitas infrastruktur minimum. Dengan demikian, diskursus perumahan rakyat menjadi sebuah pernyataan politik akan pentingnya meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meskipun begitu, kebutuhan perumahan masih merupakan masalah yang sulit diselesaikan oleh

pemerintahan baru. Pada akhirnya, pemerintah memberikan kewenangan pada rakyat untuk membangun rumah secara mandiri, dengan menerbitkan buklet "Perumahan Gotong-Rojong" (Kusno, 2012).

Program perbaikan pemukiman kampung pada era Orde Baru terdapat di dalam program Kampung Improvement Program (KIP) yang merupakan kelanjutan dari proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) di Jakarta tahun 1960-an. KIP merupakan program perbaikan kampung skala nasional pertama di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman kampung melalui perbaikan infrastruktur fisik dengan bantuan subsidi (Minnery *et al*, 2013). Konsep yang digunakan adalah penataan dan perbaikan kualitas pemukiman kumuh (*slum upgrading*) berbasis komunitas dan gotong royong (Struyk, Hoffman and Katsura, 1990, hal.244). Kemudian, program ini diadopsi menjadi program nasional dalam dua periode REPELITA I dan II (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dengan dana pemerintah kota dan dana pinjaman dari Bank Dunia. Dalam REPELITA I tercatat 89 kampung diperbaiki dengan jumlah 1,2 juta jiwa, sementara pada REPELITA II 242 kampung dengan 1,9 juta jiwa tercatat menerima perbaikan infrastruktur fisik (Silas, 1984).

KIP berhasil mencapai angka tertentu perbaikan pemukiman, namun program ini masih terbatas pada perbaikan fisik. Kuswantojo (2005) berpendapat bahwa pemerintah kota perlu memiliki definisi dan yang jelas dalam memahami 'pemukiman kumuh', apakah informasi tentang kondisi maupun klasifikasi dalam kebijakan. Permasalahan struktural seperti sistem administrasi tanah belum terintegrasi dalam program. Program penataan pemukiman kumuh (*slum upgrading*). Konsekuensinya adalah perbaikan kampung perlu bernegosiasi dan kompromi dengan laju pembangunan kota. Pada keberlanjutannya kampung-kampung yang mengikuti program KIP digusur untuk proyek pembangunan kawasan komersial dan bisnis (Winayati dan Lang, 2004). Karena jaminan keamanan berhuni (*secure tenure*) bukan bagian dari program, diskursus perumahan rakyat tidak konsisten dalam jangka panjang keberjalanan program. Dengan kata lain, KIP gagal merespon isu formalitas dan informalitas tanah yang menjadi elemen utama berkembangnya perkampungan sejak paska-kolonial (Kusno, 2013). Strategi perbaikan kampung melalui KIP belum mencakup bagaimana logika

pembentukan kota formal dan informal bertemu (Fiori dan Bandaro, 2010). Akar dari dualisme formal dan informal tak lain adalah yang sistem administrasi tanah menyangkut dengan legalitas tanah masih berupa produk peninggalan kolonial yang terus berlanjut.

Program perumahan rakyat tidak menjadi perhatian di akhir tahun '90-an karena krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara diikuti dinamika politik di awal tahun 2000-an. Pergolakan ekonomi politik pada masa itu disusul dengan transisi pemerintahan Orde Baru yang otoriter menuju demokrasi yang menekankan desentralisasi kekuasaan. Meski restrukturisasi pemerintahan membagi peran antara pemerintah pusat (nasional) yang bersifat kordinator dan meningkatnya peran pemerintah daerah untuk memainkan strategi di taraf lokal, hal itu tidak serta merta membuat program perumahan rakyat tepat sasaran. Pada tahun 2006, pemerintah pusat di bawah wakil presiden Jusuf Kalla meluncurkan program 1000 tower rumah susun pro-rakyat (Kusno, 2012). Di Jakarta, program ini merupakan upaya untuk menghilangkan imej kemiskinan di ibukota Indonesia yang terlihat dari menjamurnya pemukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung (Malau dan Galih, 2009). Pemerintah pusat menganggarkan 50 triliun rupiah untuk pembangunan 1000 tower yang setengahnya direncanakan berada di Jakarta dan sekitarnya (Jakarta Post, 2006).

1000 Tower rumah susun menggandeng pengembang untuk menyediakan properti. Penyediaan perumahan berbasis penawaran (supply) dengan bekerja sama dengan pengembang ini mengalami hambatan dari dua aspek. Pertama, tujuan menciptakan hunian terjangkau bagi rakyat di pusat kota tidak tercapai karena nilai lahan di Jakarta terlalu tinggi (Jakarta Post, 2006). Dengan ketersediaan lahan di pinggir kota, rumah susun tidak mampu menjawab masalah aksesibilitas. Selain itu, pengembang menciptakan diskursus perumahan rakyat dalam bentuk apartemen kelas menengah. Sebagai contoh, Kalibata City menyeduakan rusun dengan akses unit menggunakan kartu, fasilitas belanja dan fitness centre, serta parkir mobil (Kompas, 2009).

Pada tahun 2009, 1000 Tower dinyatakan gagal mewadahi kebutuhan perumahan rakyat. Rumah susun yang ditargetkan untuk warga berpenghasilan rendah, pada kenyataannya merangkul kelas menengah ibukota. Rasionalisasi menciptakan pasar formal

perumahan rakyat dari kondisi informal menggunakan konstruksi identitas arsitektur yang tidak mawadahi kebutuhan rakyat. Proyek ini mencerminkan bagaimana ‘konstruksi diskursus identitas terikat dalam praktek kebijakan publik, karena itu membuat kita berpikir kembali perbedaan yang menguntungkan suatu identitas atas identitas lain’ (Schram, 1993, hal.249 diterjemahkan oleh penulis). Visi menghapus wajah kemiskinan dari kota pada akhirnya menciptakan ruang yang menolak penghapusan tersebut.

Tahun 2012, Menteri Pekerjaan Umum mencanangkan agenda kota bebas kumuh 2020 berdasarkan Millenium Development Goals dari UN (2013) dengan target pembangunan bagi 100 juta warga pemukiman kumuh di dunia (Prihandoko, 2012). Ia menyatakan bahwa kota berkontribusi terhadap 52,7% pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami tantangan urbanisasi, penurunan kualitas lingkungan, dan tingginya populasi pada pemukiman kumuh (*op cit.*). Pada tahun 2014, bagian perumahan dari Kementrian PU menerbitkan buku ‘Panduan Kegiatan Quick Count Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh’ untuk memandu surveyor menghasilkan data dan memperbaharui informasi tentang pemukiman kumuh. Di dalamnya mencakup beberapa kriteria dan indikator, misalnya; keteraturan bangunan, kepadatan, kebutuhan rumah dalam pemukiman, kualitas jalan dan drainase, kualitas air bersih dan sanitasi, dan pengelolaan sampah (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014). Meskipun diskursus kampung tidak tercantum secara eksplisit di sana, poin-poin kriteria dan indikator serta deskripsi di dalamnya berhubungan dengan karakteristik pemukiman kampung yang di bangun kaum miskin kota, dimana 80% kaum miskin kota bertempat tinggal di sana (UN HABITAT, 2003).

Kebijakan Perumahan Rakyat menciptakan konstruksi kuasa melalui produksi pengetahuan tentang definisi, kriteria dan indikator kumuh, serta mekanisme manajemen tanah yang mengacu pada nilai kompetisi harga. Arsitektur menjadi acuan klasifikasi kumuh, sekaligus memberi nilai terhadap apa yang bisa dan tidak bisa diakses, termasuk siapa yang mengakses ruang di dalamnya. Penggunaan diskursus Perumahan Rakyat menciptakan institusi yang memproduksi dan menggerakkan relasi kuasa tersebut; pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah kota) pengembang, serta

warga kampung yang menjadi target diskursus tersebut. Rumah susun, kampung, apartemen dan hunian modern, menjadi pernyataan yang mengkonstruksi relasi kuasa dan pengetahuan yang disusun di dalamnya.

KESIMPULAN

Kampung tak lepas dari konstruksi pengetahuan yang diciptakan dalam sistem tata kelola pembangunan kota melalui diskursus perumahan rakyat. Kampung terus menerus menjadi bagian artikulasi terus-menerus dari kuasa pada pengetahuan. Pemerintah mengkonstruksi tata kelola perumahan rakyat melalui diskursus kemiskinan, kumuh, dan kampung. Bentuk diskursus tersebut dimanifestasikan dalam bentuk arsitektur yang mengkonstruksi pengetahuan baru; identitas dan mekanisme inklusi dan eksklusif. Pada kasus KIP, inklusi kampung dalam pembangunan kota tidak mencakup jaminan hidup jangka panjang dalam bentuk kepemilikan tanah. Hal ini berakibat terjadinya penggusuran kampung pada lokasi-lokasi strategis seiring pertumbuhan kota meningkatkan nilai lahan tertentu untuk menjadi pusat bisnis dan komersial.

Pada kasus 1000 Tower rumah susun, perumahan rakyat menjadi diskursus yang menciptakan identitas melalui citra kemiskinan dan kemajuan kota. Bersamaan dengan itu, pembangunan rumah susun mengkonstruksi relasi kuasa yang diciptakan pemerintah dan pengembang. Pemerintah menciptakan konstruksi kumuh melalui agenda global menjadi agenda nasional, untuk diturunkan menjadi agenda kota. Hal ini menjelaskan konsep teritori, kekuasaan, dan pengetahuan; ‘terdapat pengelolaan pengetahuan, politik pengetahuan, dan relasi kekuasaan yang bergulir dalam pengetahuan dimana, jika seseorang berusaha menuliskannya, hingga seseorang menyadari bentuk dominasi yang dirancang dari istilah tersebut sebagai ranah, wilayah, dan teritori.’ (Foucault, 1980, hal. 69 diterjemahkan oleh penulis). Karena itu, diskursus kumuh, kemiskinan menjadi konstruksi tata kelola kampung beserta populasinya. Sementara itu, pengembang mengkonstruksi modern, pembangunan kota hijau, melalui arsitektur berupa rumah susun, perumahan eksklusif dengan fasilitas komersial dan bisnis.

Perumahan Rakyat dalam konteks tata kelola pembangunan di Jakarta merupakan

dispositif (Foucault, 1980) yang berisi paduan beberapa diskursus, institusi, dan mekanisme administratif untuk mengatur relasi kuasa. Ia mencakup apa yang diatur dalam diskursus maupun tidak (kumuh- modern, miskin-pertumbuhan ekonomi), yang muncul dalam satu bentuk kebutuhan dalam bentuk strategi (KIP, 1000 Tower, Kota bebas kumuh). Pengetahuan terus-menerus dikonstruksi dalam bentuk relasi kuasa dalam keberjalanan kota. Dengan transformasi yang terus terjadi, kota menjadi sebuah artefak konstruksi kuasa pada suatu masa yang kemudian menjadi acuan suatu taktik politik atas yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekere, S. (1987) *Jakarta: a history*. New York: Oxford University Press.
- BPS Jakarta (2015) 'Komuter DKI Jakarta Tahun 2014' in Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta No.12/03/31/Th.XV8, accessed on 15/08/15.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya (2014) *Panduan Kegiatan Quick Count Kawasan Permukiman Kumuh*. Direktorat Jenderal Cipta Karya–Kementerian Pekerjaan Umum.
- Douglass (2000) Mega-urban regions and world city formation: Globalisation, the economic crisis and urban policy issues in Pacific Asia, *Urban Studies*, 17(12): 2317–37.
- Douglass (2010) Globalization, Mega-projects and the Environment Urban Form and Water in Jakarta. *Environment and Urbanization ASIA* 1(1) 45–65.
- Douglass, Mike and Liling Huang (200) Globalizing the city in Southeast Asia: Utopia on the urban edge—The case of Phu My Hung, Saigon, *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 3(2): 1–41.
- Fiori dan Bandaro (2010) *Spatial Strategies and Urban Social Policy: Urbanism and Poverty Reduction in the Favelas of Rio de Janeiro*. in Hernandez, F., Kellett, P. and Allen, L. K. (eds). *Rethinking the Informal City: Critical Perspectives from Latin America*. Oxford: Berghahn Books.
- Firman, Tommy (1999) 'From 'global city' to 'city of crisis': Jakarta metropolitan region under economic turmoil', *Habitat International*, 23(4), pp. 447–466.
- Foucault, Michel (1980) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-77*. Brighton, Sussex: Harvester Press, 1980.
- _____ (1990) *The History of Sexuality*, vol. 1, New York: Vintage Books.
- Hirst, P. (2005) "Foucault and architecture" dari Hirst, Paul Q., *Space and power: politics, war and architecture* pp 155-178, Cambridge: Polity.
- Jakarta Post (2006) "No Room for Cheap Apartments: Fauzi," *Jakarta Post*, August 16, 2006.
- Jakarta Post (2008) Eviction, yes? Opinion, 26 January. Available at <http://www.thejakartapost.com/news/2008/01/25/eviction-yes.html> (last accessed September 2011).
- Kelly, M. G. E. (2009) *The Political Philosophy of Michel Foucault*. 1st edition, New York: Taylor and Francis (Routledge).
- Kompas (2009) "Kalibata City, Kayaknya sih Rusunami Keren," *Kompas*, March 21, 2009, www1.kompas.com/read/kotatua/xml/2009/03/21/10252770/kalibata.city.kayaknya.sih.rusunami.keren, accessed June 10, 2011.
- Kusno, Abidi (2000) *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia*. New York: Taylor & Francis.
- _____ (2011) The green governmentality in an Indonesian metropolis. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 32, 314-331.

- _____ (2012) Housing the Margin: Perumahan Rakyat and the Future of Urban Form of Jakarta', *Indonesia*, (94), pp. 23–56.
- _____ (2013) *After the new order: space, politics, and Jakarta*. Honolulu: University of Hawai'i Press
- _____ (2014) Power and Time Turning metropolis. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 32, 314-331.
- Kuswartojo, T. (2005) *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Malau, I. L. F. and Galih, B. (2009, March 5) 'Duo Yusuf Resmikan Rusunami'. Retrieved from http://nasional.news.viva.co.id/news/read/36396-duo_yusuf_resmikan_rusunami accessed on 19/08/15.
- Minnery *et al* (2013) 'Slum upgrading and urban governance: Case studies in three South East Asian cities', *Habitat International*, 39, pp. 162–169.
- Peresthu, A. (2002) 'Jakarta's "Exurbia" Kampongs'. In No.1 - *Perspektivas Urbanas / Urban perspectives*, pp. 49-58.
- Prihandoko (2012) 'Menteri PU: Indonesia Bebas Rumah Kumuh 2020'. October 2012. Retrieved from <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/10/02/090433168/menteri-pu-indonesia-bebas-rumah-kumuh-2020> accessed on 15/08/2015.
- Rabinow, P. (1984) *Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.
- Salim, W. dan Kombaitan, B. (2009) 'Jakarta: The rise and challenge of a capital', *City*, 13(1), pp. 120–128.
- Saunders, D. (2010) *Arrival City: How the Largest Migration in History is Reshaping Our World*, London: Windmill Books.
- Schram, S. F. (1993) 'Postmodern policy analysis: Discourse and identity in welfare policy', *Policy Sciences*, 26(3), pp. 249–268.
- Silas, Johan (1984) *The Kampung Improvement Programme in Indonesia*. in Payne, G. K. (ed.). *Low-Income Housing in the Developing World: The Role of Sites and Services and Settlement Upgrading*. Singapore: John Wiley & Sons Ltd
- Steinberg, F. (2007) Jakarta: Environmental problems and sustainability', *Habitat International*, 31(3-4), pp. 354–365.
- Struyk, Hoffman and Katsura (1990) *The Market for Shelter in Indonesian Cities*. Washington D.C.: The Urban Institute Press.
- Toer, P. A. (1955) Letter to a friend from the country. In H. Aveling (Ed. and trans). *From Surabaya to Armageddon* (pp. 69–76). Singapore: Heinemann Books.
- UN HABITAT (2003) *The challenge of slums : global report on human settlements, 2003/United Nations Human Settlements Programme*. London: Earthscan
- United Nation (2013) 'Goal 7: Ensure environmental sustainability'. In *Millenium Development Goals Report 2013*, from www.un.org/millenniumgoals accessed on 24/08/15.
- UPC (2004) *Data penggusuran beberapa tahun terakhir*, <http://www.urbanpoor.or.id/gusur/data.php?action=fullnews&id=1>, 24 April 2004
- Winayanti, L. dan Lang, H. C. (2004) 'Provision of urban services in an informal settlement: a case study of Kampung Penas Tanggul, Jakarta', *Habitat International*, 28(1), pp. 41–65.

MAKNA YANG TERSIRAT & TERSURAT DALAM VISUALISASI BANGUNAN RUMAH GADANG DI MINANGKABAU

Sri Rustiyanti

Program Studi Etnostudi, Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung

Email: rustiyantisri@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang makna yang terkandung dalam bangunan rumah adat di Minangkabau yang dinamakan Rumah Gadang. Tentu saja pembahasan hal ini, tidak akan lepas dengan budaya masyarakat Minangkabau, Bundo Kandung, dan sistem matrilineal. Filosofi yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yaitu 'alam terkembang jadi guru', sehingga makna filosofi tersebut juga tercermin dari keunikan bangunan Rumah Gadang yang selaras dengan alam. Rumah gadang berdiri kokoh dan sejajar dengan arah mata angin. Posisinya mengarah dari utara ke selatan. Inilah keistimewaan bentuk rumah gadang, rumah adat Minangkabau yang mencerminkan budaya Minangkabau. Rumah gadang melengkung tajam seperti bentuk tanduk kerbau yang sisinya melengkung ke dalam, sedangkan bagian tengahnya rendah seperti perahu. Atap rumah gadang ini disebut gonjong, dan secara estetika merupakan komposisi yang dinamis. Desain arsitektur bangunan rumah gadang menurut para ahli arsitektur bangunan merupakan konstruksi bangunan tahan gempa. Rumah gadang sebagai penyemarak sebuah nagari di Minangkabau, segala pusat kegiatan dimusyawarahkan dengan para penghulu, bundo kanduang, dan warga masyarakatnya. Rumah gadang juga digunakan untuk tempat mengadakan upacara-upacara, pewarisan nilai-nilai adat, dan representasi budaya matrilineal. Rumah tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal saudara perempuan, sedangkan saudara laki-laki tinggal di surau dekat rumah gadang milik kaumnya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk usaha pendokumentasian rumah adat Minangkabau dan sebagai bahan apresiasi bahan ajar di prodi etnostudi pada khususnya dan masyarakat terkait pada umumnya.

Kata Kunci: Rumah Gadang, Bundo Kandung, Sistem Matrilineal, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Kekhasan lain dari kebudayaan Minangkabau adalah bahwa kebudayaan Minangkabau dibentuk atas dasar agama Islam. Agama Islam mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk kepribadian seseorang. Keserasiaan antara sistem *matrilineal* dan keteguhan terhadap ajaran Islam, menjadi salah satu ciri pembeda antara suku Minangkabau dan suku bangsa lain. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menjadikan nilai-nilai adat dan Islam sebagai pedoman hidupnya atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul dan berpakaian. Perpaduan antara nilai adat dan Islam dikenal dengan ungkapan filosofis *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, telah melandasi tatanan hidup dan menjadi pandangan atau falsafah hidup bagi masyarakat Minangkabau.

Rumah adat merupakan simbol arsitektur yang dimiliki oleh etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Rumah *Gadang* sebagai ikon atau identitas masyarakat Minangkabau. Rumah *Gadang* merupakan salah satu dari sekian banyak hasil peradaban kebudayaan, seni tradisi, dan warisan rumah adat di Indonesia, seperti *Tongkonan* (Sulawesi Selatan), *Selaso Jatuh Kembar* (Riau), *Limas* (Bangka Belitung), *Panjang* (Jambi), *Nowou Sesat* (Lampung), *Musalaki* (NTT), *Lamin* (Kalimantan Timur), *Krong Bade* (Aceh), *Kebaya* (Jakarta), *Istana Sultan Sumbawa* (NTB), *Hanoi* (Papua), *Gapura Candi Bentar* (Bali), *Bolon* (Sumatera Utara), *Bentang* (Kalimantan Tengah). Rumah gadang bagi masyarakat Minangkabau dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum dan sebagai simbol tradisi matrilineal di mana rumah gadang dimiliki oleh kaum perempuan dan garis keturunan

perempuannya. Terungkap dalam petikan pepatah adat Minangkabau tentang kedudukan dan fungsi Bundo Kanduang yang berbunyi: *Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang*, artinya Bundo Kanduang Semarak rumah yang besar. Masyarakat Minangkabau adalah penganut sistem kekerabatan matrilineal, yang telah memberi perhatian lebih luas terhadap perempuan. Dalam hal ini perempuan yang mendapat gelar diberi julukan dengan sebutan 'bundo kanduang', dengan kata lain, perempuan dihormati dan harus dilindungi, untuk itu garis keturunan ditarik dari garis ibu dan warisan diperuntukkan bagi perempuan. Selain itu, perempuan diharapkan pandai mengelola perekonomian domestik (*ambun puruak pegangan kunci*), yang sekaligus mampu mengangkat kebaikan citra keluarga (*sumarak rumah nan gadang*).

Dalam bidang perekonomian dan perlindungan moral setingkat perempuan mendapat perhatian lebih dari laki-laki, perempuan tidak diberi ruang untuk memerankan urusan-urusan publik, misalnya dulu perempuan memasuki dunia seni pertunjukan dipandang tidak layak seorang perempuan dihadirkan di hadapan laki-laki apalagi dipertontonkan di tengah khalayak ramai. Kenyataan menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya pada dua dekade terakhir ini, kuantitas perempuan Minangkabau melibatkan diri pada sanggar-sanggar seni pertunjukan meningkat tajam dibanding dengan masa-masa sebelum dua dekade terakhir ini. Keberadaan perempuan dalam sistem sosial-budaya Minangkabau, secara simbolik dikonsepsikan sebagai bagian dari ornamen domestik rumah adat, atau yang disebut sebagai *sumarak rumah gadang*. Dalam konsepsi demikian, secara fisik, ruang pengungkapan diri kaum perempuan hanya berkisar di seputar rumah tempat tinggal. Pada masa lalu, dan masih terasa hingga kini, konsepsi itu tercermin dari bukti-bukti sosiologi pertunjukan bahwa peran-peran tokoh perempuan yang terdapat dalam teks kaba-kaba yang dipertunjukkan dalam genre randai, misalnya selalu pemerannya diambil oleh laki-laki. Sebagaimana diungkapkan oleh Navis, pada masa lalu 'haram' bagi perempuan untuk mempertunjukkan dirinya di atas panggung (Navis, 1982: 97).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis menginterpretasikan berdasarkan pengalaman dan pemahaman penulis, di samping juga berdasarkan pendapat masyarakat Minangkabau. Dengan demikian pendekatan etik dan emik digunakan secara kombinasi. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna rumah gadang baik yang tersirat maupun yang tersurat sesuai dengan kenyataan yang ada.

PEMBAHASAN

Kesenian Minang pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari dasar falsafah atau pandangan hidup dan kehidupan sosial suku Minangkabau, tegasnya adalah adat Minangkabau itu sendiri. Kekuatan adat Minang itu terpatri dalam pepatah *Adaik nan indak lapuek dek hujan, dan indak lakang dek paneh* (tidak lapuk karena hujan dan tidak leang karena panas). Adat dikatakan langgeng menurut pepatah itu maka dimanifestasikan dalam pepatah *Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Hakikatnya selama suku Minangkabau menganut syarak berarti adat itu selamanya-lamanya langgeng dan lestari. Dalam syarak terkandung dua unsur pokok yaitu aqidah dan syariat. Oleh karena itu segala sesuatunya yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan terkait dengan adat dan syarak, yang saling berjalan secara sinkron. Hal ini telah menjadi ketetapan dengan suatu Sumpah Satir dalam sebuah "*Piagam Bukit Marapalam*" pada tahun 1827 secara terpadu oleh para pendukung adat, ulama dan cendekiawan Minang di masa itu (Nursam, 1967: 76).

Fungsi Rumah Gadang adalah sebagai tempat tinggal bagi garis keturunan matrilineal dan juga sebagai tempat melaksanakan kegiatan adat dan ritual di Minangkabau. Rumah Gadang selain sebagai rumah tinggal ialah sebagai simbol kekerabatan matrilineal, sebab yang diperbolehkan menempati kamar-kamar hanyalah kaum perempuan dan anak gadis. Bangunan rumah gadang yang dimiliki oleh suatu keluarga biasanya berukuran lebih kecil daripada yang dimiliki oleh suatu kaum, karena rumah yang dimiliki oleh suatu kaum, mempertimbangkan untuk menampung gabungan keluarga yang memiliki satu garis keturunan atau suku di Minangkabau.

Rumah Gadang yang telah lama digunakan masyarakat Minangkabau ternyata menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah memahami kondisi lingkungannya dengan mengadopsi teknik arsitektur bangunan tahan gempa. Wujud kearifan lokal dapat dilihat sebagai hukum adat, tata kelola, tata cara bertindak dan perilaku sehari-hari dapat dilihat pada arsitektur rumah adatnya. Manusia dengan alam pikirnya dan alam dengan elemen iklimnya menjadi faktor yang mendorong munculnya kearifan lokal yang membentuk identitas arsitektur dan lingkungan. Pengalaman membaca fenomena alam (gempa, musun hujan dan kemarau, kelembaban, arah dan pergerakan angin) mendorong kearifan lokal membentuk arsitektur dan lingkungannya. Para pakar selama ini mengenal Rumah Gadang merupakan salah satu konstruksi berarsitektur bangunan tahan gempa. Keunikan lain yakni atap rumah yang curam. Betapapun deras hujan, air tak mengendap di atap yang terbuat dari ijuk. Fungsi lainnya atap ini bisa melindungi penghuninya dari panas matahari dan memberikan kenyamanan. Sementara bagian dinding yang membesar ke atas, membebaskan rumah gadang dari terpaan tempas kala hujan. Sedangkan kolong di bawah rumah, memberikan sirkulasi udara yang baik bagi penghuni rumah. Lalu di pelataran rumah gadang, ada dua buah bangunan yang disebut rangkiak yang berfungsi sebagai lumbung padi. Tiang-tiang rumah gadang punya kemiringan tersendiri. Dalam pembangunannya, tiang ini tidak menggunakan paku, tapi pasak kayu. Fungsinya, untuk membuat bangunan tahan gempa. Ikatan tiang-tiang di rumah gadang akan semakin erat setiap kali diguncang gempa. Ini mengingat kawasan Sumbar rawan gempa.

Arsitektur Rumah Gadang memiliki keunikan bentuk pada atap yang menyerupai tanduk kerbau dibuat dari bahan ijuk. Bentuk badan rumah segi empat dan membesar ke atas (seperti bentuk trapesium terbalik). Bentuk Rumah Gadang yang paling Khas adalah konstruksi atapnya. Awalnya atap dasar bergonjong empat hanya terdapat di daerah Luhak Nan Tigo. Bentuk atap Rumah Gadang menyerupai bentuk tanduk kerbau serta menyerupai bentuk perahu. Bentuk atap seperti ini, membuat air hujan mudah mengalir serta memberikan ventilasi yang baik pada ruangan Rumah Gadang. Pelapis atap Rumah Gadang biasanya menggunakan ijuk dan atap

Rumah Gadang melengkung tajam seperti bentuk tanduk kerbau yang sisinya melengkung ke dalam, sedangkan bagian tengahnya rendah seperti perahu. Bentuk tanduk kerbau ini, secara estetika merupakan komposisi yang dinamis ada kelengkungan, dataran, dan keruncingan, di samping itu secara fungsi juga sebagai tahan gempa. Selain mengandung fungsi, makna, dan filosofi dari proses pembangunan. Tatacara ketika berada di rumah gadang sudah diatur dalam adat Minangkabau. Salah satunya adalah posisi duduk ketika ada suatu prosesi adat. Duduk dirumah gadang tidak boleh sembarangan, karena posisi duduk telah diatur sesuai dengan kedudukan dalam sebuah keluarga atau kaum.

Rumah Gadang yang sangat luas, biasanya ruang utama dipergunakan saat ada upacara adat, seperti batagak penghulu, sebagai tempat musyawarah keluarga, mengadakan upacara-upacara, pewarisan nilai-nilai adat, dan representasi budaya matrilineal. Rumah gadang disebut juga *Rumah Baanjuang* (tingkatan lantai dalam satu level), biasanya rumah gadang di sisi kiri dan kanannya menjadi tempat untuk prosesi adat atau pesta pernikahan. Di samping sebagai tempat tinggal. Rumah Gadang memiliki tata aturan yang cukup menarik, penghuni perempuan yang telah bersuami, maka akan mendapatkan bagian untuk memiliki satu kamar. Perempuan yang paling muda akan mendapat kamar yang paling ujung dan akan pindah ke tengah jika ada perempuan lain atau adiknya yang telah bersuami, sedangkan perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama pada ujung yang lain. Adapun untuk anak laki-laki tua, duda, dan bujangan, mereka tidur di surau (tempat mengaji dan belajar adat di Minangkabau) milik kaumnya masing-masing.

Rumah Gadang di Minangkabau memiliki tipe dan ragam bentuk yang beraneka ragam. Tipe Rumah Gadang di Minangkabau terdiri atas *Rumah Gadang Atok Bagonjong* (atap berbentuk seperti tanduk) dan *Rumah Gadang Atok Tungkuh Nasi* (atap berbentuk seperti bungkus nasi). *Rumah Gadang bagonjong* identik dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau, bahkan menurut beberapa pendapat atap ini mengadaptasi bentuk kepaan sayap garuda yang banyak ditemui di wilayah pedalaman atau wilayah darek merupakan wilayah inti gabungan dari tiga wilayah yang

disebut *luhak nan tigo*. Lulahk adalah merupakan daerah awal bermukim tanah asal masyarakat dan sebagai daerah awal perkembangan peradaban adat dan kebudayaan Minangkabau; sedangkan rumah gadang tungkuhih nasi identik dengan atap yang menyerupai bungkus nasi, dan rumah gadang ini ditemui di daerah pesisiran.

Bentuk ukiran dari sebuah rumah gadang mengandung makna dan filosofi yang dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada zaman dahulu hingga sebelum berkembangnya bangunan modern. Wilayah Rumah Gadang biasanya memiliki dua hingga enam buah rangkang⁷ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga atau kaum yang menghuni di Rumah Gadang. Selain itu Rumah Gadang Kaum pada masanya memiliki satu surau yang dipergunakan untuk tempat menuntut ilmu agama dan mengaji. Hingga sampai saat ini, masyarakat mengenal rumah gadang dengan mempunyai ciri khas yaitu atap yang berbentuk seperti tanduk kerbau.

Tipe dan ragam Rumah Gadang yang ditemukan di Minangkabau dilihat dari bentuk atap dan bentuk struktur bangunan. Rumah gadang bagonjong di Minangkabau ada beberapa macam jenis di antaranya: *rumah gadang gajah maharam* (gajah jongkok), *rumah gadang gonjong ampek siba baju* (gonjong empat seperti belah baju), *rumah gadang gonjong anam* (gonjong enam), *rumah gadang gonjong batingkek* (gonjong bertingkat), *rumah gadang surambi Aceh* (menyerupai serambi Aceh), *rumah gadang surambi Aceh bagonjong ciek* (bergonjong satu), *rumah gadang surambi aceh bagonjong duo* (bergonjong dua), *rumah gadang surambi papek* (serambi berjajar), *rumah gadang surambi papek batingkok* (sejajar tertutup, *rumah gadang bagonjong limo* (gonjong lima) atau biasa disebut dengan *rumah gadang rajo babandiang* (raja berbanding), *rumah gadang gonjong limo batingkek* (gonjong lima bertingkat), *rumah gadang bagonjong ampek baanjuang* (tingkatan lantai dalam satu level), *rumah gadang gonjong anam baanjuang*, *rumah gadang lontiak bagonjong duo* (karena atapnya lentik dan bangunannya terbuat dari kayu), bahkan rumah gadang di Minangkabau juga memiliki atap gonjong terbilang angka ganjil seperti gonjong lima dan gonjong tiga.

PENUTUP

Semenjak zaman kerajaan Pagaruyung, ada tiga sistem adat yang dianut oleh suku Minangkabau yaitu: sistem Kelarasan Koto Piliang, sistem Kelarasan Bodi Caniago, dan sistem Kelarasan Panjang. Sistem Kelarasan Koto Piliang merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Katumanggungan. Ciri yang menonjol dari adat Koto Piliang adalah otokrasi atau kepemimpinan menurut garis keturunan yang dalam istilah adat disebut sebagai "menetes dari langit, bertangga naik, berjenjang turun" Sistem adat ini banyak dianut oleh suku Minang di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Ciri-ciri rumah gadangnya adalah berlantai dengan ketinggian bertingkat-tingkat.

Sistem Kelarasan Bodi Caniago merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang. Sistem adatnya merupakan antitesis terhadap sistem adat Koto Piliang dengan menganut paham demokrasi yang dalam istilah adat disebut sebagai 'yang membersit dari bumi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi'. Sistem adat ini banyak dianut oleh suku Minang di daerah Lima Puluh Kota. Cirinya tampak pada lantai rumah gadang yang rata. Sistem Kelarasan Panjang digagas oleh adik laki-laki dari dua tokoh diatas yang bernama Mambang Sutan Datuk Suri Dirajo nan Bamego-mego. Dalam adatnya dipantangkan pernikahan dalam negara yang sama. Sistem ini banyak dianut oleh luhak Agam dan sekitarnya. Namun dewasa ini semua sistem adat ini sudah diterapkan secara bersamaan dan tidak dikotomis lagi.

Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago merupakan 2 sistem demokrasi awal yang berkembang di Minangkabau. Lareh Koto Piliang dalam ungkapan adat menganut paham *bajanjang naiak batanggo turun* yang berarti hirarki dan vertikal, sedangkan Lareh Bodi Caniago dalam ungkapan adat menganut paham *duduak randah, tagak samo tinggi* yang berarti egaliter dan horizontal, dan Lareh Nan Panjang merupakan paham yang lahir dengan menganut perpaduan dari sistem demokrasi dan otokrasi. Hal ini, seperti yang berbunyi dalam ungkapan adat '*pisang sikalek kalek hutan, pisang tambatu nan bagatah, Koto Piliang inyo bukan, Bodi Caniago inyo antah*' (pisang mentah hutan, pisang batu yang bergetah, Koto Piliang dia bukan, bodi caniago dia tidak). Dengan adanya dua sistem tersebut, yang pada awalnya masing-masing menganut paham hirarki dan egaliter.

Kedua sistem ini mempengaruhi bentuk rumah gadang yang dimiliki oleh keluarga atau kaum di Minangkabau, berdasarkan paham demokrasi yang dianut Lareh Koto Piliang rumah adatnya bercirikan *baanjuang* adanya tingkatan-tingkatan pada lantai rumah yang mempunyai fungsi masing-masing tingkatan menjelaskan kedudukan seseorang di keluarga atau kaum. Semakin tinggi tempat duduk seseorang semakin tinggi kedudukannya; sedangkan paham demokrasi lareh Bodi Caniago bentuk rumah gadangnya bercirikan lantai yang datar (Gambar 1, dan 2).



Gambar 1. Rumah Gadang Lareh Koto Piliang Ditandai dengan Tingkatan pada Lantai atau Baanjuang



Gambar 2. Rumah Gadang Lareh Bodi Caniago. Ditandai dengan Lantai yang Sama Datar

Bentuk rumah gadang sangat memperhitungkan penyesuaian dengan kondisi alam. Seperti harus tahan dari angin (dapat dilihat pada konstruksi bangunan atap bagonjong dan kemiringan membangun rumah gadang) serta memiliki aliran angin di bawah bangunan atau biasanya disebut panggung yang juga dimiliki oleh banyak bangunan arsitektur tradisional Indonesia lainnya. Selain itu untuk mampu menahan getaran (dapat kita ketahui saat ini Sumatera merupakan jalur patahan lempeng terbesar di Indonesia) hasil konstruksi rumah gadang adalah tidak adanya pemakaian paku dalam rumah gadang, cara yang dipakai adalah menyambung kayu untuk membentuk struktur bangunan dan juga adanya

pemakaian batu sebagai sandi dari tonggak penyambung ke tanah yang bertujuan untuk menahan dari getaran.

Hewan kerbau menjadi salah satu bagian dari prosesi upacara adat dan budaya hampir di seluruh daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Rumah Gadang memiliki bentuk yang hampir sama dengan beberapa bentuk rumah adat tradisional lainnya di Indonesia. Atap Rumah Gadang hampir mirip dengan rumah adat Batak di Sumatera Utara dan rumah adat Toraja di Sulawesi Selatan. Hal ini kemungkinan karena etnis Minangkabau, Etnis Batak, dan Etnis Toraja memiliki kesamaan menganut kebudayaan yang menggunakan kerbau sebagai salah satu bagian dari prosesi adat dan budaya (Gambar 3).



Gambar 3. Model Atap Rumah Adat Batak, Rumah Adat Minangkabau, dan Rumah Adat Toraja

DAFTAR PUSTAKA

- Esten, Mursal (1993) *Minangkabau, Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya.
- Bangun, Pajung (2002) "Kebudayaan Batak". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Junus, Umar (2002) "Kebudayaan Minangkabau". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

-
- Junus, Umar (1984) *Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahfud, Chairul (2006) *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasroen, M. (1971) *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, AA. (1984) *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nursam, Muhamad (1967) *Sejarah Kebudayaan Islam*. Padang Panjang: Saadiyah.
- Penghulu, idrus Hakimy Dt. Rajo (1991) *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Rosdakarya.
- Ranjabar, Jacobus (2006) *Sistem Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjamsuddin, Teuku (2002) *Kebudayaan Aceh*". Dalam Koentjaraningrat (Ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

STRATEGI DIFERENSIASI ARSITEKTUR PERUMAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENCAPAI KEUNGGULAN BERSAING

Kartini Harahap

Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Email: kartiniharahapmsi@yahoo.co.id

ABSTRACT

The existence of the private sector in the development property in Indonesia made a major contribution to the government in running backlog program, still considered a big house in the country. Viewed from the side of the market and investment opportunities enforcement of ASEAN Economic Community (AEC), the property business sector will be more excited. However, this would be in line with the increase in competition, so that a strategy to compete through differentiation strategy that is focused on creating a unique, residential architecture, valuable, difficult to imitate, be of key importance in achieving competitive advantage. Local wisdom as customary aesthetic value contained can be a source of potential in creating differentiation in property and residential architecture. The aim of this study is to describe the design of the differentiation strategy based on local wisdom to achieving competitive advantage in property business sector.

Keywords: *Competitive Advantage, Differentiation Strategy, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kompleksitas dan dinamika lingkungan persaingan semakin tinggi (*Hypercompetition*) sebagai akibat dari perekonomian global, tidak dapat dihindari pada setiap sektor bisnis di Indonesia. Termasuk sektor bisnis perumahan yang telah berkontribusi besar bagi pemerintah dalam menjalankan program “*Backlog*” (kekurangan rumah) yang dinilai masih besar ditanah air sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan penduduk dan gencarnya program pembangunan infrastruktur di Indonesia, menjadikan sektor bisnis perumahan semakin prospek. Arief (2012) dalam Yudha, (2012;3) menyebutkan bahwa prospek bisnis perumahan pada tahun 2014 akan semakin *booming*. Namun, berada dalam kondisi persaingan yang semakin ketat (Anton, 2003;3).

Sehingga untuk dapat bertahan dan berkembang dalam bisnis perumahan akan dihadapkan pada persoalan bagaimana tetap memperoleh keuntungan dalam persaingan yang semakin kompleks disebut sebagai pemenuhan

aspek bisnis, ditengah persoalan bagaimana menciptakan produk perumahan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam, lingkungan binaan dan lingkungan sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1999 disebut sebagai aspek teknis. Tujuan dapat dicapai apabila aspek/fungsi bisnis dan fungsi teknis saling berinteraksi (Anton, 2008;2).

Dalam memenuhi aspek bisnis, pebisnis dituntut untuk mampu menciptakan “keunggulan” (Anton, 2008;3). Hal ini dapat dicapai melalui Strategi diferensiasi sebagai salah satu strategi bersaing yang dikemukakan oleh Porter (1980) dalam mencapai keunggulan bersaing yang akan berimplikasi pada perolehan keuntungan. Bisnis perumahan dapat menggunakan strategi diferensiasi dengan memfokuskan pada penciptaan keunikan yang bernilai bagi konsumen dan sulit untuk ditiru oleh pesaing atas produk perumahan yang akan ditawarkan. Namun, perusahaan dapat mengalami kegagalan apabila perusahaan cenderung memandang sumber yang potensial bagi diferensiasi dari sudut yang terlalu sempit dan menghasilkan keunikan yang tidak bernilai bahkan tidak mencapai daya tahan strategi

dalam mencapai keunggulan bersaing (Porter, 1985:109). Maka, penting untuk memahami landasar dasar dalam menciptakan strategi diferensiasi dan mengidentifikasi sumber-sumber potensial terbentuknya keunikan yang bernilai.

Kearifan lokal yang difahami secara holistik dapat dimanfaatkan sebagai sumber potensial untuk menciptakan strategi diferensiasi arsitektur perumahan dan permukiman dalam mencapai keunggulan bersaing bisnis perumahan. Kearifan lokal memiliki nilai estetika dan bermanfaat terhadap kepentingan komunitas secara ideal dan akan membuka peluang terhadap inovasi desain arsitektur perumahan yang lebih kaya karena produk akhir akan bersifat *development orientations, conservation orientations dan community orientations*. (Respati, 2009:2). Apalagi, fenomena yang berkembang saat ini para pebisnis perumahan hanya berkonsentrasi pada upaya mencapai keuntungan melalui penjualan yang tinggi dengan desain dan fasilitas yang tidak memperhatikan dampak lingkungan yang timbul baik dari segi bencana maupun sosial (Anton, 2008:4).

Kearifan lokal bukan hanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber potensial dalam menciptakan strategi diferensiasi karena didalamnya mengandung unsur keunikan yang bernilai bagi masyarakat tetapi pebisnis perumahan akan memperoleh keseimbangan antara aspek bisnis dan aspek teknis. Kearifan lokal telah teruji mampu menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat secara harmonis, lestari dan berkesinambungan. Namun, Pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber potensial harus difahami secara holistik atau tidak memandang hanya pada aspek fisik dan visual tetapi juga harus pada aspek sosial, budaya dan sumber daya (Imam Santoso, 2009:7).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tulisan ini akan menjelaskan bagaimana menciptakan strategi diferensiasi dalam mencapai keunggulan bersaing pada bisnis perumahan sehingga dapat memenuhi aspek bisnis dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber potensial dalam penciptaan strategi diferensiasi untuk mencapai keunggulan bersaing yang seimbang dengan pembangunan aspek teknis.

Perumusan Masalah

“Bagaimana perancangan strategi diferensiasi arsitektur berbasis kearifan lokal

dalam mencapai keunggulan bersaing pada bisnis perumahan dan permukiman di Indonesia?”

Tujuan

Untuk menjelaskan perancangan strategi diferensiasi berbasis kearifan lokal dalam mencapai keunggulan bersaing pada bisnis perumahan dan permukiman di Indonesia.

Landasan Teoritis

Mengacu pada teori Porter (1985:1), bahwa “inti keberhasilan atau kegagalan perusahaan adalah bersaing, karena bersaing akan menentukan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam suatu industri untuk memperoleh kemampuan diatas rata-rata industrinya”. Selanjutnya, untuk mampu bersaing maka diperlukan strategi bersaing dalam membangun keunggulan dengan menentukan strategi dan memilih jenis keunggulan bersaing yang akan dicapai untuk menghadapi dinamika persaingan yang kompleks dan mengglobal dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi.

Porter (1985:10), memberikan tiga jenis strategi generik dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing, yakni *cost leadership, differentiation* dan *focus*. Pada dasarnya, bahwa suatu perusahaan yang ingin mencapai keunggulan bersaing dapat dilakukan melalui penciptaan nilai unggul atau manfaat lebih bagi para pembeli dibanding pesaing. Nilai yang unggul dapat berasal dari penawaran harga yang lebih rendah dari harga pesaing (*cost leadership*) atau penawaran manfaat yang unik melebihi manfaat yang diberikan oleh pesaing (*differentiation*). Namun menurut pandangan Porter (1980:11) dan Hall, 1980 dalam Charles, 2003:402 berdasarkan hasil penelitiannya terhadap 64 perusahaan bahwa mengejar strategi *cost leadership* dan *differentiation* tidak layak untuk dilakukan secara bersamaan. Karena strategi *cost leadership* membutuhkan usaha untuk meningkatkan efisiensi, sementara *differentiation* cenderung memerlukan biaya yang mahal.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh White (1986) dalam Charles, 2003:402, menyebutkan bahwa penggunaan strategi *cost leadership* dan *differentiation* secara bersamaan akan memberikan kinerja yang lebih baik dan imbal hasil investasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan strategi secara terpisah. Dalam

tulisan ini, akan mengacu pada pendapat Porter (1985), bahwa selayaknya mengejar strategi pada saat tidak bersamaan.

Begitu juga dengan pendapat Ladipo Patrick (2010) dalam Dwi (2012;24), yang menyatakan bahwa dalam memperoleh pasar dan perusahaan dapat tetap eksis ditengah tingginya persaingan, maka perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing melalui strategi diferensiasi yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan persepsi konsumen. Menentukan posisi yang menguntungkan dalam industri dan memiliki keunikan dari para pesaing merupakan tujuan dari strategi diferensiasi. Sehingga dalam tulisan ini memusatkan perhatian pada penggunaan strategi diferensiasi dalam mencapai keunggulan bersaing.

Untuk mencapai keunggulan bersaing yang berimplikasi pada kinerja perusahaan, maka diperlukan penciptaan strategi secara efektif dan diimplementasikan dengan memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih rinci tentang bagaimana strategi kompetitif akan diaplikasikan (Hatten et al., 1978 dalam Lena & Cyrillius, 2007;7).

Kotler (1997) dalam Jemsly dan Martani (2012), menyatakan bahwa diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Secara umum, Kartajaya (2004:128) dalam I.A. Ong & Sugiono (2013;3) memberikan definisi *differentiation* sebagai “*integrations the content, contexts, and infrastructure of our offers to customers*”. Hal ini berarti, bahwa perbedaan yang berhasil diciptakan oleh perusahaan adalah harus berdasarkan pada persepsi pelanggan. Perbedaan tersebut mencakup dalam hal konten atau “apa yang perusahaan tawarkan kepada pelanggan” (*what to offer*) dan dalam hal konteks atau “bagaimana cara perusahaan menawarkannya” (*how to offer*).

Nilai bagi pembeli dapat didefinisikan sebagai manfaat relatif atau kualitas yang diperoleh pembeli atas pengorbanannya. Dengan kata lain, nilai bagi pembeli dapat juga diartikan sebagai manfaat total yang diperoleh pembeli dibagi dengan harga yang dikeluarkan atau selisih antara total nilai pelanggan dengan total biaya pelanggan. Total nilai pelanggan adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan total biaya pelanggan sebagai sekumpulan biaya

yang dikeluarkan oleh konsumen. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai bagi pembeli merupakan segala sesuatu yang diinginkan pembeli dalam produk atau jasa dengan memaksimalkan kualitas atau manfaat yang diterima konsumen atas biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini juga dinyatakan oleh Zeithaml dan Bitner dalam Hariyati (2005:106) bahwa nilai bagi pembeli adalah segala hasil yang didapat oleh konsumen atas produk atau jasa yang berlandaskan pada persepsi dari apa yang diperoleh dan apa yang diberikan. Perusahaan yang berhasil melakukan diferensiasi adalah perusahaan yang mampu menampilkan keunikan yang dinilai penting oleh pembeli (Delmas, 2000) dalam Dwi (2012;28). Kunci keberhasilan strategi diferensiasi perusahaan terletak pada upaya mengembangkan “*point of differentiation*” yang lebih terfokus berdasarkan pada perspektif pelanggan daripada perspektif pandangan operasi bisnis. Aaker dalam Dwi (2012;28) menyatakan bahwa strategi diferensiasi yang sukses adalah strategi yang mampu: (a) menghasilkan nilai pelanggan, (b) memunculkan persepsi yang bernilai khas dan baik serta (c) tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru. Hal yang sama, McMillan dan McGrath (1997) dalam Dwi (2012;29), dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategi diferensiasi diciptakan berdasarkan perbedaan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dan nilai tersebut tidak dimiliki atau sulit ditiru oleh para pesaing.

Pada setiap industri akan memiliki cara yang berbeda dalam melakukan diferensiasi dan setiap kegiatan spesifik yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sumber potensial untuk melakukan diferensiasi. Aktivitas nilai pada suatu perusahaan mulai dari input hingga *output* bahkan hingga aktivitas pelayanan konsumen dapat dijadikan sumber potensial. Untuk itu, dalam menciptakan diferensiasi dapat menggunakan rantai nilai yang ada pada perusahaan tersebut. Kearifan lokal (*local wisdom*) dapat didefinisikan sebagai suatu usaha manusia dengan menggunakan akal budi (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Nurma, 2007 dalam Imam Santoso, 2009;7). Secara substansial, kearifan lokal merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya

dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku Imam Santoso, 2009;7.

Secara holistik, kearifan lokal berkembang dalam berbagai bentuk yakni berupa (i) kelembagaan dan sanksi sosial, (ii) ketentuan dalam pemanfaatan ruang dan perkiraan musim, (iii) pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, serta (iv) bentuk adaptasi tempat tinggal, bencana atau ancaman lainnya. Sehingga pelestarian kearifan lokal sebagai asset budaya yang mencakup entitas harkat dan martabat masyarakat mendapat dukungan dalam konteks hukum positif yang dituangkan dalam beberapa bentuk perundang-undangan, yakni: UU No. 26 tahun 2007, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 5 tahun 1992, UU No. 28 tahun 2002 dan UU No. 7 tahun 2004 (Imam Santoso, 2009;8).

Kearifan lokal sebagai tradisi fisik budaya dalam membentuk bangunan dan lingkungannya. Jika dapat ditampilkan dalam wajah atau wacana keindonesiaan, maka akan berkontribusi bagi terciptanya identitas baru, yang mengandung nilai adat yang estetis, bijaksana dan telah diikuti oleh masyarakat (Juwono, 2006 dalam Antariksa, 2009;32). Dimana, budaya yang telah terinternalis dalam masyarakat mengandung dua unsur, yakni unsur kebiasaan atau gaya hidup dan unsur kelestarian lingkungan serta solidaritas antar individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui *library research*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Diperoleh dengan observasi terhadap berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian, menganalisis dan mengambil kesimpulan. Alat analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam bisnis perumahan di Indonesia, perusahaan harus mampu mencapai keseimbangan aspek bisnis dan aspek teknis. Strategi diferensiasi digunakan sebagai strategi bersaing dalam memenuhi aspek bisnis dan mencapai keunggulan bersaing. Pemanfaatan kearifan lokal sebagai pemenuhan aspek teknis dapat dijadikan sumber potensial dalam menciptakan strategi diferensiasi. Pada akhirnya

keunggulan bersaing yang telah dicapai perusahaan akan terimplikasi pada kinerja pemasaran (Droge, et. al, 1995 dalam Heri, 2006:16), melalui peningkatan pangsa pasar dan tingkat penjualan (Day, et. al, 1988 dalam Heri, 2006:22).

Getz dan Sturdivant (1989) dalam Heri (2006;31), menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan kerja keras dalam menciptakan diferensiasi tetapi akan sebanding dengan hasil yang akan diperoleh perusahaan. Karena diferensiasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan kesuksesan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif (Kutcher, 2000 dalam Heri, 2006;16). Porter (1985), menyatakan bahwa jika perusahaan mengelola hubungan dengan pembeli melalui nilai perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan, maka perusahaan akan memperoleh keunggulan bersaing yang berkesinambungan dan perusahaan akan berkembang.

Pada Gambar 1 disajikan sejumlah kegiatan spesifik dalam merancang strategi diferensiasi arsitektur perumahan berdasarkan kearifan local untuk mencapai keseimbangan aspek bisnis dan aspek teknis pada bisnis perumahan di Indonesia



Gambar 1. Strategi diferensiasi berbasis kearifan lokal dalam mencapai keunggulan bersaing pada bisnis perumahan di Indonesia

Berdasarkan gambar tersebut diatas, dapat dipahami bahwa perusahaan/pebisnis perumahan dapat melakukan 6 (enam) langkah dalam mencapai keunggulan bersaingnya sebagai cerminan aspek bisnis dan menerapkan

unsur-unsur kearifan lokal sebagai sumber potensial untuk menciptakan strategi diferensiasi dan memenuhi aspek teknis, yakni sebagai berikut:

1. Langkah awal dalam menciptakan strategi diferensiasi adalah mengidentifikasi pembeli sebenarnya (individu yang mengambil keputusan pembelian) atas produk akhir yang diciptakan dan ditawarkan perusahaan pada sektor bisnis perumahan. Hal ini dilakukan untuk menentukan identitas pembeli dan mengidentifikasi nilai/manfaat yang dibutuhkan pembeli dan diciptakan oleh perusahaan (Porter, 1985;130).
2. Langkah kedua adalah pebisnis/ perusahaan sektor perumahan melakukan identifikasi rantai nilai (*value chain*) yang terdiri dari rantai nilai pembeli dan rantai nilai perusahaan, rantai nilai pembeli mencakup identifikasi arus aktivitas pembeli yang relevan dengan cara penggunaan dan kebutuhan atas penggunaan produk perumahan dan ini merupakan sumber fundamental dari penciptaan nilai bagi pembeli melalui pengaruh rantai nilai perusahaan terhadap rantai nilai pembeli. (Porter, 1985; 48).
3. Langkah ketiga adalah menentukan susunan peringkat kriteria pembelian pembeli. Hal ini dapat dilakukan perusahaan dengan memenuhi kriteria pemakaian dan kriteria pengisyratan pembeli. Perusahaan menetapkan keunikan yang bernilai sesuai kebutuhan pembeli yang sebenarnya bersumber dari unsur-unsur yang terkandung didalam kearifan lokal sehingga perusahaan dapat memenuhi kriteria pembelian dan mengkomunikasikan keunikan tersebut kepada pembeli untuk mewujudkan kriteria pengisyratan.
4. Langkah keempat adalah mendiferensiasikan produk perumahan yang ditawarkan perusahaan kepada pembeli sesuai dengan harapan pembeli, melalui penciptaan nilai bagi pembeli atau manfaat total yang diperoleh pembeli dibagi dengan harga yang dikeluarkan (Porter, 1985:34). Kunci keberhasilan strategi diferensiasi perusahaan terletak pada upaya mengembangkan "*point of differentiation*" yang lebih terfokus berdasarkan pada perspektif pelanggan daripada perspektif pandangan operasi

bisnis, sehingga perusahaan berpeluang untuk menawarkan harga premi atau memperoleh manfaat kinerja pemasaran lainnya. Keberhasilan menciptakan diferensiasi dapat difahami dari landasan dasar pembentukan diferensiasi yang berawal dari identifikasi sumber potensial strategi diferensiasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dari segi budaya, memiliki ratusan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda. Setiap suku bangsa memiliki hukum adat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, ritual agama, mitos, sanksi bahkan penggunaan ruang dan semua ini terbentuk dalam karakteristik dan citra budaya yang unik dan arif. Keunikan budaya ini mengandung kearifan lokal yang perlu dilestarikan bahkan potensial untuk dikembangkan secara positif dalam menciptakan lingkungan binaan yang berkesinambungan, bahkan mampu berkontribusi dalam tata ruang dan pembentukan citra suatu pemukiman di Indonesia. Kearifan lokal yang unik dan dipandang secara holistik dapat menjadi sumber potensial dalam menciptakan strategi diferensiasi. Seperti yang dikemukakan oleh I Gusti, 2009;20 bahwa rancangan arsitektur yang dikembangkan melalui kearifan lokal akan menghadirkan harmonisasi masyarakat dengan identitas yang khas. Kearifan lokal tidak hanya ditinjau dari fisik dan visual saja; tata guna lahan, sistem jaringan jalan, infrastruktur, prasana lingkungan tetapi juga pada aspek sosial, budaya dan sumber daya (Imam Santoso, 2009;7). Keunikan yang diciptakan tidak akan berhasil dalam mencapai keunggulan bersaing dalam bisnis perumahan jika keunikan yang dihasilkan tidak memiliki nilai bagi konsumen, sehingga diferensiator dituntut untuk mampu menciptakan nilai. Kearifan lokal dapat menjadi sumber potensial dalam menciptakan suatu produk akhir perumahan yang bernilai bagi konsumen, apabila diferensiator mampu menurunkan biaya pembeli atau menaikkan kemampuan kerja pembeli (Porter, 1985;121). Bagi konsumen produk perumahan, biaya pembeli tidak hanya mencakup biaya finansial yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu produk perumahan,

melainkan juga mencakup biaya kenyamanan (*implisit*) dan dalam hal ini kearifan lokal yang telah teruji mampu menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Indonesia secara harmoni, lestari dan keberlanjutan (Respati, 2009;2), serta sebagai alternatif mengurangi dampak konflik dan kesenjangan persoalan yang *urgent* (Antariksa, 2009;32).

Menciptakan nilai bagi konsumen dapat juga dilakukan dengan menaikkan kemampuan kerja pembeli berarti produk akhir dari bisnis perumahan yang diciptakan harus mampu meningkatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan atau bahkan memberikan *prestise* tersendiri bagi pembeli. Dalam menciptakan produk yang bernilai bagi konsumen dapat dilakukan dengan menganalisis rantai nilai pembeli, sehingga diketahui kebutuhan pembeli dan selanjutnya mengidentifikasi aspek-aspek yang terkandung dalam kearifan lokal sebagai pengetahuan lokal yang arif dan telah teruji bermanfaat dalam menciptakan kehidupan komunitas yang harmonis dan keberlanjutan yang mencakup dalam bentuk kelembagaan, pemanfaatan ruang yang meninjau pemenuhan kebutuhan nilai-nilai sosial, pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim dan bencana (Imam Santoso, 2009;8).

Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung didalam kearifan lokal setempat; dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *linkage* atau dengan menggunakan pendekatan *figure ground*, pendekatan citra atau dengan pendekatan *sinkronik* dan *diskronik*. Namun, pendekatan yang digunakan dapat dianggap tidak komprehensif jika tidak menyentuh masalah budaya dengan arsitektur, sehingga pendekatan harus berorientasi pada makna kultural, termasuk nilai estetis, nilai sejarah, nilai estetika, nilai alamiah dan nilai sosial (Antariksa, 2009;43-45).

5. Langkah kelima adalah perusahaan dalam menciptakan strategi diferensiasi dengan menentukan unsur-unsur kearifan lokal sebagai faktor penentu diferensiasi (*basic driver*) dan *cost driver*. *Basic driver* berkaitan dengan kemampuan perusahaan

mengidentifikasi aspek-aspek yang terkandung dalam kearifan lokal, yang pada akhirnya perusahaan diferensiator menentukan pilihan kebijakan faktor penentu sesuai dengan derajat kepentingan sesuai tujuan yang akan dicapai perusahaan. *Cost driver* berkaitan dengan bagaimana menentukan biaya diferensiasi dan bagaimana mendiagnosa tipe diferensiasi dalam menciptakan nilai pembeli atau rantai nilai (Porter, 1985). Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk menciptakan keunikan karena syarat keunikan adalah kinerja terbaik dari beberapa pesaing. Biaya diferensiasi dapat menjadi rendah apabila perusahaan dapat melakukan koordinasi aktivitas nilai yang superior dan memanfaatkan seluruh sumber daya diferensiasi secara optimal (Porter, 1985). Dalam mengubah fitur produk sesuai keinginan pembeli dapat dilakukan dengan biaya yang rendah, yaitu dengan melakukan pada seluruh aktivitas yang ada didalam perusahaan bukan hanya pada departemen pemasaran.

6. Langkah keenam dapat dilakukan perusahaan pada bisnis perumahan dengan memilih setiap kelompok dalam aktivitas primer dan aktivitas pendukung perusahaan sebagai aktivitas nilai perusahaan yang paling bernilai untuk dapat menghasilkan keunikan produk yang bernilai bagi pembeli sesuai pilihan *basic driver* dan *cost driver* yang telah ditentukan sebelumnya dan akan mencapai keunggulan apabila perusahaan tersebut mampu menciptakan koordinasi yang baik dari berbagai aktivitas nilai ini. Rantai nilai merupakan serangkaian aktivitas nilai perusahaan mulai dari kegiatan membuat produk hingga layanan purna jual atas produk (Porter, 1985:114).

Tujuan akhir dari strategi diferensiasi adalah kesinambungan (Porter, 1980:147). Hasil diferensiasi yang mencapai harga premium dapat menjadi strategi yang berkesimbangan jika sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keunikan tersebut tidak dapat ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu perusahaan harus menemukan sumber daya keunikan yang dapat bertahan lama sebagai rintangan pesaing untuk meniru. Menurut Getz dan Sturdivant (1989) dalam Heri, 2006:26 menyebutkan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat

digunakan perusahaan untuk mengembangkan strategi diferensiasi yang efektif. Strategi tersebut dapat difokuskan pada biaya, struktur industri, pilihan-pilihan yang ada dalam pasar atau kemampuan internal perusahaan. Pendekatan menyeluruh yang dapat mendukung strategi diferensiasi meliputi:

1. Memulai dengan melihat pilihan-pilihan dan kebutuhan segmen pasar sasaran kemudian mengidentifikasi aktifitas-aktifitas fungsional kecil yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
2. Menilai dengan benar kelangsungan hidup ekonomi dari berbagai macam pilihan yang ada, untuk menghindari tindakan-tindakan mengejar pilihan-pilihan yang kelihatannya menarik dalam segmen pasar tetapi akan berakhir dengan kegagalan.
3. Mempertimbangkan kemampuan pesaing, biaya dan cara pandang segmen terhadap penawaran kompetitif yang ditawarkan perusahaan dalam rangka menyediakan keuntungan melalui nilai tambah yang diciptakan perusahaan.
4. Menilai secara obyektif baik kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan dalam penerapan strategi diferensiasi maupun halangan-halangan dalam kultur perusahaan untuk mencapai sukses melalui strategi diferensiasi.

KESIMPULAN

Bisnis perumahan di Indonesia dihadapkan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi aspek bisnis ditengah persaingan yang semakin ketat dan pemenuhan aspek teknis. Strategi diferensiasi sebagai pilihan strategi bersaing yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan aspek bisnis. Kearifan lokal sebagai sumber potensial untuk mencapai strategi diferensiasi. Namun, strategi cenderung gagal karena ketidakmampuan perusahaan menjabarkan dalam kegiatan-kegiatan spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa (2009) Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan, *Jurnal Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*, 32-45.
- Anton Timor Saputro (2008) Identifikasi Risiko Dalam Aspek Prasarana Lingkungan Perumahan yang Berpengaruh terhadap Kinerja Biaya Developer, *Departemen Tehnik Sipil Universitas Indonesia*.
- Augusty, Ferdinand (2003) Keunggulan Diferensiasi. *Jurnal Bisnis Strategik* 12:1-15.
- Charles W (2003) Differentiation Versus Low Cost or Differentiation and Low Cost; A Contingency Framework, *Academy of Management Review*, 401-412.
- Creswell, John, W. (2009) *Research Design*. United State of America: SAGE Publication.
- Dwi Endah Lestari (2005) *Analisa Strategi Diferensiasi yang Mempengaruhi Keunggulan Bersaing dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemasaran*, Undip. Semarang.
- Dewi, Sensi Tribuana (2006) *Analisis Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Pada Industri Batik Di Kota Dan Kabupaten Pekalongan)*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Haryati (2010) *Analisa Peningkatan Performansi Produk Fruit Tea Botol dan Genggaman Kemasan Tetra Terhadap Lingkungan Selama Siklus Hidupnya dengan Menggunakan Pendekatan Metode Life cycle Assessment dan dan Life cycle Costing*.
- Hermawan Kertajaya (2004) *Positioning, Differentiation & Brand*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Hutabarat, Jemsly dan Huseini, Martani (2012) *Strategi: Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- I.A. Ong & Sugiono (2013) Analisis Pengaruh Strategi Diferensiasi Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Cincau Station Surabaya, *Jurnal Manajemen Pemasaran* 1 No. 2:1-11.
- I Gusti Ngurah (2009) Bahasa Alam, Manusia dan Arsitektur, *Jurnal Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*, 20-31.
- Imam Santoso (2009) Kearifan Lokal dalam Perspektif Penataan Ruang, *Jurnal Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*, 6-19.
- Lena & Cyrillius (2007) The Relevancy Business Environment and Business Performance Optimization Strategies in Manufacturing Small and Medium Scale Companies in Indonesia, *Business Faculty of Widya Mandala Catholic University*, 1-19.
- Porter, M, E. (1985) *Competitive Advantage*. New York: The Free Press.
- Yudha Dariyanto & Fatturahman (2013) Analisa Perumusan Strategi Bersaing pada PT. Buana Karya Adi Mandiri Pengembang Perumahan Permata Jingga Malang, *Jurnal Ilmiah FEB*.
- Heri Poerbantoro (2006) *Analisa Pengaruh antara Penggunaan Teknologi Informasi, Orientasi Pasar, dan Implementasi Strategi Diferensiasi terhadap Kualitas Layanan dalam Mencapai Keunggulan Bersaing*. Undip, Semarang.
- Respati (2009) Strategi Implementasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Kawasan Kota, *Jurnal Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota*, 2,66.

STRATEGI DIFERENSIASI ARSITEKTUR PERUMAHAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENCAPAI KEUNGGULAN BERSAING

Sari Desi Minta Ito Simbolon

Program Studi Magister Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

Email: desimintaito.simbolon@gmail.com

ABSTRACT

Art Deco emerged from the interwar period when rapid industrialisation was transforming culture. One of its major attributes is an embrace of technology. This distinguishes Deco from the organic motifs favoured by its predecessor Art Nouveau. Medan is one of the city which have many historical-buildings in Indonesia. Some of them still functioned as they were built and other has changed their function and even nearly vanished. This situation which make big change and cause the past popular themes of Medan architecture reappears in a new faces. Many of Art Deco building being renovated and new building which adopt this theme to various need; office, bank, restaurants and even house. But, unique phenomenon have happened is many of Art Deco is not built up fully adopt method of aesthetics of Art Deco itself. So that many from new building have differences form with this themes. Historic buildings in Kesawan Medan has many Art Deco touches. And how to find the Art Deco characteristic will be analyzed from several categories of Art Deco which is applied into the building.

Keywords: Art Deco, Medan, Characteristic.

PENDAHULUAN

Berawal pada tahun 1925, di Perancis diselenggarakan pameran “*Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes*” yang kemudian populer dengan sebutan *Art Deco*. Langgam ini dibidani oleh beberapa seniman, arsitek serta desainer dari era *Art Nouveau*. Tahun 1858 di Inggris muncul *Arts and Craft Movement* yang dipelopori oleh William Morris dengan menggarap desain-desain peralatan rumah tangga dari material asli, “*truthful to materials*” yang kemudian menyebar dan diterima luas di masyarakat Eropa menjelang akhir abad 19. Gerakan ini yang kemudian memberi pengaruh besar pada perkembangan *Art Nouveau*, bentuk-bentuk baru diadopsi dari keragaman seni dan kriya dari beberapa negara Asia, Jepang dan Cina. (Saryanto 2011)

Masa keemasan ini akhirnya diakhiri sesaat setelah perang dunia ke 2, krisis ekonomi melanda belahan Eropa sehingga menginspirasi beberapa gerakan desain, “*Form ohne Ornament*” (*bentuk tanpa ornament*) oleh the Werkbund melalui publikasi katalognya di tahun

1924. Demikian pula yang terjadi di Belanda, kondisi serupa melahirkan gerakan *De Stijl* yang disinyalir dibawa oleh beberapa arsitek Belanda ke beberapa negara penduduknya di Hindia Belanda. Prinsip-prinsip langgam *De Stijl* inilah yang dalam perkembangan sejarah kota-kota di Hindia Belanda memberi pengaruh pada perkembangan bentukan bangunanbangunannya disamping gaya kolonial dan klasik yang telah berkembang sebelumnya.

Berkembang di Perancis, *Art Deco* kental dengan dengan ornamen dan pada perkembangan selanjutnya mengalami evolusi bentuk dari rumit ke bentuk sederhana-simple dan bentukbentuk *streamline*. Upaya mengenali *Art Deco* pada karya-karya seni, desain, dan arsitektur saat ini dapat dilakukan dengan dengan merujuk pada ciri-ciri umum yang berkembang pada era *Art Nouveau* hingga awal abad 20. Bentuk khas yang umum ditemui pada karya-karya *Art Deco* adalah visual-simetris yang hampir dapat dijumpai pada semua karya; furniture, produk elektronik hingga bangunan, baik yang masih mengadopsi stilasi ornamen maupun yang simple.

Ciri-ciri inipun melekat pada hampir semua bangunan berlanggam *Art Deco* yang mulai berkembang pada tahun 20an di Hindia Belanda hingga saat ini. Beberapa ciri *tipo* dan *morfologi* bangunan *Art Deco* memiliki kesamaan di semua tempat di dunia. Pola-pola penyelesaian visual *façade* bangunan umumnya adalah simetris, baik pada bangunan yang mempunyai satu *façade* bangunan ataupun pada bangunan sudut yang umum dijumpai di kota-kota besar di Indonesia termasuk juga kota Medan.

Modernisme telah melahirkan berbagai alternatif gaya yang rasional, puritan, abstrak, dan lugs. Meskipun modernisme juga melahirkan pendekatan yang lebih ekspresif, spontan, dan impulsif. Namun, rupanya masyarakat masih menyukai dekorasi. *Art Deco*. Berawal dari para desainer yang menganggap bahwa dekorasi masih diperlukan dalam lingkungan kita, namun dekorasi tidaklah harus berupa ornamen atau pola hias yang dominan. *Palais Stoclet* di Brussel karya Josef Hoffman dianggap transisi *Art Nouveau* ke *Art Deco*, dan gerakan ini mulai menyebar setelah diadakannya "Exposition des Arts Decoratifs et Industrielles di Paris (1925). Pameran ini menjadi awal bangkitnya kembali kegandrungan desainer dan publik Eropa akan ornamen. Berbeda dengan pendekatan skulptural pada puncak *Art Nouveau*, karya *Art Deco* lebih 'Arsitektural, tertib, mewah dan elegan. Karya arsitektur *Art Deco* menjadi tanda zaman keemasan seni pertunjukan dan hiburan di Amerika (Radio City Music Hall, New York) sehingga untuk suatu masa, bentuk gedung sinema di seluruh dunia mengikuti gaya tersebut.

Gaya ini juga menjadi gaya yang cocok untuk mencerminkan kemakmuran, kemewahan dan sekuriti pada hotel, gedung perkantoran (Empire State Building dan Chrysler Building di New York) serta kapal pesiar mewah. Gaya *Art Deco* diterapkan dalam berbagai skala, mulai dari perhiasan sampai pencakar langit. Gaya ini juga terlihat pada desain poster, iklan-iklan dan kemasan tahun 30-an.

Gerakan yang berdampak luas ini mulai dari pameran tersebut, terutama Exterior, Interior, dan meubel yang ada pada pavilion 'Hotel d'un Collectionneur' karya arsitek Jean Patout dan desainer E.J. Ruhlmann. Gaya ini juga mendapat inspirasi dari karya arsitek Josef Hoffmann di Brussel. Seperti 'Art Nouveau', gaya 'Art Deco' kemudian menjadi gaya besar

yang diaplikasikan pada rancangan bangunan umum, teater, gedung bioskop, hotel, pencakar langit, meubel, kapal pesiar, asesoris, dekorasi interior dan bahkan perhiasan. Gaya ini juga dominan pada desain grafis tahun 30-an.

Gaya *Art Deco* sangat bersandar pada ilustrasi dengan teknik *stylistic* serta *air-brush*. Teknik ini banyak memanfaatkan penyederhanaan bentuk dan *tone*, tetapi untuk mencapai kesan dramatik dan kesan ruang yang khas. Teknik cetak dan reproduksi telah lebih berkembang dan gaya *Art Deco* diterapkan secara sangat meluas dalam berbagai media.

Gaya *Art Deco* dalam desain grafis mengembalikan lagi Dekorativisme tetapi tidak harus dalam bentuk ornamen. Kesan dekoratif bisa dicapai melalui permainan elemen geometrik, blok tipografi, tekstur dan nuansa warna. Gaya ini mengolah teknik stilasi dan permainan garis, bidang dan warna yang teratur dan sensitif. Huruf-huruf 'Art Deco' unik dan segar, serta dibuat dengan apik dan sensitif. Secara keseluruhan gaya ini mengekspresikan suatu penampilan dan kesan yang elegan dan berkelas.

Desainer *Art Deco* banyak menggunakan efek background *air-brush*, stilasi figuratif yang tegas namun sensitif dan angun dan penggarapan garis, bidang, warna, huruf, dan tata letak yang tertib, terkontrol, dan efisien. Keanggunan dan optimisme ini mencerminkan suatu zaman yang penuh dengan gaya dan gairah hidup sekelompok masyarakat yang sukses dan makmur.

Di bumi ini memang nggak begitu banyak tersisa kota yang menyimpan kejayaan *Art Deco*, sebab gaya arsitektur ini memang berumur pendek, kurang dari dua dekade. Namun di kala pertama muncul, gaya ini langsung menarik banyak penggemar, hingga menjadi trend setter kala itu. Bahkan *Art Deco* menjadi gaya hidup dengan tak hanya diterapkan di bangunan, namun juga menjadi fashion.

Masa modernisme dimulai, dimana dunia mulai menolak nilai-nilai konvensional serta mulai merengkuh gaya-gaya yang lebih baru dan segar. Pada masa ini, lukisan2 abstrak Picasso menjadi digemari. Begitu pula dalam hal arsitektur, muncul gaya kubisme yang simpel dan mendobrak kemapanan gaya2 arsitektur Eropa yang menonjolkan kerumitan dan kesempurnaan. Pada masa inilah gaya art deco terlahir ke dunia.

Seperti gaya gotik dan *baroque*, gaya *Art Deco* merupakan musuh abadi gaya *Art*

Noveau, pendahulunya. Gaya Art Nouveau yang sangat klasik Eropa lebih menonjolkan femininitas dengan bentuk lengkung yang organik. Eksterior bangunan Art Nouveau dihiasi relief gadis digambarkan dengan rambut bergelombang yang terurai dan sulur anggur yang membentuk motif floral. Gaya Art Deco justru sebaliknya. Gaya ini menggambarkan maskulinitas dengan garis yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh Revolusi Industri di Inggris pada penghujung abad ke-19, dimana mesin2 pabrik kala itu mampu menciptakan satu hal yang sangat sulit diciptakan oleh tangan manusia, garis lurus.

Sejarah juga sangat mempengaruhi keeksisan gaya ini. Pada tahun 1922, seorang arkeologis bernama Howard Carter menemukan makam mumi Tuthankhamen di Mesir. Kisah kutukan sang mumi yang melegenda membantu menghidupkan kembali kembali gaya arsitektur Mesir yang sudah terkubur ribuan tahun, kali ini dituangkan dalam modernitas art deco. Art Deco memang meleburkan berbagai gaya arsitektur tradisional, mulai dari Babilonia kuno, Mesir, hingga Aztec.

Gaya Art Deco tak hanya menjamur di tanah kelahirannya di Eropa saja, namun juga meluas ke berbagai penjuru dunia. Peninggalan historis berupa bangunan Art Deco masih banyak ditemui di Old Miami, Amerika Serikat; Mumbai, India; Havana, Kuba; Shanghai; Brazil; Melbourne; Sydney dan tentunya yang tak terlupakan di Jakarta dan Medan.

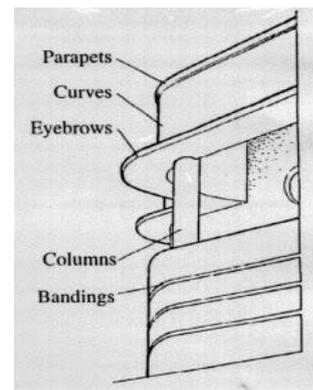
Gaya Art Deco kala itu tidak hanya ditemukan pada bangunan saja, namun meluas sebagai gaya hidup kaum kelas atas. Gaya fashion, perhiasan, furniture, bentuk radio, kamera, hingga bentuk mobil sangat terpengaruh oleh gaya ini.

Walaupun Art Deco sangat dicintai oleh masyarakat dunia kala itu, namun para kritikus justru membencinya karena dianggap terlalu komersial dan mengesampingkan seni murni. Gaya ini secara resmi lenyap ketika dunia mengalami kolaps saat Perang Dunia II berkecamuk.

Karakteristik Bangunan Bergaya Art Deco

Gaya Art Deco memiliki Karakteristik dan ciri khas yang sangat *distinctive* dan mudah dibedakan dengan gaya arsitektur lain. Berikut ini adalah karakteristik gaya arsitektur art deco yang hampir tak dimiliki gaya arsitektur lain.

1. Adanya *eyebrow* atau alis
Jendela bisa dianggap sebagai mata sebuah bangunan, maka tak salah menyebut karakteristik bangunan art deco ini sebagai “alis”. *Eyebrow* adalah bagian bangunan yang menonjol tepat di atas jendela dan berfungsi menghalau panasnya cahaya matahari sehingga juga akan membantu mendinginkan dan menyamankan ruangan. Karena ciri khas inilah, art deco sangat populer digunakan di wilayah tropis seperti di Indonesia dan Miami, Florida (Gambar 1).



Gambar 1. Eye Brow Pada Façade Bangunan

2. Ziggurat
Yang dimaksud ziggurat adalah struktur yang bertingkat-tingkat seperti tangga. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa gaya Art Deco sangat terpengaruh dengan gaya arsitektur purba dari Babilonia dan Mesir. Ziggurat merupakan sebutan bagi punden berundak dari peradaban Mesopotamia dan juga merupakan cikal bakal piramida Mesir (Gambar 2).



Gambar 2. Ziggurat pada Façade Bangunan

3. Sisi yang melengkung
Sisi bangunan yang tidak membentuk sudut, melainkan melengkung (Gambar 3), merupakan ciri khas yang tak dapat dipisahkan dari bangunan bergaya Art Deco. Namun seringkali, sudut melengkung ini hanya diterapkan pada satu atau dua bagian sisi bangunan saja, tidak semuanya.



Gambar 3. Sisi lengkung pada *Façade* Bangunan

4. Atap datar
Bangunan Art Deco memiliki atap yang datar, tidak miring seperti bangunan kebanyakan (Gambar 4). Atap bergaya Art Deco juga biasa dihiasi dengan *parapet* (bagian fasad atap yang sengaja ditinggikan) bahkan dengan menara.



Gambar 4. Atap Datar pada Bangunan

5. Angka Tiga
Gaya ini meniru gaya arsitektur Mesir yang mensakralkan angka tiga (Gambar 5), maka berbagai unsur dalam Art Deco seringkali ditemukan dalam jumlah tiga seperti tiga jendela, tiga banding ataupun tiga anak tangga.



Gambar 5. Angka Tiga pada Bangunan

6. Banding
Banding adalah garis-garis horisontal yang menjadi dekorasi eksterior bangunan Art Deco. Banding biasanya memiliki warna-warna yang mencolok.



Gambar 6. Banding pada *Façade* Bangunan

7. *Glass block*
Penggunaan *glass block* (Gambar 7) atau balok dari kaca digunakan secara ekstensif sebagai pengganti jendela. Tentu saja fungsinya untuk memaksimalkan masuknya cahaya ke ruangan. Kayaknya penggunaan *glass block* ini perlu dilestarikan kembali di rumah tinggal pada masa sekarang ini, sebab bisa mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Selain itu juga mengurangi suhu panas pada ruangan.



Gambar 7. *Glass block* pada *Façade* Bangunan

8. Relief bergaya futuristis
Tak hanya relief sebenarnya, namun mural juga sering digunakan sebagai unsur dekoratif dalam bangunan bergaya Art Deco. Namun penggambaran dalam relief

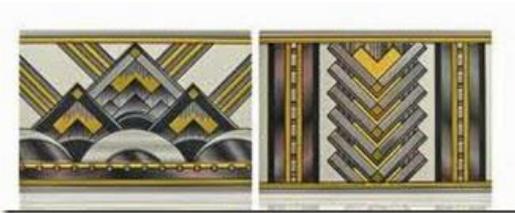
(Gambar 8) tersebut justru mengingatkan kita pada lukisan Mesir kuno dengan gayanya yang kaku namun artistik.



Gambar 8. Relief pada *Façade* Bangunan

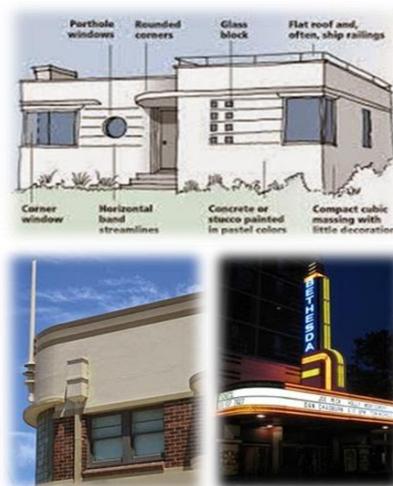
9. Hiasan Geometris

Gaya Art Deco sangat mengandalkan motif geometris (Gambar 9) untuk memperindah bangunan, terutama yang berbentuk garis lurus. Gaya ini juga menerapkan motif khas seperti matahari terbit dan *chevron* atau motif zig zag seperti mata anak panah.



Gambar 9. Hiasan Geometris pada *Façade* Bangunan

Dari beberapa karakteristik *Art Deco* tersebut terdapat juga beberapa karakteristik lain yang spesifikasi ke material bangunan seperti jendela yang bulat, *flagpole* atau tiang bendera, dan penggunaan lampu neon (Gambar 10).



Gambar 10. Karakteristik *Art Deco* Bangunan

Salah satu peninggalan *Art Deco* yang sering kita saksikan di film Hollywood adalah bentuk *theatre* atau bioskop di Amerika. Bioskop ini biasanya memiliki lampu neon di bagian depan. Bioskop ini juga biasa memiliki menara (Gambar 11) dengan nama bioskop tersebut tertera secara vertikal. Struktur ini disebut sebagai *marquee*.



Gambar 11. Menara pada Karakteristik *Art Deco* pada Bangunan

Bangunan Bergaya *Art Deco* di Indonesia

Gambar 12-16 adalah contoh bangunan di Indonesia yang bergaya *Art Deco*.

1. Gambar 12 merupakan Hotel Savoy Hofman (Bandung, Indonesia).



2. Gambar 13 merupakan Museum Bank Mandiri (Jakarta, Indonesia)



3. Gambar 14 merupakan Villa Isola Bandung Karya Arsitek Prof. Charles Prosper Wolff Schoemaker.



4. Gambar 15 merupakan Kantor Pos dan London Sumatera, Medan



5. Gambar 16 merupakan Rumah Sakit Santa Elisabeth, Medan



METODE PENELITIAN

Kajian diterapkan melalui metode Kualitatif. Alasan dari pemilihan metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif adalah karena menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian nilai serta ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Pada teori lainnya, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1). Pakar Lain, Creswell (dalam Herdiansyah, 2010: 8), menyebutkan: *“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting”*.

Sistematika Penelitian Kualitatif

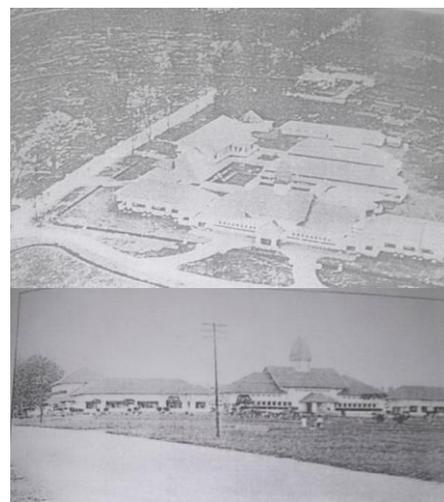
Dalam penelitian kualitatif belum terdapat format baku tahapan-tahapan atau sistematika yang dapat dijadikan patokan dalam penelitian. Ini dikarenakan penelitian kualitatif terkait dengan salah-satu karakteristik dari penelitian kualitas itu sendiri, yaitu fleksibel. Sehingga dengan ke-fleksibelannya jalan penelitian berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

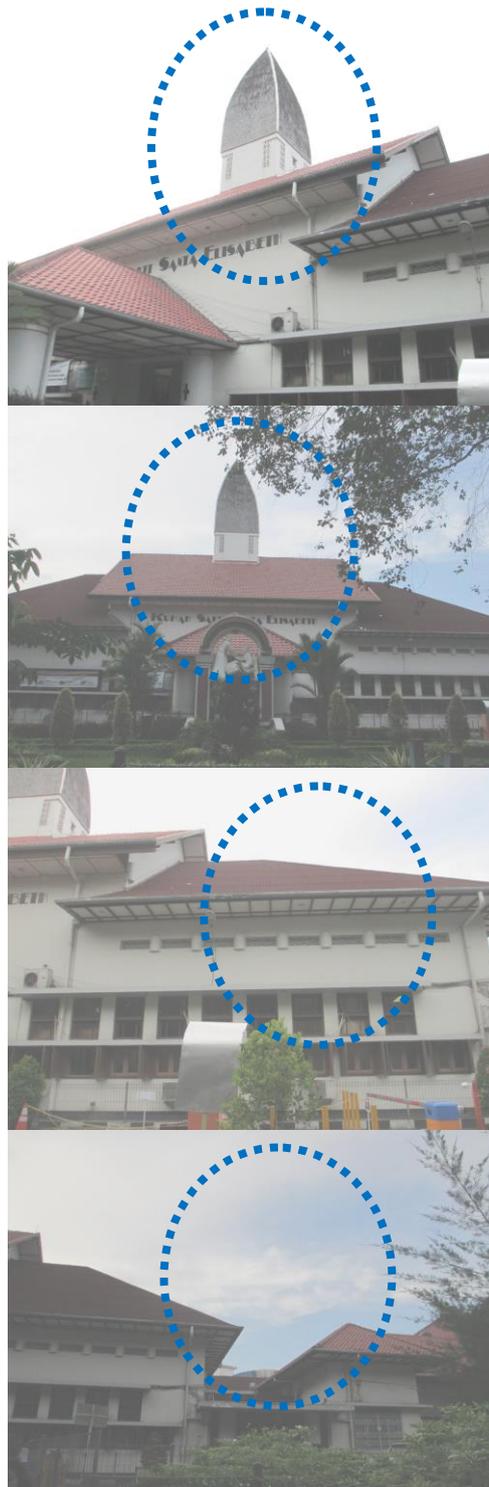
Karakteristik *Art Deco* yang terdapat di bangunan bersejarah di kota Medan salah satunya adalah Rumah Sakit ST. Elisabeth. Bangunan Rumah Sakit Elisabeth ini memunculkan ciri khas *Art Deco* dari beberapa karakter yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Rumah Sakit Elisabeth Medan

Terletak di Jalan Haji Misbah Medan dan didirikan oleh Susteran Fransiskan Elizabeth sebagai Rumah Sakit Katolik pertama di kota Medan. Umah sakit Elisabeth didirikan pada tanggal 11 Februari 1929 (Gambar 17), dengan bentuk bangunan Eropa tua. Bangunan di rancang oleh JM (Hans) Groeneowegen. Status pemilikan dimiliki oleh yayasan rumah sakit Elisabeth Medan. Ukuran bangunan adalah sebagai berikut: luas lahan 2 Ha, luas bangunan 10 x 40 m², tinggi 12 m, panjang 40 m, lebar 10 m. bahan bangunan terbuat dari lantai tegel, dinding bata, atap sirap, tiang beton bertulang. Hingga saat ini kondisi rumah sakit Elisabeth masih terawat dengan baik. dan masih berfungsi dengan baik (Gambar 18).



Gambar 17. Kondisi Rumah Sakit Elisabeth pada Tahun 1929



Gambar 18. Kondisi Rumah Sakit Elisabeth pada Tahun 2015

Karakteristik *Art Deco* pada Rumah sakit Elisabeth sangat terlihat pada *eyebrow* atau plat yang ada di atas jendela, kemudian adanya pemakaian dak beton di beberapa sisi bangunan serta menara khusus yang menjadi ciri khas dari Rumah Sakit itu sendiri.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah:

1. *Art Deco* masih ada dalam semangat pembangunan kota Medan dibuktikan dengan banyaknya bangunan lama yang difungsikan kembali serta bangunan-bangunan baru yang bertema *Art Deco*.
2. Tipe dan morfologi bangunan *Art Deco* awal perkembangan, tidak sepenuhnya menjadi acuan dalam menentukan pilihan tapak/perletakan dan tampilan facade bangunan.
3. Penyederhanaan bentuk dan ornamen dalam facade bangunan-bangunan baru bertema *Art Deco* diselesaikan dalam bentuk-bentuk yang tegas dengan penggunaan material dan warna pada bidang vertical dan horizontal.
4. *Art Deco* sebuah langgam arsitektur yang sangat terbuka, sehingga amat mudah menerima pengaruh baru dari trend yang sedang berkembang saat ini. Keterbukaan ini tercermin pada penggunaan teknologi: teknik dan material baru sehingga hasil akhirnya selalu berupa karya yang *inovatif* dan *eksperimentatif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Saryanto (2011) Pola Asimetris pada *Façade* Bangunan-bangunan Baru Bertema Art Deco di Kota Bandung, 2-7.
- Surapati Syarifuddin (2014) Sejarah Bangunan-Bangunan Bersejarah Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di Kota Medan, 1-113.
- Binilang Artah Sasta, B.P., Sela, Rieneke, L.E., Takumansang, E.D. (2010). Balai Kota Tahuna (Arsitektur Art Deco) 1-15.
- Sunarto Wagiono (2013) Gaya Desain Tinjauan Sejarah: Pascasarjana IKJ.
- Surbakti Asmyta (2004) Penghancur Estetika Kota Bangunan Bersejarah di Kota Medan, 1-13.
- Bayer, Patricia (1992) *Art Deco Architecture*, London: Thames and Hudson.

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI WUJUD PESONA INDONESIA DALAM ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN BINAAN MASYARAKAT

Rozali Jauhari Alfani¹, Hendra Prasetyo²

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram

Email: ¹zalipasca15@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk-bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi hal yang sangat patut untuk dibanggakan. Hal tersebut karena berbagai bentuk kearifan lokal tersebut akan bisa dijadikan sebagai modal hakiki dalam proses pembangunan manusia Indonesia. Akan tetapi, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia tersebut mulai tidak dihiraukan atau sudah diacuhkan keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditinjau kembali beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan sistem kejayaan dari berbagai bentuk kearifan lokal yang salah satunya melalui bentuk arsitektur dan lingkungan binaan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat harus semakin maksimal untuk dilibatkan sebagai bagian dari pembudayaan kearifan lokal sebagai wujud pesona Indonesia di mata dunia yang salah satunya dalam konteks arsitektur dan lingkungan binaan masyarakat. Salah satu metode pembudayaan kearifan lokal tersebut ialah dengan mengedepankan unsur-unsur lokalitas dalam setiap arsitektur bangunan umum yang ada di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Pesona Indonesia, Arsitektur, Lingkungan Binaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Salah satu budaya material (artefak) adalah hasil karya arsitektural. Diantaranya adalah arsitektur yang diberi predikat sebagai “arsitektur khas daerah”. Selain rumah adat tradisional, bangunan lain yang menjadi simbol suatu daerah dan juga sebagai salah satu marka atau ciri sebuah kawasan adalah kantor pemerintah daerah. Arsitektur khas suatu daerah mengacu pada karakter tertentu pada bangunan yang terdapat di daerah tersebut. Karakter lain sebagai pendukung yang memperkuat ciri khas adalah dengan menampilkan bagian dalam ruang (*interior*) pada bangunan. Suatu gedung berdiri tidak hanya sebagai bangunan, tetapi terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik secara fisiologis maupun kosmologis yang menjadi kekhasan yang berlaku di suatu daerah. Hal-hal yang khas tersebut menjadi ciri penanda arsitektur-interior suatu daerah.

PEMBAHASAN

Pengertian Kearifan Lokal (*Local Genius*)

Pertama kali konsep kearifan lokal (*local genius*) ini menurut Koentjaraningrat yang dikutip Kasiyan dan Ismadi diperkenalkan oleh arkeolog H.G Quaritch Wales dalam tulisannya berjudul “The Making of Greater India: A Study in South-East Asia Culture Change” yang dimuat dalam *Journal of the Royal Asiatic Society* (1948). Ciri-ciri khas atau yang biasa disebut sebagai ‘pribumi’ itulah, yang oleh Wales diistilahkan ‘*local genius*’, yang di dalamnya terkandung makna sebagai ‘*basic personality of each culture*’. Dengan mengacu pendapat Wales mengenai *local genius* secara luas, dapat diartikan sebagai proses *cultural characteristic*, yakni perkembangan dari proses fenomenologis ke sifat kognitif, memiliki dasar: 1. Menunjukkan pandangan hidup dan sistem nilai dari masyarakat (*orientation*); 2. Menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap dunia luar (*perception*); 3. Mewujudkan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*attitude* dan *pattern of life*); 4. Mewarisi pola kehidupan masyarakat (*life style*).

Tentang Definisi Kearifan Lokal Sebelumnya

Pada umumnya, pengertian kearifan lokal telah banyak ditulis dan dikembangkan oleh berbagai ahli dengan jurnal-jurnal ilmiahnya, maupun orang awam yang sadar dan tertarik tentang potensi yang tertimbun di daerahnya. Pengertian ini selain diperoleh dari sudut antropologis, kesejarahan, maupun khususnya dalam bidang arsitektur (lingkungan binaan). Kebanyakan pengertian tersebut menjadi sebuah 'definisi' yang mengalami degenerasi atau penyempitan makna, karena tidak satu-dua yang langsung mencontoh referensinya tanpa ada contoh dari image realita kehidupan.

Pada definisi sebelumnya, dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia John M Echols dan Hassan Shadily, kearifan lokal diderivasi dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan; dan lokal (*local*) atau setempat. Jadi menurut beliau, gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Gobyah dalam Nugraha (2012:112) nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Geriya dalam Nugraha (2012:112) juga menjelaskan hal yang sama, pengertiannya secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Menurut Antariksa (dalam Nugraha,2012), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Dari penjelasan beliau dapat dilihat bahwa kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. (Pangarsa, 2008:84). Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami

bakat dan potensi alam tempatnya hidup dan diwujudkan sebagai tradisi.

Membaca Fenomena Nyata

Kearifan lokal juga tergantung dari setiap individu untuk memaknainya, oleh karena itu tercipta beragam arti. Tidak ada kata pasti untuk menjelaskannya karena akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga lebih cocok disebut konsepsi; bukan definisi. Perubahan tersebut sejalan dengan budaya manusia yang selalu berkembang. Dalam proses pemahamannya, perlu kembali kepada kehidupan sehari-hari, yaitu membaca fenomena nyata dengan pengalaman ruang. Sebatas yang diketahui, karena kearifan lokal sebagai unsur dari tradisi budaya masyarakat, umumnya para ahli meletakkan tradisi sebagai katalisator untuk proses generalisasi arti.

Nusantara yang tercipta dari beragam budaya memiliki kesamaan dalam ranah nilai tradisi. Tradisi merupakan nilai-nilai adat yang sudah mengakar dan diterima oleh masyarakat. Pada permukiman tradisional terdapat sesuatu yang diagungkan yang mana menjadikan agama dan kepercayaan sebagai sentral. Dari segi ini, manusia mencoba memberi identitasnya melalui simbol tertentu pada hunian yang mana sebagai karakter kesetempatan. Contohnya di madura dengan tatanan permukiman Tanean Lanjeng dalam membagi zona sakral dan profan. Hunian berawal dari adanya masjid atau surau di sebelah barat dan diikuti rumah awal pada bagian utara dan dapur pada bagian selatan. Hunian tumbuh menyamping dengan didirikannya rumah secara linear sejalan dengan jumlah penduduk. Pada bagian tengah sebagai lapangan memanjang (tanean) sebagai zona sosial. Di tempat lain di dusun Sade, Lombok juga terdapat zonifikasi berdasarkan tingkat kesakralan. Permukiman di Sade tersusun berdasarkan hierarki yang mengarah pada Gunung Rinjani, semakin tinggi posisinya, maka semakin tinggi peranan orang tersebut. Orang Sade juga mengkhususkan wanita dengan menempatkan ruang tertentu dalam *bale*. Sedangkan, lelaki hanya diberikan ruang publik di ruang luar ataupun *berugak* (fungsi seperti gazebo untuk kebutuhan sosial). Ternyata dari beberapa daerah tersebut terdapat kesamaan ciri dan disebut sebagai kesetempatan dalam universalitas. Masyarakat tradisional merasa bahwa dia merupakan bagian dari alam dan merasa memilikinya. Tidak ada bedanya antara tinggal di alam maupun dalam rumah. Ini adalah

wujud penghargaan kehidupan manusia terhadap alam. Namun, kondisi berbeda ketika berada pada iklim subtropis atau iklim ekstrim lainnya. Mereka hidup untuk bertahan dari pengaruh iklim. Hal tersebut mempengaruhi terhadap sikap sosial. Ciri yang tampak adalah masyarakat tropis hidup 'lebih santai' karena iklim lebih bersahabat. Lain halnya seperti Jepang, negara subtropis yang terkenal pekerja keras. Dari penjelasan ini diketahui dalam aspek tradisionalistik memperhatikan tanda-tanda yang menjunjung potensi alam setempat dan mempengaruhi sikap manusia di dalamnya.

Ada contoh lain berupa *tacit knowledge* yang berarti aturan ini sebagai pengetahuan tidak tertulis tetapi dijunjung tinggi. Proses memahami alam akan berhasil apabila terjadi resonansi antara masyarakat manusia dan alam. Sebagai contoh dalam permukiman Madura (tanean lanjang) dan permukiman Sade terdapat batas permukiman berupa bambu atau alang-alang. Bahan yang banyak ditemukan ini juga dipakai sebagai bahan rumah mereka seperti atap di Sade menggunakan alang-alang. Contoh lain adalah petani ataupun nelayan tradisional, mereka tahu kapankah dimulai suatu pekerjaan melalui tanda-tanda alam seperti munculnya rasi bintang, hujan, arah angin, dan sebagainya. Tradisi Jawa juga mengajarkan hal yang baik seperti primbon daur hidup (kelahiran, pernikahan, kematian) selain itu juga arah hadap dan prosesi upacara membangun rumah. Manusia yang merasa modern cukup mengutamakan pemikiran logis dan mengesampingkan detail tradisi, padahal memberikan tuntunan hidup. Pengetahuan seperti ini tidak pernah ada di kalangan akademisi karena langsung dari alam, berkaitan dengan metafisik dan fenomenologi; yang berarti upaya penggalian lapis demi lapis agar diketahui makna yang terkandung. Nilai *tacit knowledge* ini memberikan pesan bahwa adanya timbal balik terhadap detail tradisi dan alam untuk kehidupan manusia yang lebih baik.

Dalam perspektif yang sedikit berbeda, adalah ketika muncul bangunan kolonial di bumi nusantara. Daendels (± 1800 an), dengan diterapkannya langgam Empire Stijl dari Perancis yang diadaptasikan di daerah Hindia-Belanda maka tercipta langgam Indische Empire Stijl yang kurang menghargai alam, ditunjukkan dengan adanya luas lahan yang diperlukan untuk membuat sebuah rumah, tanpa teritisasi, penggunaan kolom yang besar (doric, ionic, dan

corintian), lantai satu yang masuk ke dalam tanah menyebabkan kelembaban tinggi. (Handinoto dalam Gazalba, 1963). Nilai individualitas tersebut kontras terhadap proses pemahaman terhadap alam justru mengubah cara pandang orang pribumi dan campuran terhadap nilai dari luar, dengan menganggapnya sebagai karya yang agung sebagai wujud kebesaran kekuasaan kolonial, dan langgam tersebut dijadikan sebagai acuan langgam sampai seratus tahun ke depan, bahkan sampai merasuki rumah rakyat. Indische Empire Stijl merupakan salah satu langgam awal sebelum bertransformasi menjadi langgam yang lain seperti NA, Romantiek, Voor dan 1915an (Veerhar, 1989). Oleh beberapa ahli dalam arsitektur, karya arsitektur kolonial tetap sebagai wujud local wisdom, salah satu faktornya adalah akulturasi budaya sehingga bangunan tersebut tidak ada di Belanda ataupun Indonesia asli. Keunikan kulturalnya memberikan nilai bahwa tidak ada di tempat lain dan mewakili masa tertentu dari sisi diakronik. Adapun nilai yang dipetik dari perspektif ini adalah kegagalan sekaligus menumbuhkan kreatifitas baru dalam menghargai alam dan arsitektur.

Kontribusi dalam bidang arsitektur dalam metode visual skill atau imaging (melihat-bacakan dari fenomena nyata) ini adalah mampu membangun budaya arsitektur di tanah air supaya lebih peduli dan adil terhadap masyarakat manusia dan alam. Konsepsi sementara kearifan lokal adalah proses menemukan potensi dan sifat-sifat alam untuk keberlanjutan tradisi manusia khususnya dalam berarsitektur. Melalui dengan pendekatan antropologis, 'membaca fenomena'lah sebagai alat pengungkap kearifan lokal.

Kearifan Lokal Masa Kini

Konsepsi makna kearifan lokal tersebut merupakan kondisi ideal untuk harapan kehidupan yang lebih baik. Namun dari perspektif lain, ada yang sedikit mengaburkannya. Dalam kehidupan saat ini, manusia telah merasa bahwa dirinya modern sehingga kebanyakan menganggap tradisi adalah primitif dan tidak perlu dipakai. Akibatnya terdapat rantai yang terputus antara alam – tradisi – artefak fisik. Kearifan lokal mengalami distorsi makna.

Perubahan tersebut diperparah jika seseorang menggunakan pendekatan ekonomi (materi) yang umumnya berpikir cepat dan

hubungannya dengan fisik. Kasusnya seperti seseorang mendirikan rumah, maka dia akan merancang sesuai dengan kebutuhan (fungsional dan efektif) dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil maksimal termasuk kepuasan terhadap gaya saat ini. Terkadang pula tidak menyediakan fungsi sosial terhadap tetangga. Hal ini benar-benar mengebiri nilai kosmologis dari tradisi, dan menghilangkan identitas setempat.

Ada hal yang menarik yang dapat diambil tentang upaya seorang arsitek memaknai kembali kearifan lokal dengan menerapkan pada kehidupan modern. Dalam proses perancangan tidak harus mengambil tipologi bentukan lama (tradisional), tetapi mengambil esensi ruang atau detail tradisi yang lain, seperti kebiasaan tertentu. Ada baiknya seseorang tetap mempertahankan perletakan ruang, misalkan rumah Jawa, yang pada bagian depan mewadahi fungsi sosial, pada bagian belakangnya lebih privat dan seterusnya. Gaya boleh mutakhir sesuai selera tetapi tidak menghilangkan identitasnya yaitu masih menerapkan material lokal dan menghargai alam. Kayu yang sekarang sudah semakin terbatas jumlahnya dapat diganti dengan bambu yang mudah dicari dan mudah tumbuhnya selain itu dapat menggunakan material lawasan seperti karya-karya Eko Prawoto.

Wujud Pesona Indonesia

Kearifan lokal dalam konteks nasionalisasi bangsa Indonesia tentu tidak terlepas dengan kaitannya pada bagian dari perwujudan pesona Indonesia. Kearifan lokal tentu menjadi salah satu upaya dan karakteristik yang sangat penting dalam bentuk pesona Indonesia. Pesona Indonesia adalah hal-hal yang berhubungan dengan identitas bangsa Indonesia, baik itu kaitannya dengan aspek pariwisata, aspek kebudayaan, bahkan aspek arsitektur. Dengan demikian, arsitektur lokal pun menjadi salah satu bagian dalam penerapan pesona Indonesia, baik dalam arsitektur lokal dalam pembangunan rumah ibadah, rumah adat, rumah makan, bangunan perkantoran, perumahan, dan bentuk-bentuk lainnya yang mengandalkan arsitektur lokal sebagai wujud realisasinya di tengah masyarakat.

PENUTUP

Kearifan lokal dalam pengertian sebelumnya selalu mengalami penyempurnaan, karena

bagian dari sebuah tradisi budaya maka bersifat dinamis, oleh karena itu setiap individu dapat memaknai kembali. Kearifan lokal merupakan sebuah proses menemu-kenali potensi dan sifat-sifat alam untuk keberlanjutan tradisi manusia khususnya dalam berarsitektur. Dari konsepsi itu dapat diketahui adanya hubungan timbal balik antara alam-manusia-tradisi. Dalam peranan kehidupan modern, tradisi dianggap primitif sehingga menyebabkan distorsi makna kearifan lokal. Maka dibutuhkan seseorang yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dan penghargaan terhadap alam. Seseorang yang kebetulan arsitek, harus mampu melancarkan politik budaya agar tidak kehilangan identitas setempat (Wareing dan Linda, 2007). Arsitektur lokal pun harus mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pesona Indonesia dalam berbagai bentuk dan konsep yang ada di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriany, Yunita (2015) *EYD dan Kaidah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Gazalda, Sibi (1963) *Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Nugraha, Adhi (201) *Transforming Tradition: A Method for Maintaining Tradition in a Craft and Design Context*. Helsinki: Aalto University publication series, doctoral dissertations.
- Pangarsa, Galih Widjil (2008) *Arsitektur untuk Kemanusiaan*. Surabaya: PT. Wastu Lanas Grafika.
- Veerhar, J.W.M. (1989) *Identitas Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wareing, Shan dan Linda Thomas (2007) *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PRINSIP-PRINSIP REGIONALISME KRITIS KENNETH FRAMPTON DAN KESAMAANNYA DENGAN PEMIKIRAN SERTA KARYA MANGUNWIJAYA

Imaniar Sofia A¹, Arsyil Zahra², Fajar Ikhwan Harnomo³
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung

ABSTRAK

Modernisme membawa pengaruh luas bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya dalam bidang arsitektur. Namun pemikiran modernisme yang serba rasional justru memiliki titik lemah yang sangat krusial. Kritik terhadap modernisme juga banyak dilakukan, salah satunya disampaikan melalui Regionalisme Kritis oleh Kenneth Frampton. Di Indonesia, kritik terhadap modernisme juga disuarakan oleh Mangunwijaya. Dalam makalah ini akan dijelaskan apakah pemikiran Mangunwijaya sejalan dengan prinsip-prinsip Regionalisme Kritis Kenneth Frampton. Metode yang digunakan adalah membandingkan latar belakang Kenneth Frampton dalam merumuskan Regionalisme Kritis dan Mangunwijaya dalam mengembangkan pemikiran dan karya arsitekturnya. Selanjutnya, diidentifikasi prinsip-prinsip Regionalisme Kritis Kenneth Frampton yang terkandung dalam karya Mangunwijaya, sehingga dapat dicermati kesamaan prinsip antara Kenneth Frampton dengan Mangunwijaya. Kesimpulan yang didapat adalah kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan visi sehingga terdapat beberapa kesamaan prinsip Regionalisme Kritis Kenneth Frampton dengan pemikiran Mangunwijaya. Kemudian ditemukan bahwa terdapat beberapa prinsip Regionalisme Kritis Kenneth Frampton yang terkandung pada karya arsitektur Mangunwijaya.

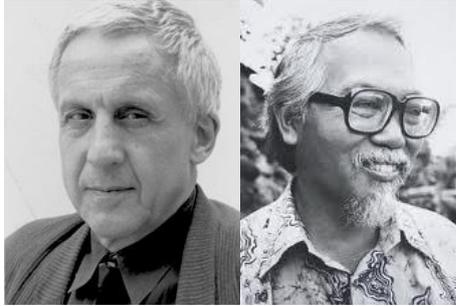
Kata Kunci: Kenneth Frampton, Mangunwijaya, Regionalisme Kritis.

PENDAHULUAN

Modernisasi telah merusak nilai-nilai budaya akibat kebutuhan manusia untuk melakukan kemajuan peradaban dengan meninggalkan kebudayaan yang dirasa menghambat kemajuan tersebut. Dalam dunia arsitektur akibat negatif dari semangat modernisme tersebut telah disadari oleh para cendekiawan dan kaum profesional. Kerinduan akan budaya masa lalu menjadi kiblat baru dan mengkritik keinginan untuk menjadi modern. Dalam prakteknya, seringkali perwujudan kembali budaya pada masa lalu hanya sebatas ikon dalam bentuk arsitektur. Sehingga nilai yang dihasilkan pada karya tersebut menjadi dangkal, dan jauh berbeda dengan karya kebudayaan masa lalu. Regionalisme kritis sebagai sebuah faham yang menawarkan solusi dari kekacauan tersebut, yakni dengan megawinkan semangat modernisme dengan tetap menghadirkan kebudayaan yang bernilai sesuai dengan asalnya. Tokoh pemikir dari faham tersebut salah satunya ialah Kenneth

Frampton, yang menyuarakan pemikirannya di tahun 1983, akan menjadi fokus dalam tulisan ini..

Indonesia sebagai negara berkembang yang terkena demam modernisme, juga melakukan perlawanan kritis oleh cendekiawan lokal dengan menghasilkan karya arsitektur yang mengakar pada budaya regional. Salah satu arsitek yang merupakan tokoh cendekiawan tersebut ialah Mangunwijaya. Mangunwijaya telah berkarya sejak tahun 1966 dan telah memulai mendemonstrasikan pemikiran kritis dalam karya arsitektur miliknya. Pada tahun 1988, Ia telah melahirkan karya tulis berupa rangkuman pemikirannya yang kritis tentang jati diri arsitektur sesungguhnya berupa buku dengan judul *Wastu Citra*. Tahun tersebut berdekatan dengan kelahiran faham regionalisme kritis oleh Kenneth Frampton (Gambar 1).



Gambar 1. Kenneth Frampton dan Mangunwijaya
Sumber: <http://www.iitaly.org/node/8171> dan <https://thomzbryant.wordpress.com/2013/11/14>

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui apakah pemikiran Mangunwijaya sejalan dengan paham regionalisme kritis versi Kenneth Frampton. Dan sejauh mana unsur regionalisme kritis ditemui dalam karya Mangunwijaya. Prinsip Regionalisme Kritis akan dilihat dalam essay berjudul *Prospect for A Critical Regionalism* yang tersusun dalam buku *Modern Architecture* edisi pertama (1983) dan edisi keempat (2007) karya Kenneth Frampton. Kemudian *Wastu Citra* edisi pertama (1988) akan diuraikan untuk mengetahui prinsip-prinsip pemikiran Mangunwijaya yang telah terangkum untuk melihat ada tidaknya kemiripan pemikiran kedua tokoh tadi.

REGIONALISME KRITIS MENURUT KENNETH FRAMPTON

Biografi Kenneth Frampton

Kenneth Frampton adalah seorang teoretician Arsitektur berkebangsaan Inggris. Ia lahir di Inggris pada tahun 1930 dan masuk ke Sekolah Seni dan Asosiasi Sekolah Arsitektur di Guildford, London. Setelah berlatih selama beberapa tahun di Inggris kemudian ia bekerja di Israel, dengan *Middlesex County Council and Douglas Stephen and Partners* (1961-1966), selama kurun waktu tersebut ia juga menjadi pengajar di *Royal College of Art* (1961-1964), *Accademia di Architettura di Mendrisio* (1961-1963), selain itu juga pernah mengajar di lembaga terkemuka lainnya seperti ETH Zurich, EPFL Lausanne, dan *Berlage Institute* di Belanda. Ia pernah pula menjadi menjadi editor majalah jurnal *Architecture Design (AD)* (1962-1965).

Biografinya sebagai tokoh di bidang akademis tidak banyak ditemukan dalam literatur. Namun kiprahnya dapat dilihat dari hasil karyanya berupa buku. Dia adalah penulis

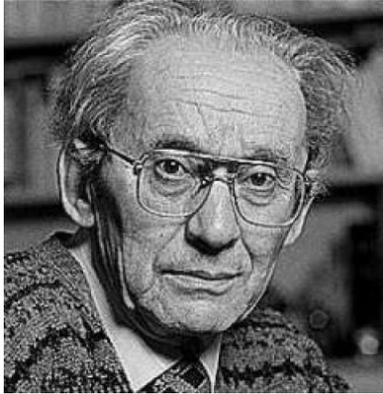
sejumlah teori arsitektur antara lain *Modern Architecture: A Critical History* (1980; revisi 1985, 1992 and 2007), *Studies in Tectonic Culture* (1995), *American Masterwork* (1995), *Le Corbusier* (2001), *Labour, Work and Architecture* (2005). Frampton mencapai keunggulan besar (dan pengaruh) dalam pendidikan arsitektur dengan esainya "*Towards a Critical Regionalism*" (1983), dimana istilah regionalisme kritis tersebut telah diciptakan oleh Alexander Tzonis dan Liane Lefaivre. Pada tahun 2006, ia menulis pengantar untuk buku tentang arsitek Flemish Georges Baines. Saat ini ia menjadi Profesor Arsitektur di Graduate School of Architectur, Planning and Preservation, Columbia University, New York.

Motif yang Melandasi Pemikiran Regionalisme Kritis

Berdasarkan essay berjudul "*Universal Civilization and National Culture*" di tahun 1961, Paul Ricour (Gambar 2) menyadari telah terjadi kehancuran perlahan budaya tradisional sebagai dampak fenomena universalisasi. Niatan untuk mencapai kemajuan umat manusia dengan peradaban dunia yang tunggal, pada saat yang sama menghilangkan nilai budaya, yang disebut sebagai inti kreatif pada peradaban besar dan budaya yang besar. Dimana inti tersebut yang menjadi latar kita dalam upaya menafsirkan hidup, yakni sebagai inti etnis dan mitos peradaban manusia. Bagi Ricour, hal ini merupakan kesalahan yang tak mampu diperbaiki. Imbas yang paling terasa ialah di negara berkembang yang turut serta mengikuti gejala modern, yakni dengan hanya mengkonsumsi kebutuhan dasar.

Terjadilah pertentangan yang umum terjadi di negara berkembang, yaitu di satu sisi ingin mengakarkan pada budaya masa lalu, menyulut semangat nasional, dan membentangkan spiritual dan budaya sebelum hadir kolonialisme. Tetapi di sisi lain ingin turut mengambil bagian dalam peradaban modern, dan pada saat yang sama untuk mengambil bagian dalam ilmiah, teknis, dan politik rasionalitas, sesuatu yang sangat sering memerlukan kemurnian dan kesederhanaan, dengan meninggalkan budaya secara keseluruhan. Ini menuntun pada kenyataan bahwa setiap kebudayaan tidak dapat mempertahankan dan menyerap peradaban modern. Sehingga muncul paradoks: bagaimana menjadi modern dan kembali kepada akar budaya sekaligus; bagaimana untuk

menghidupkan kembali yang telah usang, dan tetap mengambil bagian dalam yang peradaban universal sehingga tercipta kultur dunia.



Gambar 2. Paul Ricoeur

Sumber: pronounceitright.com/pronounce/4210/paul-ricoeur

Ricoeur mengungkapkan tesis untuk menyasiasi kegamangan yang terjadi saat itu. Dalam Frampton (1980) ia menjelaskan bahwa hibrida kultur dunia hanya dapat diwujudkan dengan perkawinan silang antara kebudayaan yang mengakar dengan peradaban universal. Ia menambahkan budaya dunia tercipta dari budaya daerah, karena adanya transformasi dari basis akar budaya. Frampton (2007) menafsirkan pemikiran Ricour lebih lanjut bahwa perkawinan silang tidak hanya pada budaya kuno dengan modern, tetapi juga terjadi antar budaya yang satu dengan yang lain. Kultur regional bukan suatu yang spontan terjadi atau ada secara abadi, tetapi merupakan sesuatu yang secara sadar dibudidayakan. Ricour menyarankan untuk mempertahankan kultur otentik dengan bergantung kepada kapasitas kaum cendekia untuk menggerakkan bentuk vital dari kultur regional ketika terjadi pengaruh kultur asing maupun peradaban asing.

Berawal dari sini, kemudian pemikiran Frampton mengenai regionalisme kritis berkembang. Regionalisme kritis tidaklah semata-mata merupakan sentimen vernakular yang terjadi spontan, melainkan melewati pemikiran kritis manusia. Salah satunya dapat berupa perkawinan silang antara budaya kuno dan baru, serta antar budaya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Frampton menegaskan nostalgia vernakular disusun sebagai pengembalian kepada budaya untuk etos budaya

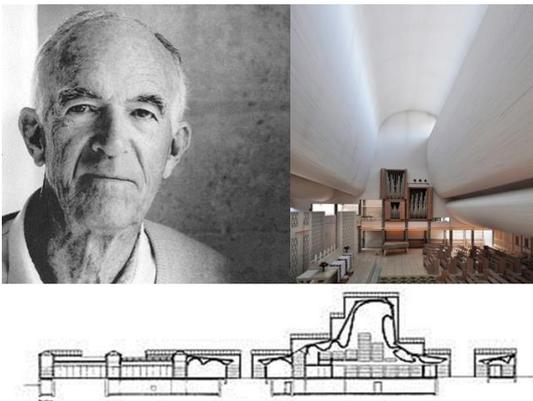
populer dengan kecenderungan demagogi dari kaum Populis. Tujuan utama dari Populisme adalah membuat tanda komunikatif atau instrumental, bukan berusaha untuk membangkitkan persepsi kritis tentang realitas, melainkan berusaha melakukan sublimasi dengan teknik retorik dan citra dari iklan. Taktik ini digunakan sebagai suatu tanda atau instrumen, agar dapat seekonomis mungkin terbentuk pencapaian pembangkitan kebudayaan lama, yang justru secara tidak sengaja membuat penafsiran yang salah mengenai kebudayaan tersebut.

Sementara di sisi lain, regionalisme kritis adalah suatu ekspresi dialektis yang secara sadar berusaha untuk mendekonstruksi modernisme yang universal kedalam nilai-nilai dan citra yang secara lokal dibudidayakan. Dan pada saat yang sama memalsukan unsur-unsur asli dengan paradigma yang diambil dari sumber-sumber asing. Adolf Loos dalam Frampton (1980) mengatakan Regionalisme Kritis mengakui bahwa tidak ada tradisi yang hidup dengan tetap tersedia untuk manusia modern yang bersifat progresif, kecuali melalui prosedur sintesis. Tetapi harus berhati-hati bahwa usaha untuk menghadirkan dialektika proses kreatif ini jika melalui prosedur eklektik historisisme, yakni pencampuran beberapa budaya, hanya bisa menghasilkan ikonografi konsumtif yang menyamar sebagai budaya.

Implementasi Pemikiran Regionalisme Kritis terhadap Karya Arsitektur

Proses asimilasi dan reinterprestasi terlihat dalam karya Jørn Utzon pada bangunan Bagsværd Church (gambar 3), yang terletak di Copenhagen, menggunakan bahan beton membentuk kombinasi bentang panjang. Modular prefab menginterprestasikan nilai universal peradaban tetapi juga menghadirkan kembali penerapan norma di mana bentuk tersebut dibuat sesuai dengan tapak yang unik. Lebih lanjut, keunikan bentuk kubah tersebut sebagai latar penceritaan normatif sebuah rasionalisasi teknik yang berpadu dengan ketidakrasionalkan struktur simbolik. Meskipun secara ekonomi modular beton jauh dari optimasi biaya dibandingkan dengan baja, kubah pada Gereja tersebut sengaja ditujukan untuk merepresentasikan nuansa ketimuran lentur (material kayu) menggunakan teknologi barat (Gambar 3).

Upaya pengawinan kedua aspek tersebut tidak dilakukan dengan serampangan. Melainkan diawali dengan tahap pertama merevitalisasi degradasi bentuk-bentuk barat menggunakan profil bentuk nuansa ketimuran (oriental) dengan cara menyusun kembali unsur-unsur alamiahnya. Kemudian setelah ide bentuk baru dari sintesa tersebut muncul, dilakukan pencarian indikasi sifat sekularisasi dari institusi yang mampu merepresentasikan bentuk tadi. Gereja dipilih oleh Utzon pada saat itu sebab di masa sekular tersebut, gereja sebagai tempat ibadah, sering dirancang dengan gaya eklektik tradisional yang kemudian menjadi ikonografi yang mengarah pada degenerasi pada kedangkalan nilai.



Gambar 3. Jørn Utzon (Kiri Atas), Interior Bagsværd Church (Kanan Atas), dan Gambar Potongan Bagsværd Church (Bawah)
 Sumber: <http://www.archdaily.com/160390/ad-classics-bagsvaerd-church-jorn-utzon/>

Revitalisasi elemen barat dengan profil oriental maupun sebaliknya, tidak bermaksud untuk menggambarkan situasi yang terjadi di lokasi terkait. Utzon membuat bentuk gereja menyerupai kandang merupakan hasil metafora nuansa agrikultur untuk membuat ekspresi keruangan publik kedalam sebuah institusi yang dianggap sakral. Upaya asosiasi agama dengan kultur agraris dapat mengubah pandangan tertentu sebuah tempat ibadah seiring berjalannya waktu.

Aspek-aspek pada Regionalisme Kritis

Regionalisme kritis bukanlah tergabung dalam lingkup gaya atau langgam dalam kategori kritis, melainkan sebuah pemikiran yang berorientasi terhadap pandangan untuk masa depan arsitektur. Berikut ini ciri-ciri atau

lebih dipahami dengan sikap-sikap yang melambangkan pola pikir regionalisme kritis menurut Keneth Frampton:

1. Regionalisme kritis lebih mengendepankan praktek arsitektur dengan lingkup yang kecil ketimbang lingkup perencanaan yang besar. Mengandalkan bantuan para tukang untuk menangani bentuk-bentuk detail.
2. Pandangan regionalisme kritis merupakan sebuah kumpulan dari pemahaman akan batasan fisik untuk membentuk arsitektur sebuah bangunan dengan makna 'place-form' ketimbang berdiri sendiri tanpa memperhatikan lingkungan (constrain) yang ada.
3. Aspek tektonika yang terdiri dari material, ketukangan, dan gravitasi lebih diutamakan ketimbang sekuensi kualitas ruang (scenography).
4. Berlaku secara lokal dan spesifik terhadap tempat tertentu. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam merespon kondisi setempat, seperti topografi, cahaya dan iklim.
5. Menekankan pada aspek taktil, seperti macam-macam tingkatan intensitas cahaya, sensasi suasana dari rasa hangat atau dingin, kelembapan, aroma dan suara-suara yang berasal dari perbedaan material dan dimensi/volume-nya.
6. Aspek vernakular diinterpretasikan sebagai aspek terpisah dari keseluruhan, melebur dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas.
7. Sebagai jawaban dari upaya mengisi celah-celah (gap) antara budaya yang ada menuju peradaban manusia yang menyeluruh.

Y. B. MANGUNWIJAYA

Biografi Singkat Mangunwijaya

Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau yang lebih dikenal dengan Romo Mangunwijaya, lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 1929. Ia dikenal sebagai rohaniawan, penulis, aktivis dan sekaligus seorang arsitek yang banyak menaruh perhatian dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Mangunwijaya memulai pendidikan dasarnya di HIS Fransiscus Xaverius, Muntilan, Magelang dari tahun 1936 hingga tahun 1943. Pada tahun 1951, Beliau menempuh pendidikan seminari menengah di Kotabaru, Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya (pindah) ke

seminari menengah di Mertoyudhan, Magelang hingga 1953.

Seiring dengan perjalanan pendidikannya, Mangunwijaya menaruh perhatian dan ketertarikan terhadap sejarah dan filsafat dunia, sehingga hal tersebut menjadi alasan ia melanjutkan pendidikannya ke Institut Filsafat dan Teologi Santo Paulus di Kotabaru. Di sinilah awal mula ia bertemu dengan Mgr. Soegijapranata, SJ., seorang Uskup yang banyak memberikan masukan berarti bagi pemikiran Mangunwijaya ke depannya. Pada saat itu, Uskup Soegijapranata berpendapat bahwa bangunan keagamaan katolik di Indonesia masih terpengaruh oleh gaya arsitektur Eropa sehingga sulit untuk dapat masuk dan diterima di kalangan masyarakat. Sang Uskup mempunyai pandangan bahwa bangunan-bangunan keagamaan (khususnya Gereja) perlu memiliki identitas terkait bentuk lokalitas dari Indonesia. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menginspirasi Mangunwijaya untuk belajar arsitektur.

Mangunwijaya melanjutkan pendidikan Arsitektur di Rheinisch Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman pada 1960, yang diselesaikannya pada tahun 1966. Sejak saat itu, sepulang dari pendidikannya di Aachen, Mangunwijaya mulai membuat karya-karya arsitektur dan sebagian besar diantaranya dikategorikan sebagai karya arsitektur yang fenomenal di Indonesia hingga Internasional.

Pandangan dan Kritik Mangunwijaya terhadap Modernisme

Mangunwijaya dalam Wastu Citra (1988) mendudukan persoalan modernisme Barat sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan kaitan keadaan yang terjadi pada tiap-tiap fase zaman yang berjalan. Arsitektur Barat, saat Perang Dunia I masih berpedoman kepada eklektisisme dengan pandangan yang serba campur-baur. Namun ketekunan orang-orang Barat mengolah dunia ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu menjadikan bentuk arsitektur mereka berjalan ke arah citra rasionalisme, dimana bentuk-bentuk arsitekturnya bersifat murni sekaligus abstrak dalam hukum-hukum rasio yang jelas.

Abad ke-20 adalah sebuah fase dimana arsitektur Barat bergulir dalam ranah modernisme. Persepsi terhadap karya arsitektur

dan karya-karya seni lainnya lambat laun mulai disajikan dalam konsep dan bentuk-bentuk yang jujur. Kejujuran bentuk yang terbentuk terlahir dalam proses untuk mengekspresikan watak-watak yang terbuka dalam mengaplikasikan kemajuan teknologi industri di dalam karya-karya arsitektur khususnya. Sistem produksi massal yang secara cepat dapat dilakukan semakin mendesak manusia untuk berpikir secara kapitalis.

Namun, dalam rentetan waktu yang berjalan dan kehidupan manusia yang terus berkembang, keberhasilan modernisme sebagai bentuk dari bahasa kerasionalan justru menghantarkan dunia Barat jauh dari apa yang sebetulnya mereka cari. "Keagungan Universal" yang dinyatakan justru menjadi sebuah paradigma lama yang ingin dilepaskan. Arsitektur dengan langgam *International Style* tidak lagi menjadi sesuatu yang diagungkan lagi karena bersifat massal/kodian (Mangunwijaya, 1988). Dampak lanjutan dari hal tersebut menggiring warisan-warisan kebudayaan lama untuk kembali dicari dan dilindungi.

Dalam pandangan Mangunwijaya, fenomena terdegradasinya keagungan modernisme merupakan satu bagian yang bersamaan dengan pencarian kembali akan makna sebuah identitas dari arsitektur itu sendiri. Hal tersebut seakan-akan menjadi sebuah penempatan kembali aspek-aspek emosional dan irasional, seperti dalam zaman Barok Rokoko. Sehingga pada tahun 70-an hingga 80-an pemikiran terhadap perkembangan arsitektur barat terdorong untuk lepas dari keterikatan kedisiplinan yang telah melekat dari masa modernisme.

Cara Pandang Arsitektur menurut Mangunwijaya

Sejalan dengan kritiknya terhadap modernisme, maka pemahaman arsitektur menurut Mangunwijaya adalah seperti satu kesatuan dari dualisme unsur berbeda namun saling saling berkaitan. Perhatian terhadap konsep berpikir yang berkaitan dengan keseimbangan haruslah menjadi cara untuk berarsitektur (wastu) (Mangunwijaya, 1988). Konsep berpikir dan perencanaan wastu dapat dipahami sebagai keseimbangan antara hal yang memecah dan mempersatukan, hal yang bersifat kontras maupun yang sejalan. Artinya, ketegangan dialektik dari unsur-unsur yang ada

yang seolah-olah saling berlawanan/kontradiktif justru merupakan hal yang saling melengkapi untuk mencapai suatu sintesa yang lebih tinggi lagi. Perlu adanya perhatian khusus terhadap keseimbangan dari konsep berarsitektur. Dalam hal ini Mangunwijaya mengibaratkan bahwa aspek-aspek yang hadir dalam bangunan janganlah bercampur aduk satu dengan yang lainnya tanpa hubungan. Keberadaan lingkungan serta situasi dari tempat harus dimanfaatkan dan diikutsertakan (diintegrasikan) sebagai sebuah sistem hubungan.

Pada buku Pengantar Fisika Bangunan Y.B Mangunwijaya menjelaskan mengenai kaitan antara guna sebagai efisiensi kegunaan dan peradaban konstruksi suatu bangunan serta citra sebagai gambaran dari keselarasan yang diciptakan oleh bangunan yang hadir tepat terhadap konteks budayanya. Sedangkan dalam buku *wastu citra* Mangunwijaya lebih menjelaskan bagaimana Ia berarsitektur dalam hal yang lebih dalam, lebih berhubungan dengan mental kejiwaan, dan kebudayaan manusia. Dalam buku tersebut Ia menjelaskan beberapa aspek penting mengenai prinsip arsitektur, antara lain sebagai berikut:

1. Arsitektur Sebagai Bahasa Ungkapan
 Dalam *Wastu Citra* (Mangunwijaya, 1988), Mangunwijaya mengungkapkan manusia tidak hanya berbahasa secara lisan, lambaian tangan, kerlingan mata dan sebagainya juga merupakan sebuah bahasa ungkapan. Manusia bersatu secara alam dan bersatu secara hukum dengan seluruh fisik di sekelilingnya. Ada proses lain yang menuntun, memberikan arah dan menjiwai gerak-gerak fisik manusia, sehingga manusia akan selalu memiliki hakikat. Bagi Mangunwijaya, arti dan makna dari pengertian "ruang yang ekspresif" adalah perjumpaan manusia dengan penghayatan arsitektural, penghayatan ruang, beserta pembatas dan pelengkap ruang-ruang yang ada, yakni gatra-gatra atau volume-volume. Artinya ruang juga dapat dikatakan bermakna spiritual. Hakikat bahasa arsitektur yang bagus dan cita-cita penghayatannya tidak harus selalu dihubungkan dengan kemewahan, biaya yang mahal dan sebagainya. Arsitektur yang baik juga tidak harus mengikuti mode yang mutakhir, gaya sedang laku dan sebagainya.
2. Arsitektur sebagai Guna dan Citra
 Mangunwijaya berpendapat bahwa walaupun bangunan dikategorikan sebagai benda mati, tidak berarti bangunan tidak berjiwa. Sehingga dalam membangun ada dua lingkungan yang menjadi pertimbangan, yakni lingkungan yang berkaitan dengan guna dan lingkungan yang berkaitan dengan citra. Guna tidak hanya berarti bermanfaat ataupun materiil belaka, tetapi mempunyai daya yang menyebabkan kehidupan lebih meningkat. Selain unsur guna terdapat unsur lainnya, yakni unsur citra. Citra merujuk pada sebuah "gambaran" (*image*), suatu kesan penghayatan memberikan sebuah arti/makna bagi seseorang. 'Citra' berpijak pada tingkat kebudayaan sedangkan 'Guna' lebih berpijak pada segi keterampilan/kemampuan. Perwujudan dari Keindahan yang terpancar dari citra suatu bangunan dapat terlihat dari "kebenaran" yang dipakai dalam struktur yang konstruktif. Bentuk dan fungsi adalah bentuk dari keindahan dan kegunaan yang bersatu dalam satu wujud yang efektif dan ekspresif.
3. Arsitektur Sebagai Simbol Kosmologis
 Keindahan tidak dapat ditafsirkan secara sama. Setiap bangsa dan zaman memiliki tingkat keindahan yang berbeda. Karya Arsitektur tidak dapat diukur dan dinilai hanya dengan norma-norma estetika saja. Pada tahap primer orang berpikir dan bercita rasa dalam alam penghayatan kosmis dan mistis, atau agama bukan dalam estetis. Penafsiran sebuah bangsa terhadap kosmologi memiliki makna yang berbeda-beda. Kosmologi erat dengan agama namun tetap berbeda, tergantung dengan keberadaan kebudayaan pada daerah tersebut. Sehingga bentuk-bentuk keagamaan memiliki wajah yang banyak sesuai dengan agama dan kebudayaan setempat.
4. Arsitektur Sebagai Bentuk Dasar Orientasi Diri
 Menurut Mangunwijaya, dunia ini tidak homogen, tidak semua tempat sama nilainya. Tetapi hirarkis, artinya ada yang paling penting, vital nilainya (pusar), ada yang kurang dan ada yang tidak ada nilainya sama sekali. Suatu wilayah bukan hanya lokasi belaka, melainkan bentuk-

bentuk bangunan, desa kota, namun juga bentuk-bentuk ekonomi, teknik, politik dan kebudayaan dan segala aktivitas. Setelah itu barulah suatu wilayah sebagai suatu lokasi geografis, namun tidak hanya dipahami geografisnya saja, tetapi bentuk (*form*). Proses karya pembangunan merupakan kehadiran penciptaan semesta raya, pewayangan kembali awal mula dunia ketika dijadikan oleh dewata atau tuhan. Sehingga dalam berarsitektur Mangunwijaya mencoba memperlakukan material yang berasal dari alam sesuai dengan saat material tersebut saat masih di alam.

5. **Arsitektur Sebagai Cermin Sikap Hidup**
Dalam berarsitektur tidak hanya selalu terkait dengan hal-hal gaib, mistis atau magis. Namun juga harus cerdas dalam menganalisa realita dan penanganan praktis permasalahan permukiman serta bangunan-bangunan yang telah ada. Arsitektur pada intinya adalah penciptaan suasana.
6. **Arsitektur Sebagai Penghayatan Gatra Dan Ruang**
Dalam penghayatan orang yunani, berarsitektur adalah mengolah *tektoon*, statika bangunan. Karena bahan pokok bangunan bangsa yunani adalah batu alam sehingga sehingga dapat menopang batu alam dengan stabil. Maka konsepsi arsitektur yunani mengolah atau bermain dengan gatra-gatra (*volume-volume*) atau massa-massa materi. Berbeda dengan jepang, arsitektur jepang lebih menjelaskan kesederhanaan, kepolosan, kelurusan, dan ketenangan batin. Sesuai dengan ajaran kepercayaan *Shinto* yang mengajarkan tentang harmoni, tentang keseimbangan, tentang keheningan yang indah. Sehingga dapat dikatakan bahwa arsitektur yunani bekerja dengan gatra-gatra yang bervolume penuh dan berat sedangkan arsitektur jepang adalah arsitektur ruang murni.
Bagi Mangunwijaya penting untuk mempelajari seni gatra dan seni ruang, itulah *wastu* dalam arti utuh dan lengkap. Sebuah ruangan dikatakan ruangan apabila memiliki batas-batasnya. Batasan ruang adalah bidang-bidang. Bidang-bidang batas ruang biasanya diambil dari gatra-gatra yang dinding-dinding luarnya selalu merupakan bidang-bidang. Sehingga

sebuah bangunan memiliki fungsi ganda yakni berfungsi intern sebagai bangunan itu sendiri dan berfungsi ekstern selaku penyumbang bidang pembatas ruang luar atau ruang lain.

7. **Tektonika**
Aspek ketukangan telah dibahas dalam buku tektonika arsitektur oleh para murid Mangunwijaya. Prawoto (2002) mengatakan bahwa lewat aspek tektonika diharapkan memahami guna dan citra sebagai sebuah kesatuan perwujudan arsitektur. Mangunwijaya dipahami sebagai arsitek yang mencermati aspek tektonika dengan serius. Mahatmanto (1999) mengatakan bahwa aspek tektonik adalah salah satu segi terkuat karya Mangunwijaya. Tektonika merupakan turunan kata *tekton* yang berarti tukang kayu atau manusia pembangun. Menurut semper dalam Mahatmanto (2007) tektonika merujuk kepada ketrampilan menyusun atau membuat yang menggunakan bahan ringan sebagai lawan dari penggunaan bahan berat. Bangunan merupakan perwujudan dari proses mengupayakan melawan kecenderungan untuk rebah, yang tidak lepas dari pemilihan bahan untuk dirangkai, sambungan untuk meneruskan gaya-gaya yang terdistribusi baik, serta menghasilkan penampilan alamiah bangunan tersebut. Dengan menyebut arsitektur sebagai bangunan berarti mengembalikan kembali ia kepada aspek materialnya. Menurut Mahatmanto, itulah yang ada pada hasil karya Mangunwijaya.

KARYA ARSITEKTUR MANGUNWIJAYA

Gereja St. Maria Asummpta

Bentuk penerjemahan Mangunwijaya terhadap aspek fisika bangunan yang berkaitan dengan kenyamanan penghuni suatu bangunan, beliau lakukan dengan mengembalikan kepada konteks regional iklim dan budaya melalui penggunaan material lokal. Dengan tektonika yang dirangkai oleh pembuat bangunan yang dilandasi oleh ketepatan guna akan menghasilkan citra yang tepat karena keindahannya.

Menurut Erwinthon P. Napitupulu (2009), Mangunwijaya mengadaptasi dan menerapkan gagasan dan semangat mahakarya Le Corbusier, Ronchamp Chapel, ketika mendesain Gereja St. Maria Assumpta yakni dengan memasukan unsur-unsur budaya jawa seperti pendapa, siti hinggil, soko guru, pringgitan, dll. Walaupun secara keilmuan arsitektur itu dasarnya sama, namun unsur-unsur lokal tetaplah penting. Bangunan gereja karya Mangunwijaya biasanya berdenah bujur sangkar, berbentuk pendopo terbuka tanpa dinding masif yang menghadirkan suasana yang menyatu dengan ruang luar. Sebagian orang memaknai bentuk bangunan Gereja St. Maria Assumpta sebagai "burung yang sedang membentangkan sayap". Sebagian lagi juga melihat simbol-simbol kehidupan pada relief dinding luarnya. Didalamnya sangat banyak komponen bangunan dengan berbagai makna.

Dalam Interior dinding gereja ini terdapat lubang-lubang atau bukaan-bukaan cahaya pada dinding Timur dan Barat yang berfungsi memasukan cahaya ke dalam ruangan (Gambar 5). Cahaya yang menembus, diinterpretasikan sebagai lambang rahmat Tuhan yang menembus kefanatan hidup manusia. Hal serupa juga terdapat pada gereja ziarah Ronchamp dengan bentuk-bentuk lubang geometrik dan celah-celah untuk memberi jalan masuk bagi cahaya matahari, seperti yang Mangunwijaya ungkapkan (Wastu Citra, 1988: 87) Gereja Ronchamp memunculkan citra sang rahim, yakni citra cahaya ilahi yang "menembus dinding rahim". Terang yang datang dalam kegelapan (Gambar 4).



Gambar 4. Gereja Ziarah Ronchamp

Sumber:

greatbuildings.com/gbc/images/cid_1213222148_Ronchamp24.jpg



Gambar 5. Interior Gereja St. Maria Assumpta

Sumber:

http://fc08.deviantart.net/fs41/f/2009/042/6/c/assumpta_by_lesaux.jpg

Penziarahan Sendangsono

Dalam karya Mangunwijaya, Ziarah Sendangsono, terdapat unsur penguatan spirit of place dan karakter tempat yang menjadi pesan tersirat dalam karyanya. Menurut Sutrisno (2007) lingkungan Ziarah Sendangsono merupakan lokasi mata air bersejarah tempat dipemandikannya generasi awal sejarah Katolik Kali Bawang dan Muntilan ketika Van Lith sedang menanamkan cikal-bakalnya. Sehingga aspek kesejarahanlah yang menjadi awal mula pertimbangan Mangunwijaya mengidentifikasi *spirit of place* dari lokasi Sendangsono. Sutrisno menambahkan bahwa terdapat pencitraan pada mata air Sendangsono dari sepenggal kisah yang terdapat dalam kitab suci Injil. Jembatan yang terdapat di atas mata air tersebut merupakan simbolisasi dari Maria, ibu Yesus, sebagai perantara pada peristiwa Kana ketika dimintai tolong oleh orang-orang yang membutuhkan agar air berubah menjadi anggur. Sehingga, pada jembatan yang berada di mata air tersebut membuat pengunjung bisa melewatinya agar sampai ke mata air segar.

Biara Trapistin

Biara Trapistin di Gedono, Salatiga, merupakan karya lain Mangunwijaya dalam menerapkan pengaruh lokasi dan penciptaan kesan dengan tujuan khusus terhadap gubahan arsitektur. Arifin (1999) menjelaskan bahwa pada Biara Tripistin Mangunwijaya sengaja untuk membuat bangunan yang tertutup dengan dinding batu kali yang menghasilkan hawa dingin karena letak biara tersebut di daerah pegunungan (Gambar 6). Maksud dari organisasi tersebut ialah agar tercipta suasana tenang dengan hawa dingin sehingga para suster dapat mendekatkan diri pada Tuhan dan

semakin menghayati pengorbanan mereka sebagai pelayan Tuhan.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa Mangunwijaya menafsirkan arsitektur sebagai rekayasa lingkungan terbangun yang menimbulkan dialog antara pengunjung dengan bangunan. Tidak hanya sebagai naungan yang memiliki fungsi yang tepat guna, namun lebih jauh lagi menjadi bagian dari memori manusia setelah memasukinya. Usaha menerapkan regionalisme dalam arsitektur ialah sampai dengan menempatkan aspek psikologi penghuni bagi Mangunwijaya.



Gambar 6. Biara Trapistin Salatiga
Sumber: Lilianty Sigit Arifin, 2013

Wisma Kuwera

Wisma Kuwera di Yogyakarta merupakan tempat tinggal Mangunwijaya, rumah ini berfungsi sebagai pondokan mahasiswa putri, dan kantor yayasan Dinamika Edukasi Dasar (DED). Masato (2008), wisma kuwera merupakan salah satu karya Mangunwijaya yang mampu merefleksikan sebuah karya arsitektur yang sarat akan citra, begitu peka akan ruang yang dihasilkan dan sarat akan detail yang tak biasa, walau terlihat sederhana, namun sesungguhnya dibalik kesederhanaan itu terdapat pemikiran yang dalam dan maksud yang jelas.

Menurut Budi (2008), Mangunwijaya merancang wisma kuwera dengan prinsip “guna” dan citra”. Setiap sudut ruang memiliki fungsi yang diolah secara kreatif sehingga penyelesaiannya menjadi unik, estetik dan bercita rasa tinggi. Wisma ini tidak memiliki dokumen gambar baik ketika dirancang maupun dibangun. Seperti bangunan yang lainnya, Mangunwijaya lebih menyukai spontanitas desain, langsung dibangun, kadang hanya dengan menggambar di atas tanah yang akan didirikan. Dalam karyanya pada wisma kuwera

penggunaan material kayu mendominasi struktur bangunan yang digabungkan dengan dinding batu bata, kayu, bambu, kaca atau seng.

Baginya Kayu merupakan bahan organik yang bernafas dan hidup. Oleh karena itu kayu diperlakukannya seperti saat kayu masih hidup. Elemen vertikal selalu diletakkan dengan pangkal (arah akar) di bawah dan ujung (arah tajuk) di atas sehingga batang tetap dalam posisi tertancap saat masih hidup. Sama halnya dengan material lain yang diperlakukan sesuai dengan karakter material tersebut.

Ketersediaan bahan di lokasi tapak menjadi pertimbangan utama dalam perancangan wisma kuwera. Bahan yang digunakan adalah bahan yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dan mudah didapatkan pada lokasi tapak. Selain itu, dalam merancang dimensi ruang, Mangunwijaya mementingkan dimensi bahannya, ukuran ruang dipengaruhi dari ukuran bahan. Sehingga tidak banyak bahan yang tersisa. Penyelesaian detail secara tektonis sehingga bangunan bisa berdiri dengan sambungan-sambungan yang tak biasa. Setiap ruang, ia coba memberikan makna. Kepekaan terhadap kultur lokal dan pelibatan para tukang lokal selalu dilakukan pada setiap pembangunan. Sehingga terciptalah sebuah citra bangunan yang kuat adaptasinya terhadap alam sekitarnya (Gambar 7).



Gambar 7. Wisma Kuwera
Sumber: www.atelierriri.com

Rumah Arief Budiman

Rumah Arief Budiman terdiri dari empat susun rumah panggung yang menyesuaikan dengan kontur pada tapak. Rumah ini memiliki bukaan dinding yang besar yang membuat ruang dalam menyatu dengan alam. Komposisi massa bangunan terlihat melayang di udara dengan

konfigurasi yang mencoba memadu diri dengan ritme kontur dan pepohonan (Gambar 8).



Gambar 8. Rumah Arie Budiman

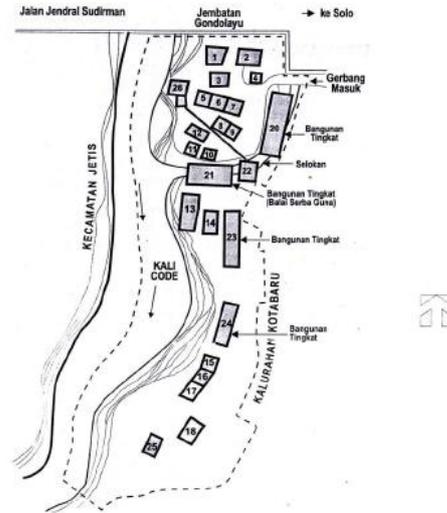
Sumber: <http://arsip.tembi.net/id/news/berita-budaya/arsitek-tak-punya-posisi--karena-itu-banyak-dosanya-4881.html/> 13/06/2015

Kali Code

Pada tahun 1983, Mangunwijaya datang dan tinggal bersama di kampung code. Menurut July (2014), cara pendekatan Mangunwijaya merancang Kali Code tergolong metode partisipatori desain, yakni pendekatan desain dengan pelibatan diri arsitek kepada komunitas calon pengguna rancangan. Untuk dapat merasakan pengalaman keseharian agar dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka. Metode partisipatori desain merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Rayport (1997), tetapi Mangunwijaya telah menerapkannya dalam perancangan kawasan Kalicode pada tahun 1983. Metode partisipatori dalam medesain menggiring kearah arsitektur empati dalam ketahanan berhuni. Hal ini tidak hanya mengembangkan *sense of belonging*, menciptakan interaksi sosial, mengembangkan relasi interaksi antara ruang hunian dengan penghuni, namun juga membebaskan penghuni dari perasaan negatif diri. Sehingga membentuk integrasi antara fisik, pikiran, emosi, dan jiwa dari keberadaan manusia.

Kampung code terdiri dari kelompok bangunan komunal yang didirikan pada lereng yang sangat terjal. Selain hunian penduduk permukiman ini juga memiliki balai warga, MCK umum, ruang terbuka kecil yang digunakan untuk olahraga serta tempat penampungan untuk berjaga. Mangunwijaya merencanakan kawasan permukiman code menjadi panguyuban besar sebuah komunitas milik bersama, dimana penduduk hanya memiliki hak guna bangunan namun tidak memiliki hak tanah sehingga penduduk tidak

dapat memperjualbelikan atau mewariskan tanah tersebut. Karena konsep dari permukiman ini adalah permukiman sementara. Skema perancangan kampung di ilustrasikan dalam Gambar 9.



Gambar 9. Tata Letak Hunian Kali Code Setelah Diperbaiki

Sumber: Laporan Kerja Praktek Akademi Teknik YKPN Yogyakarta, 1985

Pembangunan masyarakat dan lingkungan permukiman kali code dilaksanakan secara *trial and error*, tidak ada rencana kerja tertulis. Menurut Setiawan (2013) Mangunwijaya tak hanya menciptakan fasilitas fisik, namun juga mendukung secara psikologi, sosial dan politik masyarakat kampung yang marginal, Mangunwijaya menilai bahwa masyarakat ini terjebak dalam kesenjangan struktur dan ekonomi sehingga harus ditingkatkan kehidupannyadan diperdayakan. Yang ia lakukan adalah bekerja bersama dengan masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Kesamaan Pemikiran Mangunwijaya dengan Prinsip Regionalisme Kritis Kenneth Frampton

Jika merujuk pada penjelasan pokok-pokok prinsip arsitektur menurut Mangunwijaya tersebut, ada kesamaan bahasa ungkapan mengenai prinsip Regionalisme Kritis Kenneth Frampton seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara tidak langsung. Aspek pengertian *'place-form'* yang dikemukakan oleh Kenneth Frampton yang berdasar pada bentuk arsitektur yang memiliki batasan dan keterkaitan fisik terhadap lingkungannya, sejalan dengan

pemikiran Mangunwijaya yang berkenaan dengan ‘arsitektur sebagai bentuk orientasi diri dan bentuk penghayatan terhadap gatra-ruang’. Keterkaitan berupa pemaknaan bahwa semua tempat memiliki nilai yang berbeda-beda. Selain itu, ‘adanya prinsip arsitektur sebagai penghayatan gatra dan ruang juga’ sejalan dengan pemikiran Kenneth Frampton mengenai aspek ‘tektonika’ dan pemikiran mengenai konsep ‘lokalitas’ yang tertuang dalam prinsip Regionalisme Kritis.

Penjelasan adanya kesamaan dari karya Mangunwijaya terhadap pemikiran Regionalisme Kritis yang dikemukakan oleh Kenneth Frampton dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Tabel 1). Beberapa contoh karya Mangunwijaya diambil dan dianalisa berdasarkan aspek kearsitekturannya. Tabel tersebut dibuat untuk melihat sejauh mana (ada atau tidaknya) kesamaan antara pemikiran Mangunwijaya dan Kenneth Frampton dalam menyikapi modernisme dunia Barat yang berkembang pada saat itu.

Tabel 1. Tabel Pemikiran Kenneth Frampton dan Mangunwijaya. Tabel ini menunjukkan adanya relevansi antara pemikiran/karya-karya Mangunwijaya terhadap teori Regionalisme Kritis Kenneth Frampton

Contoh Karya Mangunwijaya	7 Aspek Regionalisme Kritis (Kenneth Frampton)							Cara Pandang Arsitektur (Mangunwijaya)						
	Marginal Practice	"Place-form"	Tectonic Fact	Site-specific Factors	Emphasizes The Tactile	Disjunctive Episodes of Vernacular	Flourish in those Cultural Interstices	Bahasa Ungkapan	Guna dan Citra	Simbol Kosmologis	Bentuk Orientasi Diri	Cermin Sikap Hidup	Penghayatan Gatra dan Ruang	Tektonika
1 Gereja St. Maria Assumpta														
2 Penziarahan Sendangsono														
3 Biara Trapistin														
4 Wisma Kuwera														
5 Rumah Arief Budiman														
6 Kali Code														

Keterangan

Prinsip Mangunwijaya
 Prinsip Kenneth Frampton

Sumber: Berbagai Sumber dan Disunting Kembali

KESIMPULAN

Memang tidak seluruh aspek pemikiran Mangunwijaya berkaitan secara definitif dan serupa terhadap Regionalisme Kritis Kenneth Frampton. Namun, dengan adanya kesamaan tersebut merupakan suatu bentuk dari kritik terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari modernisme yang berkembang. Kesamaan visi Frampton dan Mangunwijaya dalam menjaga makna sebuah nilai budaya dapat dilihat dari tujuan yang tercantum dalam pemikiran mereka.

Modernisme yang berdampak negatif pada kebudayaan menjadi landasan acuan berpikir baik Frampton maupun Mangunwijaya. Namun keduanya tidaklah anti terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi. Menurut Frampton dan Mangunwijaya, berarsitektur perlu melihat lebih jauh serta memperhatikan hal-hal yang telah diungkap

dalam pemikiran-pemikiran mereka di atas. Nilai-nilai spesifik yang ada di masing-masing tempat menjadi bagian dari *constrain* desain, agar karya arsitektur dapat mempunyai jiwa dan kekhasan.

Sumbangsih pemikiran Mangunwijaya dalam memandang keberlangsungan arsitektur di Indonesia memberikan nafas segar bagi terjaganya budaya-budaya lokal/setempat yang sangat banyak dan beragam. Mangunwijaya telah mendorong pemikiran-pemikiran kritis terhadap dampak modernisme yang berkembang. Bagi pendidikan arsitektur di Indonesia, pemikiran Mangunwijaya dan Frampton tidak hanya muncul sebagai sebuah pandangan kritis mengenai pembangunan bangsa, namun juga berperan dalam menggiring paradigma bahwa ada nilai-nilai penting yang harus dijaga tidak hanya sebatas karya

arsitektur, namun prinsip-prinsip mendasar sebagai hakikat manusia dalam berarsitektur.

Setyo, T. B (2008) *Dimensi Manusia Dalam Dua Karya Y.B Mangunwijaya (Dokumen tahun 1987)* dalam buku *Sang Arsitek: Menimbang Kembali Arsitektur Y.B Mangunwijaya*. Yogyakarta: PT Kanisius.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, L. S. (2013) *Arsitektur ala Y. B. Mangunwijaya: Sebuah Puisi Kehidupan*, dalam buku *Sang Arsitek Menimbang Kembali Arsitektur Y.B. Mangunwijaya*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Frampton, K. (1980) *Modern Architecture: A Critical History*. London & New York: Thames and Hudson.

Frampton, K. (1983). *Prospects for A Critical Regionalism*. dalam buku *Theorizing A New Agenda For Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965-1995* dengan editor Kate Nesbitt. New York: Princeton Architectural Press.

Kolb, D. (1990) *Postmodern Sophistication: Philosophy, Architecture and Tradition*. Chicago & London: University of Chicago Press.

Mahatmanto. (1999) *Membangun: Apresiasi pada Karya Tektonika Mangunwijaya*. dalam buku *Tektonika Arsitektur* Publikasi karya Y.B. Mangunwijaya diselenggarakan oleh Cemeti Art House (Yogyakarta) dan The Japan Foundation (Jakarta).

Mangunwijaya, Y.B (1981) *Pasal-Pasal Pengantar Fisika Bangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Mangunwijaya, Y. B. (1988) *Wastu Citra*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mangunwijaya, Y.B. (1995) "Words Of Gratitude For The Granting", pidato dalam The Ruth And Ralph Erskine Award 1995.

Prawoto, E. d. (1999) *Catatan Kurator*, dalam buku *Tektonika Arsitektur* Publikasi karya Y.B. Mangunwijaya diselenggarakan oleh Cemeti Art House (Yogyakarta) dan The Japan Foundation (Jakarta).

PRINSIP-PRINSIP REGIONALISME KRITIS KENNETH FRAMPTON DAN KESAMAANNYA DENGAN PEMIKIRAN SERTA KARYA MANGUNWIJAYA

Dwi Lindarto H¹, Sirojuzilam², Badaruddin³, Dwira Nirfalini Aulia⁴
Program Studi Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara
Email: ¹dwilindarto@gmail.com

ABSTRACT

Regional development in North Sumatra with the concept Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo) creating neighboring region hinterland Medan city with Deli Serdang Regency. One of the areas which grow rapidly is Tembung in Percut Sei Tuan District. Population structure in Tembung shows occurrence condition of rural-urban change (peri-urbanization) which can be seen from the widespread growth of settlements in the form of house building by developers as well as villagers. The purpose of this study is to reveal the factors which cause land use transformation in Tembung area. The study is conducted with descriptive quantitative study approach.. Data is obtained through sampling technique by purposive sampling with consideration of the population characteristics which are immigrant settle, native/ local pople who has built house / renovation between 2010 till 2015. Then analysis the statistical tests by the technique of cross-tabulation using SPSS program. As result the population demographics, value / land price, accessibility, public facilities, developers activity, social and cultural changes in the city behavior are proven have influence on land use transformation. Implication of the findings are required observation and intensive control in space utilization considering the rapid land use transformation due to the influence of the city development.

Keywords: *Regional development, Land use transformation, Deli Serdang hinterland.*

PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menambah, meningkatkan, memperbaiki atau memperluas aspek pembangunan wilayah dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wilayah (*regional development*) dalam hal ini mencakup aspek ekonomi (*economics setting*), aspek sosial (*social setting*), aspek pranata kelembagaan (*institutional setting*) dan aspek lingkungan (*natural and man-made behavior*). Rangkaian kegiatan pengembangan wilayah bertumpu pada upaya mengurangi ketimpangan pembangunan dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kota sebagai upaya pengembangan wilayah menimbulkan kebutuhan akan lahan yang makin meluas menjangkau ke arah wilayah pedesaan di pinggiran kota yang disebut sebagai wilayah

penyangga/*hinterland* (dalam istilah lain dinyatakan sebagai wilayah bertetangga/*neighbourhood* atau wilayah *peri-urban*. Di Sumatera Utara pembangunan wilayah dengan konsep *city-linkage* Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo) memunculkan wilayah bertetangga *hinterland* kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang. Salah satu wilayah yang tumbuh cepat menjadi pusat pertumbuhan adalah kawasan Desa Tembung di Kecamatan Percut Sei Tuan. Wilayah ini seluas 735 ha dengan luas lahan terbangun 515 ha dan luas RTH 220 ha berpenduduk sejumlah 100.776 orang. Percepatan pertumbuhan kawasan Tembung diuntungkan oleh lokasi yang berada di wilayah perbatasan pembangunan pesat kota Medan dengan penempatan fasilitas umum strategis seperti kantor pemerintah, rumah sakit, pendidikan, perdagangan dan industri. Pembukaan jalan tol Belmera melintas kawasan serta jalur jalan Medan menuju Bandara Kuala

Namu merupakan katalisator percepatan pembangunan dari sisi sistem transportasi dan aksesibilitas kawasan Tembung.

Struktur kependudukan kawasan Tembung tumbuh sebagai himpunan penduduk asli pedesaan, kaum urbanis kota (akibat konurbasi dari pusat-pusat kota sekitar Medan), kaum urbanis desa (akibat urbanisasi dari desa *hinterland* sekitar Desa Tembung) dan para penglaju (*commuter*). Kepadatan penduduk desa Tembung 99,45 jiwa/ha menunjukkan kondisi terjadinya gejala perubahan *desa-kota* (peri-urbanisasi) yang merubah norma dan *mind set* pedesaan menjadi bersifat kekotaan dalam perilaku dan interaksi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Selain itu struktur pekerjaan menunjukkan pergeseran mata pencaharian ke arah pekerjaan non pertanian yang menyisakan 1,8% saja yang masih menekuni pertanian dan buruh tani. Adapun PNS dan ABRI sejumlah 22,6%, Swasta 24,2%, Perdagangan dan Jasa 46,8% dan Konstruksi 4,6%.

Dampak perembetan pembangunan kawasan Tembung terlihat dari meluasnya pertumbuhan permukiman dalam wujud perumahan yang dibangun oleh pengembang maupun perkampungan rekayasa masyarakat setempat yang menggusur lahan pertanian pedesaan hanya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Terhitung tak kurang dari delapan pengembang perumahan berskala kecil dan menengah dan satu pengembang besar membangun perumahan di kawasan Tembung yang berujung pada perubahan guna lahan kawasan. Dari sejumlah gejala pengembangan guna lahan permukiman tersebut menjadi menarik untuk diteliti adalah : "Faktor apa yang berpengaruh terhadap pembangunan permukiman yang menimbulkan terjadinya perubahan guna lahan kawasan?". Karenanya menjadi perlu dilakukan kajian untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan guna lahan dan model perkembangan permukiman dengan kasus kawasan Tembung.

Perkembangan pembangunan pusat kota yang intensif berakibat peningkatan kebutuhan luasan ruang dan lahan sebagai wadah kegiatan masyarakat kota. Proses perkembangan demikian akan meluas melampaui batas administratif kota sampai ke wilayah pinggiran kota (*hinterland*) yang merubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun non-pertanian. Daerah *hinterland* sebagai suatu

wilayah cepat tumbuh memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu akumulasi modal, potensi lokasi, pertumbuhan penduduk, infrastruktur, tata guna lahan dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Pada wilayah tersebut perlu didorong adanya kerja sama antar wilayah dalam penciptaan pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan efek dari pengaruh wilayah batas (*regional spillover*). Faktor-faktor pengaruh terjadinya perubahan alih fungsi lahan akibat penetrasi kegiatan kota yang meluas ke wilayah pedesaan yang antara lain dipengaruhi oleh komposisi dan ragam kegiatan penduduk, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum, karakteristik fisik dan nilai lahan, kemudahan perolehan lahan, kebijakan pemanfaatan lahan/tata guna lahan, eksternalitas pengembang. Salah satu bentuk perluasan fisik alih fungsi lahan yang terbentuk di wilayah *hinterland* karena ketersediaan lahan non terbangun adalah meluasnya fungsi permukiman. Fungsi permukiman yang terbentuk berupa perumahan kelompok/*cluster* kecil dan menengah dan berupa kelompok perkampungan.

Secara umum faktor yang mempengaruhi minat terhadap perumahan antara lain adalah pertambahan penduduk (urbanisasi dan konurbasi ke pinggiran kota), kegiatan pengembang (pembangunan *cluster* perumahan dengan kelebihan suasana rumah gaya kota, eksklusifitas, keamanan, *privacy*), nilai property (harga yang terjangkau dengan kemudahan kepemilikan KPR), ketersediaan fasilitas umum sekitar, dan aksesibilitas (kedekatan dengan lokasi pekerjaan, sarana jalan, sarana transportasi umum).

Sementara perkembangan permukiman gaya perkampungan yang dikelola oleh penduduk setempat selain dipengaruhi pertambahan penduduk alami, nilai lahan, juga dipengaruhi oleh faktor pergeseran perilaku sosial budaya akibat derasnya informasi kultur kota (trend pekerjaan pertanian menjadi non pertanian, perkembangan model dan teknologi arsitektur, penetrasi budaya metropolis).

Dengan memperhatikan fenomena pembangunan kawasan Tembung dan dikaitkan dengan berbagai pendapat dalam kajian pustaka diatas maka diasumsikan enam variabel sebagai faktor utama yang diduga relevan berpengaruh terhadap perubahan guna lahan permukiman di kawasan Tembung yaitu komposisi penduduk, nilai/harga lahan, aksesibilitas, fasilitas umum,

aktifitas pengembang, perubahan perilaku sosial budaya kota.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan studi kuantitatif deskriptif. Studi kuantitatif ditujukan untuk memperoleh variabel yang menggambarkan perubahan guna lahan permukiman yang disebabkan oleh laju pembangunan kota yang meluas ke arah pinggiran kota. Pendekatan deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran, justifikasi dan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Data diperoleh melalui teknik sampling secara *purposive sampling* dengan pertimbangan karakteristik penduduk yaitu penduduk pendatang menetap, penduduk asli/setempat yang memiliki rumah terbangun/ter-renovasi antara tahun 2010 sampai tahun 2015 di kawasan perumahan maupun di perkampungan. Kemudian dilakukan analisis uji statistik untuk mengidentifikasi dan mengetahui korelasi antara dua variabel yang ditetapkan dengan teknik *cross tabulasi* (tabulasi silang) menggunakan program SPSS. Nilai uji variabel yang digunakan adalah chi-square test untuk mengetahui hubungan dan uji contingency coefficient untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel. Adapun variabel yang digunakan dalam kajian ini meliputi variabel komposisi penduduk, nilai/harga lahan, aksesibilitas, fasilitas umum, aktifitas pengembang, perubahan perilaku sosial budaya kota. Dengan analisis tabulasi silang dapat diketahui keterkaitan dan hubungan setiap variabel dengan perubahan guna lahan permukiman di kawasan Tembung. Pengujian hubungan antar variabel X (variabel kajian) dengan variabel Y (variabel perubahan guna lahan permukiman) akan menghasilkan tingkat korelasi antar masing-masing variabel untuk kemudian dilakukan pembahasan dan justifikasi secara deskriptif hubungan antar variabel faktor dengan fenomena perubahan guna lahan permukiman di kawasan Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Fisik Lahan Terbangun

Kawasan Tembung merupakan wilayah pinggiran kota Medan dimana secara

administratif kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Posisi di perbatasan kota menjadikan kawasan *hinterland* ini menjadi tumpuan cadangan lahan ketika pembangunan kota Medan mengalami krisis ketersediaan lahan non-terbangun.

Desakan permintaan akan lahan perumahan yang dipengaruhi oleh meningkatnya para migran dari kota kemudian diakomodasi oleh pengembang dengan pengadaan *cluster* perumahan skala kecil dan menengah. Aktifitas pengembang dalam penyediaan lahan bagi perumahan adalah dengan cara alih fungsi sawah dan ladang menjadi tapak untuk perumahan. Lahan yang diminati pengembang sehingga intensif mengalami alih fungsi adalah lahan yang mempunyai kesamaan kondisi atau sifat dalam hamparan yang cukup luas (misalnya hamparan sawah, ladang, kelompok rumah kumuh). Perkembangan fisik lahan terbangun juga terlihat pada kegiatan peng-kapling-an sawah atau ladang yang di jual sebagai lahan kapling perumahan.

Perubahan guna lahan di kawasan Tembung akibat alih fungsi sawah dan ladang menjadi perumahan (Gambar 1). Secara keseluruhan perubahan guna lahan di kawasan Tembung didominasi oleh perkembangan permukiman kampung yang dilakukan masyarakat dibanding perumahan yang dibangun oleh pengembang (*developer*). Hal ini dapat dilihat dari luasan sebaran pola perkampungan tidak beraturan dibanding dengan pola perumahan yang terpola dan tertata rapih. Ditinjau terhadap akses jalan terlihat bahwa sebaran lokasi perumahan umumnya berada pada jalur jalan utama sehingga terlihat lebih terpola beraturan, sementara permukiman perkampungan lebih menyebar ke arah pinggiran berbatasan dengan sawah dengan pola yang kurang teratur.



Gambar 3. Perubahan Jenis Pekerjaan Non Pertanian
Sumber: Survey Penulis, 2015

Pola permukiman berupa perumahan *cluster* dengan tingkat eksklusifitas pembatas dinding berpagar model *cluster* membawa pengaruh sosial tersendiri ketika bertetangga dengan pola permukiman gaya perkampungan masyarakat sekitar. Terjadi kesenjangan pengelompokan sosial senjang antara warga perumahan dan perkampungan. Efek yang terjadi akibat pola yang tidak menyatu antara perumahan dan perkampungan adalah penurunan kinerja sikap kolektif seperti gotong royong (Gambar 4).



Gambar 4. Eksklusifitas Gerbang Perumahan
Sumber: Survey Penulis, 2015

Pengembangan Wilayah dan Perubahan Guna Lahan Kawasan Tembung

Pengembangan wilayah kawasan pinggiran kota (*urban fringe*) dalam kenampakan fisik ditandai dengan perubahan guna lahan permukiman. Dalam kajian teoritis

sebelumnya telah diungkapkan terdapat enam faktor yang berpotensi sebagai variabel perubahan guna lahan permukiman. Dengan menggunakan pendekatan analisis tabulasi silang (*cross tab*) diperoleh pembuktian bahwa enam faktor tersebut yaitu komposisi penduduk, nilai/harga lahan, aksesibilitas, fasilitas umum, aktifitas pengembang, perubahan perilaku sosial budaya kota cukup berpengaruh signifikan terhadap perubahan guna lahan permukiman di kawasan Tembung. Signifikansi komposisi penduduk sebagai faktor perubahan guna lahan diperkuat oleh kenyataan bahwa rata-rata 70% hunian perumahan yang dibangun pengembang adalah para pendatang dari kota Medan dan sekitarnya. Demikian juga dengan para pembeli tanah kaplingan yang dijual oleh masyarakat non pengembang menunjukkan hampir 87% dibeli oleh masyarakat luar kawasan Tembung. 66% pemilik lahan yang membangun rumah baru menyatakan bahwa pembangunan rumah tersebut pasarnya ditujukan untuk disewakan bagi para pekerja kawasan industri di pinggiran kota Medan sekitar kawasan Tembung.

Signifikansi nilai lahan sebagai faktor perubahan guna lahan dapat dijelaskan melalui pertumbuhan perumahan hasil kegiatan pengembang. Faktor nilai lahan berimplikasi kepada harga jual rumah di perumahan tersebut. Keterjangkauan harga rumah tersebut oleh masyarakat pendatang menunjukkan bahwa nilai lahan di kawasan tersebut masih dapat diterima dan merupakan daya tarik kuat bagi tumbuhnya perumahan.

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perubahan guna lahan permukiman. Pada permukiman perkampungan secara fisik spasial terlihat bahwa pertumbuhan perkampungan sejalan dengan pola pertumbuhan pembangunan jalan utama. Sistem transportasi umum walaupun hanya 42% masyarakat menyatakan sangat diperlukan namun tidak terlalu signifikan terhadap perubahan guna lahan. Peralihan kemudahan perolehan kendaraan bermotor roda 2 dan sistem ojek telah menjawab kebutuhan transportasi umum masyarakat.

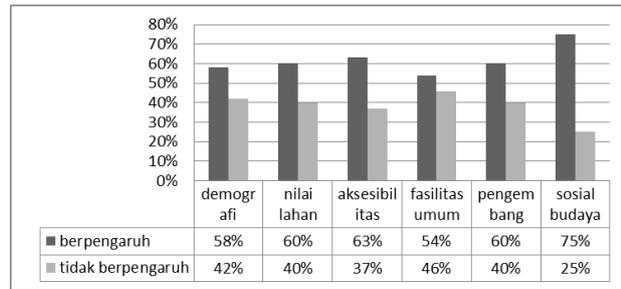
Perubahan sosial budaya masyarakat karena terbukanya sistem informasi melalui multi media telah mendorong perilaku spasial kekotaan. Sikap terhadap lahan sawah sebagai barang komoditas, perubahan pola pekerjaan, perbedaan orientasi bangunan, perubahan gaya

bangunan karena masuknya teknologi, adanya segregasi sosial antara perumahan dan perkampungan, dsb merupakan perwujudan perubahan perilaku sosial budaya masyarakat yang berdampak kepada timbulnya perubahan guna lahan permukiman.

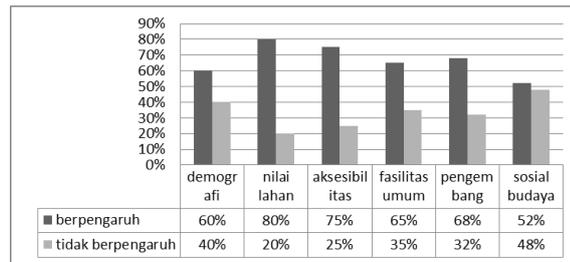
Penduduk asli/setempat yang memiliki rumah terbangun/ter-renovasi berpendapat perubahan guna lahan dominan terjadi karena pengaruh sosial budaya akibat penetrasi budaya kota dalam perubahan *mind set* gemerlap kota, pengaruh aksesibilitas karena pembangunan jalan sampai ke pelosok pedesaan dan pengaruh naiknya nilai lahan sebagai akibat pengembangan wilayah. Pertambahan migrasi dan komuter juga memicu perubahan guna lahan karena permintaan rumah sewa dan lahan kaplingan

Sementara penduduk pendatang berpendapat perubahan guna lahan dominan terjadi karena pengaruh nilai lahan yang dianggap relatif murah dan terjangkau, pengaruh aksesibilitas yaitu kemudahan pencapaian ke tempat kerja dan pusat kota, pengaruh pengembang yang menyediakan suasana rumah perkotaan walau lahan berada di pedesaan, pengaruh fasilitas umum pendidikan, rumah sakit, pemerintahan, lembaga keuangan yang melengkapi suasana perkotaan di pedesaan.

Jika diperbandingkan hasil pendapat penduduk asli dan penduduk pendatang terdapat temuan perbedaan bahwa faktor sosial budaya demikian berpengaruh menurut penduduk asli (Gambar 5) terutama akibat derasnya informasi budaya kota dan perubahan fisik pertanian menjadi non pertanian (fasilitas toko, pasar, mall, perumahan *real estate*) yang merubah pandangan terhadap guna lahan sehingga penduduk asli mengubah guna lahan pertanian menjadi non pertanian. Sementara menurut penduduk pendatang (dengan membawa nilai budaya kota) berpendapat praktis ekonomis bahwa nilai lahan dan nilai aksesibilitas dan fasilitas umum menjadi daya tarik pengaruh utama mereka menetap di kawasan ini sehingga berakibat terjadinya perubahan guna lahan (Gambar 6).



Gambar 5. Faktor Pengaruh Menurut Penduduk Asli/Menetap
Sumber: Analisis, 2015



Gambar 6. Faktor Pengaruh Menurut Penduduk Pendatang
Sumber: Analisis, 2015

Pola Tatanan Permukiman Kawasan Tembung.

Perubahan guna lahan yang terjadi di kawasan Tembung selain transformasi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun ternyata menunjukkan adanya perubahan pola tatanan perumahan. Secara deskriptif berikut disampaikan temuan pembentukan pola hunian perumahan. Pola perubahan tata lahan perumahan demikian cenderung terbentuk oleh arah dan ketersediaan aksesibilitas jalan utama menuju lokasi tersebut. Orientasi tata lahan perumahan terdisain sesuai bentuk lahan yang tersedia. Kapling lahan perumahan sangat efektif memaksimalkan jumlah kapling yang dapat dijual, berciri halaman sempit. Orientasi arah hadapan rumah sangat terpengaruh oleh lebar dan karakteristik jalan dihadapannya. Lokasi yang berada di tepi jalan utama dianggap bernilai aksesibilitas lebih tinggi sehingga memiliki nilai jual yang lebih mahal dibanding rumah yang berada di sisi jalan lingkungan yang lebih sempit.

Tata lahan perumahan *cluster* demikian membentuk zona hunian berbentuk *enclave* berorientasi ke dalam dengan pagar tinggi membatasi perumahan dengan perkampungan.

Desain tatanan tapak, orientasi, pagar pembatas membentuk pemisahan zonasi perumahan dan perkampungan. Jalur sirkulasi perumahan yang terbentuk menunjukkan pola *grid* atau *cul de sac* membentuk model *cluster* perumahan dengan model akses satu pintu gerbang. *Entrance* atau jalan masuk utama *cluster* perumahan demikian biasanya di beri gapura atau gerbang rumah penjaga lengkap dengan portal besi. Dengan alasan keamanan model gerbang demikian mengukuhkan eksklusifitas kesenjangan perumahan terhadap perkampungan. Desain tatanan tapak perumahan menyuguhkan perbedaan kelas sosial antara pendatang dengan penduduk setempat di perkampungan.

Perumahan yang dikelola oleh pengembang (Gambar 7) umumnya menampilkan tatanan kampung kota dengan desain masa kini, keamanan terjaga, lebih terpolo, tertata rapi dengan infrastruktur utilitas yang terencana serta adanya rasa 'privilege' dan 'bergengsi' tinggal di kompleks perumahan. Kelebihan demikian menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari kota (yang lebih merasa *familiar* dengan model rumah di kota) sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dengan model perumahan gaya kota tersebut walaupun berada di tengah perkampungan. Dengan demikian faktor pengembang menjadi faktor yang cukup dominan dalam perubahan guna lahan serta pembentukan permukiman kampung kota di kawasan *hinterland* Tembung.



Gambar 7. Pola Perumahan oleh Pengembang
Sumber: <https://earth.google.com/2015>

KESIMPULAN

Pengembangan wilayah di kawasan Tembung yang berakibat perubahan guna lahan permukiman berdampak positif secara ekonomi dengan adanya peningkatan generatif aktifitas dan pertumbuhan ekonomi perkotaan kawasan walaupun masih terdapat kesenjangan antara kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat kota pendatang (perumahan oleh pengembang) dengan kegiatan perekonomian yang diusahakan oleh masyarakat setempat (usaha tanah kaplingan oleh pemilik lahan).

Perubahan tatanan dan perilaku sosial budaya masyarakat pinggiran yang terkontaminasi budaya kota sejalan dengan pengembangan wilayah kota merupakan daya dorong yang cukup kuat terhadap terjadinya perubahan guna lahan kawasan. Perubahan guna lahan di kawasan pinggiran hendaknya difahami sebagai suatu proses perkembangan pembentukan kota yang terus berlanjut. Secara fisik pembentukan guna lahan permukiman yang bersifat sporadis (*model leap frog development* dan *ribbon type development*) menimbulkan masalah negatif dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan.

Dalam perjalanan proses tersebut perlu dilakukan pengawalan dan pengendalian atas percepatan perubahan guna lahan permukiman sehingga tidak melebarkan terjadinya kesenjangan antara wilayah terbangun dan non-terbangun dengan segala implikasinya yang merugikan antara lain aspek pertanahan, aspek infrastruktur, aspek komunikasi, aspek transportasi, timbulnya degradasi lingkungan, kawasan kumuh kota serta hilangnya lahan pertanian produktif mengingat Kabupaten Deli serdang merupakan wilayah lumbung potensial menjamin ketahanan pangan propinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Adell, G. (1999) *Theories and Models of the Peri-urban Interface: A Changing Conceptual Landscape*. London: The Development Planning Unit, University College London.

- Badaruddin (2001) *Komuting dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Desa Pinggiran Kota. Laporan Penelitian Dosen Muda*. Tidak Dipublikasi. Dikti-Depdiknas. Jakarta.
- Bappeda Kabupaten Deli Serdang (2012) *Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Final Report*, unpublished.
- Bungin, Burhan (2008) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- E. Rustiadi, S. Saefulhakim, and D. R. Panuju (2009) *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sjafrizal (2012) *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simon, D. (2008) *Urban Environments: Issues on the Peri-Urban Fringe. Annual Review of Environment and Resources* 33, 167-185.
- Sirojuzilam (2011) *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*, USU Press, Medan.
- Soetomo, Sugiono (2009) *Urbanisasi dan Morfologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tacoli, C. (1998) *Rural-Urban Interactions: A Guide to the Literature. Environment and Urbanization* 10, 147-166.
- Trancik, Roger (1986) *Finding Lost Space; Theories of Urban Design*, Van Nostrand Reinhold Company, New York.
- Woltjer, Johan (2014) A Global review on Peri Urban development and Planning, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol 25, No. 1*, hlm 1-16, April 2014, SAPPK ITB.
- Yunus, Hadi Sabari (2008) *Dinamika Wilayah Peri Urban Determinan Masa Depan Kota*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN PRASARANA LINGKUNGAN PERUMAHAN

Studi Kasus: Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Irin Caisarina

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Email: irene1805@yahoo.com

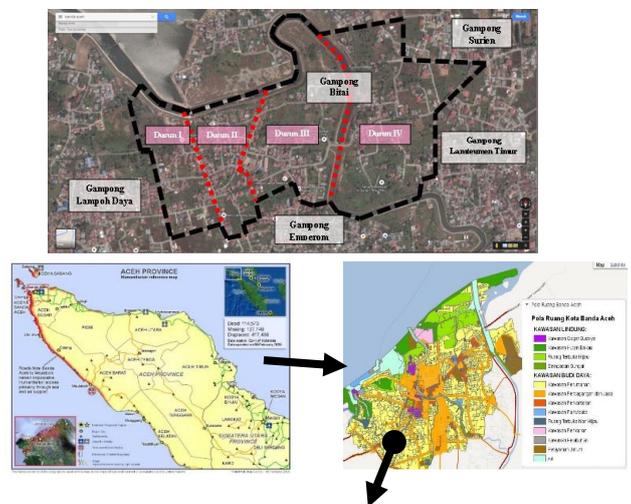
ABSTRACT

Gampong Bitai, a village located in the district of Banda Aceh Jaya Baru, has destroyed by the earthquake and tsunami on December 26, 2004. During the Reconstruction and Rehabilitation process, Turkish Red Crescent Society (TRCS), a Non-Government Organization (NGO), had actively involved in rebuilding infrastructure in Gampong Bitai. A total number of 500 houses of type 50 m2 have been built by TRCS. The village has been equipped with facilities such as, roads, drainage systems, water supply system, administration buildings (village office) and the Community Health Center (Puskesmas). After ten (10) years of the reconstruction, it is expected conditions of infrastructure remain maintained and functioned well. Thus, this study aims to analyze the community participation in maintaining the infrastructure in the existing residential neighbourhood by employing quantitative descriptive analysis. The primary data was obtained from questionnaires targeting 80 households in the Gampong Bitai. The result shows that the authority of Gampong Bitai has frequently conducted a mutual cooperation for the maintenance of the infrastructure in the village, but in the absence of the participation of the society. The people are rarely involved either in the mutual cooperation activities or in the maintenance of some of the infrastructure such as roads, drainage system, solid waste, and parks/open spaces. In addition, they are also extremely excluded in maintaining the water supply system and sanitation/waste. In this sense, the research shows that lack of involvement has caused the lack of sense of belonging to the infrastructure in the Gampong Bitai.

Keywords: Community Participation, Infrastructure, Residential Neighbourhoods.

PENDAHULUAN

Gampong Bitai, sebuah desa yang berada di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, merupakan salah satu desa yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Adapun batas wilayah Gampong Bitai seperti yang terlihat pada Gambar 1, menunjukkan di sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Surien, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lampoh Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Emperom dan sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur.



Gambar 1. Peta Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Luas wilayah Gampong Bitai adalah seluas 37,2 Ha dengan peruntukan penggunaan lahan terdiri dari 17,2 Ha untuk bangunan/pekarangan dan 20 Ha untuk penggunaan lahan lainnya dengan ketinggian rata-rata 7 meter dari permukaan laut (dpl). Gampong Bitai terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 1.025 orang yang terdiri dari 554 laki-laki dan 471 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 328 KK.

Dalam masa proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon), *Turkish Red Crescent Society* (TRCS) merupakan sebuah Lembaga Non Pemerintah (NGO) yang turut berperan aktif dalam membangun kembali sarana dan prasarana di Gampong Bitai. Rumah sebagai salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi sebagai tempat berlindung dan beristirahat. Kawasan perumahan haruslah ditunjang dengan kelengkapan fisik lingkungan sebagai sebuah syarat mutlak dalam lingkungan permukiman untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan kesehatan bagi masyarakatnya. Prasarana dalam kawasan perumahan diharapkan berada dalam lingkungan yang baik serta dilengkapi fasilitas penunjangnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut. Sebanyak 500 unit rumah tipe 50 m² telah dibangun oleh TRCS dalam masa tersebut yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti, jaringan jalan, sistem drainase, distribusi air minum, bangunan administrasi (kantor desa) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Lingkungan perumahan direncanakan dan di bangun berdasarkan acuan kerangka penataan ruang dan wilayah untuk menjamin ketertiban, terorganisasi dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemenuhan kebutuhan dan fungsinya sebagai hunian yang saling berintegrasi dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Kawasan permukiman sebagai bagian dari kawasan budidaya merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan, memiliki sarana dan prasarana, fasilitas umum serta beberapa penunjang kegiatan. Seperti yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004, pembangunan perumahan yang dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana serta berkelanjutan berkesinambungan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta

kesejahteraan umum (Badan Standarisasi Nasional, 2004). Terdapat 6 bagian dalam perencanaan prasarana lingkungan perumahan yaitu: (1). Jaringan jalan; (2). Jaringan Drainase; (3). Jaringan Air Bersih; (4). Jaringan Limbah; (5). Jaringan Persampahan; dan (6). Penghijauan/Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), salah satu permasalahan perumahan dan permukiman yang dihadapi di Indonesia adalah menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Secara fungsional, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan maupun sebagai kawasan permukiman yang berkelanjutan (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002).

Kunci tercapainya fungsi prasarana lingkungan dengan baik apabila pengelolaannya, operasi dan pemeliharaannya juga pembiayaan adalah sesuai dengan kebutuhannya. Efisiensi dan efektifitas dari operasi dan pemeliharaannya akan menjamin keberlanjutan suatu kegiatan pengelolaan prasarana lingkungan tersebut.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (2010) menyebutkan tentang ciri-ciri suatu sistem dikatakan berkelanjutan adalah jika:

1. Berfungsi dengan baik dan menghasilkan manfaat dalam tingkat yang memadai dari sisi (kualitas, kuantitas, kontinuitas, kenyamanan, terjangkau, efisiensi, kehandalan, kesehatan dan keamanan);
2. Beroperasi dalam jangka waktu yang lama (minimal sesuai dengan usia pakai);
3. Manajemennya dilembagakan (manajemen berbasis perspektif gender, kemitraan dengan lembaga-lembaga keterlibatan sektor formal dan informal);
4. Biaya operasi dan pemeliharaan dan administrasi bisa dipenuhi masyarakat pengguna sendiri (minimal *cost recovery* terhadap biaya O dan P);
5. Perbaikan kerusakan dan penggantian suku cadang bisa dipenuhi di tingkat lokal;
6. Bisa dioperasikan dan dipelihara di tingkat lokal dengan hanya dukungan terbatas dari pihak luar (bantuan teknis, pelatihan, pemantauan);
7. Tidak mempengaruhi lingkungan secara negatif.

Operasi dan pemeliharaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis dimana kegiatan ini dilakukan secara rutin, berkala maupun perbaikan sewaktu-waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar prasarana lingkungan yang telah ada terus dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat seperti yang direncanakan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (2010) mengklasifikasikan pemeliharaan secara umum 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Pemeliharaan Rutin (*preventive maintenance*)
Mengontrol dan merawat prasarana sarana secara rutin/periodik sehingga tidak terjadi kerusakan atau berubah fungsinya. Pemeliharaan ini bersifat preventif, ringan dan dijadwalkan teratur dalam satu tahun. Bagian penting dari pemeliharaan rutin antara lain adalah pencegahan atau menjaga penggunaan prasarana yang tidak semestinya atau penggunaan diluar fungsinya agar prasarana tidak cepat rusak.
2. Pemeliharaan sesudah rusak (*breakdown maintenance*)
Meliputi perbaikan atau modifikasi dari sarana/prasarana yang dilakukan setelah terjadi kerusakan saat digunakan.
3. Pemeliharaan ulang (*corrective maintenance*)
Meliputi perbaikan rehabilitasi dari sarana-prasarana yang dilakukan untuk mengembalikan fungsinya semula sesuai desain atau standar awal. Waktu pelaksanaan berdasarkan selang waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Pemeliharaan ulang disebut juga perbaikan besar.

Dalam menjamin keberlangsungan fungsi prasarana lingkungan perumahan maka sangat diperlukan bentuk partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) oleh masyarakat terhadap prasarana lingkungan perumahan di kawasan tempat tinggalnya. Mengingat keterbatasan pemerintah dalam memelihara prasarana lingkungan perumahan, maka bentuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena fungsi dan manfaat dari prasarana lingkungan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Sutrisno dalam Suciati (2006) partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam melestarikan dan

mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan, perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya. Terdapat 3 (tiga) tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Cohen dan Uphoff (dalam Adrianto, 2006) yaitu:

1. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang dapat dilaksanakan, dapat atau layak dioperasionalkan).
2. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi) untuk kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel).
3. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi termasuk keterlibatan dalam proses yang berjalan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Kini telah lebih 10 (sepuluh) tahun pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Gampong Bitai dan diharapkan kondisi prasarana lingkungan di kawasan tersebut masih tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan terhadap prasarana lingkungan perumahan yang telah ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan analisa deskriptif untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan. Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada 80 Kepala Keluarga yang didistribusi di 4 (empat) buah dusun. Data sekunder diperlukan untuk menunjang penelitian ini berupa peta lokasi Gampong Bitai, data kependudukan dan sosial kemasyarakatan Gampong Bitai, teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan prasarana lingkungan. Data ini diperoleh dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan beberapa literatur. Kuesioner disusun menggunakan *rating scale* terhadap 8 variabel

bentuk partisipasi masyarakat yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (J), Sangat Jarang (SJ) dan Tidak Pernah (TP). Dari hasil deskriptif data kuesioner dari responden, kemudian akan di bobotkan dalam beberapa tingkatan skor untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat, dimana apabila skor berada dalam rentang 336-400 menjabarkan bahwa masyarakat sangat sering berpartisipasi, 272-335 adalah sering berpartisipasi, skor 208-271 jarang berpartisipasi, 144-207 sangat jarang berpartisipasi dan skor 80-143 termasuk dalam kategori tidak pernah berpartisipasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Terdapat 8 (delapan) aspek penilaian dalam menilai bentuk partisipasi masyarakat Gampong Bitai dalam pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan, yaitu: (1) Kegiatan gotong royong pemeliharaan prasarana lingkungan; (2) Kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong; (3) Pemeliharaan jaringan jalan secara swadaya; (4) Pemeliharaan jaringan drainase secara swadaya (5) Pemeliharaan jaringan air bersih secara swadaya; (6) Pemeliharaan sistem persampahan secara swadaya; (7) Pemeliharaan jaringan sanitasi/limbah secara swadaya; dan (8) Pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau secara swadaya. Penilaian bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat di Gampong Bitai tersebut adalah terhadap 3 jenis bentuk pemeliharaan baik rutin, pemeliharaan sesudah rusak maupun pemeliharaan ulang.

Penilaian bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kawasan perumahan Gampong Bitai adalah berdasarkan secara swadaya, karena seperti yang telah disebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan manfaat prasarana lingkungan perumahan Gampong Bitai bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Frekuensi kegiatan gotong royong masyarakat Gampong Bitai dalam hal pemeliharaan prasarana lingkungan terlihat bahwa 15 responden (19%) sangat sering melaksanakan kegiatan gotong royong dan 28 (dua puluh delapan) responden (35%) menjawab sering dilaksanakan gotong royong. Sementara itu, terdapat 21 responden (26%) yang jarang melaksanakan kegiatan gotong royong, 9 responden (11%) sangat jarang dan 7 responden

(9%) tidak pernah melaksanakannya sama sekali.

Melihat tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di Gampong Bitai menggambarkan sebanyak 12 responden (15%) sangat sering hadir dalam kegiatan tersebut dan sebanyak 20 responden (25%) sering mengikutinya, 29 responden (36%) jarang, 10 responden sangat jarang (13 %) menghadiri gotong royong dan sebanyak 9 responden (11%) tidak pernah menghadiri kegiatan gotong royong sama sekali.

Dalam pemeliharaan salah satu fasilitas prasarana lingkungan perumahan yaitu jaringan jalan secara swadaya oleh masyarakat terlihat sebanyak 10 responden (13%) sangat sering melakukannya (13%) dan sebanyak 20 responden (25%) sering. Terlihat juga bahwa 25 responden (31%) memberikan jawaban jarang, sebanyak 16 responden (20%) memberikan jawaban sangat jarang dan 9 responden (11%) memberikan jawaban tidak pernah.

Terkait dengan frekuensi pemeliharaan jaringan drainase secara swadaya oleh masyarakat Gampong Bitai, diperoleh jawaban sebanyak sebanyak 11 responden (14%) menjawab sangat sering, sebanyak 20 responden (25%) menjawab sering, 28 responden menjawab jarang (35%), sebanyak 12 responden (15%) menjawab sangat jarang dan 9 responden (11%) menjawab tidak pernah.

Dalam hal frekuensi pemeliharaan jaringan air bersih secara swadaya oleh masyarakat yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner terlihat 4 responden (5%) yang sangat sering melakukan pemeliharaan jaringan air bersih, sebanyak 14 responden (18%) yang sering melakukan pemeliharaan. Sementara itu sebanyak 16 responden (20%) menjawab jarang, sebanyak 17 responden (21%) sangat jarang dan sebanyak 29 responden (36%) menjawab tidak pernah melakukan pemeliharaan jaringan air bersih sama sekali.

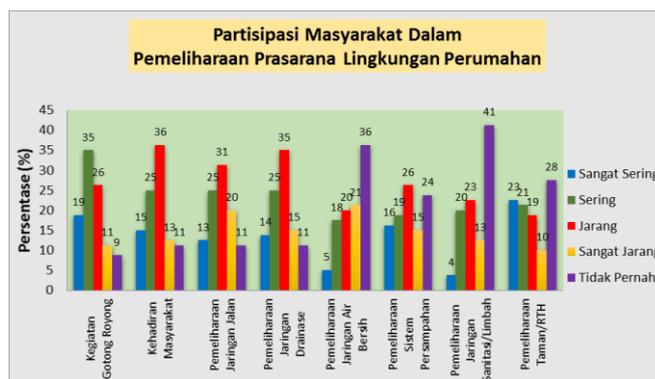
Frekuensi pemeliharaan sistem persampahan secara swadaya oleh masyarakat sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian adalah sebanyak 13 responden (16%) menjawab sangat sering, 15 responden (19%) sering, 21 responden (26%) menjawab jarang, 12 responden (15%) menjawab sangat jarang dan sebanyak 19 responden (24%) menjawab tidak pernah.

Untuk frekuensi pemeliharaan jaringan sanitasi/limbah secara swadaya oleh masyarakat berdasarkan hasil jawaban responden terhadap kuesioner adalah sebanyak 3 responden (4%) menjawab sangat sering, 16 responden (20%) menjawab sering, sebanyak 18 responden (23%) menjawab jarang, 10 responden menjawab sangat jarang (13%) dan 33 responden (41%) menjawab tidak pernah melakukan pemeliharaan jaringan sanitasi/limbah.

Di dalam melakukan pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau secara swadaya oleh masyarakat, terlihat frekuensi dari responden

dalam kegiatan ini adalah sebanyak 18 responden (23%) menjawab sangat sering, 17 responden (21%) menjawab sering, sebanyak 15 responden (19%) menjawab jarang, 8 responden (10%) menjawab sangat jarang dan sebanyak 22 responden (28%) tidak pernah terlibat dalam kegiatan pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau.

Kedelapan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan di Gampong Bitai dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan di Gampong Bitai

Dari data 8 (delapan) variabel partisipasi masyarakat di atas, diperoleh bobot skor partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan

prasarana lingkungan perumahan Gampong Bitai adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Bobot skor Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan di Gampong Bitai

No.	Variabel	Bobot Skor (Frekuensi x skor)					Jumlah
		SS (skor 5)	S (skor 4)	J (skor 3)	SJ (skor 2)	TP (skor 1)	
1	Frekuensi kegiatan gotong royong pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan	75	112	63	18	7	275
2	Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong	60	80	87	20	9	256
3	Frekuensi pemeliharaan jaringan jalan secara swadaya	50	80	75	32	9	246
4	Frekuensi pemeliharaan jaringan drainase secara swadaya	55	80	84	24	9	252
5	Frekuensi pemeliharaan jaringan air bersih secara swadaya	20	56	48	34	29	187
6	Frekuensi pemeliharaan sistem persampahan secara swadaya	65	60	63	24	19	231
7	Frekuensi pemeliharaan jaringan sanitasi secara swadaya	15	64	54	20	33	186
8	Frekuensi pemeliharaan taman/ ruang terbuka hijau secara swadaya	90	68	45	16	22	241
	Jumlah	430	600	519	188	137	1874

Seperti yang terlihat pada Tabel 1 di atas dan berdasarkan interval skor yang memperlihatkan partisipasi masyarakat terhadap 8 (delapan) kategori kegiatan pemeliharaan prasarana lingkungan di Gampong Bitai, maka

diperoleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan di Gampong Bitai seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan di Gampong Bitai

	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi
1	Kegiatan gotong royong pemeliharaan prasarana lingkungan	Sering
2	Kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong	Jarang
3	Pemeliharaan jaringan jalan secara swadaya	Jarang
4	Pemeliharaan jaringan drainase secara swadaya	Jarang
5	Pemeliharaan jaringan air bersih secara swadaya	Sangat Jarang
6	Pemeliharaan sistem persampahan secara swadaya	Jarang
7	Pemeliharaan jaringan sanitasi/limbah secara swadaya	Sangat Jarang
8	Pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau secara swadaya	Jarang

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan gotong royong dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kawasan perumahan Gampong Bitai sering dilakukan sebanyak 5-7 kali dalam setahun, namun masyarakat Gampong Bitai jarang turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan gotong royong tersebut hanya 3 sampai 4 kali saja dalam setahun. Untuk pemeliharaan jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan dan pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau jarang sekali dilakukan secara swadaya oleh masyarakat hanya setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, pemeliharaan jaringan air bersih dan pemeliharaan sanitasi/limbah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Gampong Bitai, ianya hanya sekali dalam 6 bulan.

Pemeliharaan fasilitas penunjang berupa prasarana lingkungan di dalam lingkungan perumahan sangat penting dilakukan demi menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaat dari prasarana lingkungan tersebut. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan kawasan perumahannya sendiri menjadi faktor penting untuk ditumbuhkan guna memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap prasarana di lingkungan perumahan Gampong Bitai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas lingkungan permukiman dan untuk mencapai sebuah standar pelayanan sebagai sebuah kawasan permukiman yang berkelanjutan sekaligus mendukung Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).

Kekerapan pihak Pemerintah Gampong Bitai melaksanakan gotong royong (5 sampai 7 kali dalam setahun) memperlihatkan keseriusan

dan kepedulian desa terhadap pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan di lingkungan desa nya, namun hal sebaliknya terjadi dalam partisipasi masyarakat dalam kehadiran mereka ikut berperan aktif dalam kehadiran masyarakat untuk kegiatan gotong royong tersebut. *Sense of belonging* belum terlihat dalam beberapa aspek pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan, seperti pemeliharaan jalan dan jaringan air bersih dimana masyarakat menganggap hal ini adalah kewajiban pemerintah. Sementara untuk jaringan limbah dan pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau kurangnya keterlibatan masyarakat karena mereka menganggap prasarana ini tidak memerlukan pemeliharaan yang khusus.

Perlu disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan pemeliharaan prasarana di lingkungan perumahan baik pemeliharaan rutin, sesudah rusak maupun pemeliharaan ulang, sehingga dirasa penting bagi pihak Gampong Bitai untuk menjadikan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap prasarana lingkungannya menjadi tinggi dan mendorong untuk lebih berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan prasarana lingkungan demi menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan prasarana di lingkungan Gampongnya. Hal ini untuk mendukung sistem yang berkelanjutan seperti yang disebutkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (2010) dengan ciri-cirinya antara lain jika prasarana lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan manfaat; beroperasi dalam jangka waktu yang lama; biaya operasi dan pemeliharaan yang dapat dipenuhi oleh masyarakatnya; perbaikan kerusakan dan penggantian suku cadang bisa

dipenuhi di tingkat lokal; dapat dioperasikan dan dipelihara di tingkat lokal dengan hanya dukungan terbatas dari pihak luar; dan tidak mempengaruhi lingkungan secara negatif.

Adapun beberapa kegiatan pemeliharaan rutin yang dapat dilakukan oleh masyarakat Gampong Bitai untuk memenuhi sistem prasarana lingkungan yang berkelanjutan antara lain:

1. Pembersihan secara umum;
2. Membuang tumbuhan liar dan sampah;
3. Pembersihan dan melancarkan fungsi jaringan persampahan, drainase dan sanitasi/limbah;
4. Penanganan kerusakan-kerusakan ringan;
5. Pemeliharaan permukaan konstruksi bangunan (contoh: pengecatan sederhana)
6. Pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau dengan menjaga fasilitas di dalam yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai area bermain bagi masyarakat Gampong Bitai khususnya anak-anak.

Dari penelitian ini terlihat bahwa berdasarkan tipe partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Adrianto, 2006), partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan di Gampong Bitai merupakan partisipasi dalam bentuk implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi) untuk kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial dan personel).

KESIMPULAN

Pemerintah Gampong Bitai telah sering melakukan kegiatan gotong royong untuk pemeliharaan prasarana lingkungan di kawasan desanya, namun hal ini tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakatnya dimana masyarakat jarang ikut terlibat baik dalam kehadiran kegiatan gotong royong tersebut maupun untuk pemeliharaan beberapa prasarana jaringan seperti jalan, drainase, persampahan dan pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau. Dalam hal pemeliharaan sistem jaringan air bersih dan jaringan sanitasi/limbah secara swadaya, masyarakat Gampong Bitai sangat jarang melibatkan diri. Hal ini memperlihatkan kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap prasarana lingkungan di Gampong Bitai. Tipe partisipasi masyarakat dalam

pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan di Gampong Bitai merupakan partisipasi dalam bentuk implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, B. (2006) *'Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang'*, Tesis Magister, Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (2014) *Kecamatan Jaya Baru Dalam Angka 2014*, Banda Aceh.
- Badan Standarisasi Nasional (2004) SNI 03-1733-2004, *'Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan'*.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (2010) *Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Dasar Desa*, Jakarta.
- Nazir, M. (2013) *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2011) *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, Jakarta.

ARSITEKTURAL DAN DESAIN INTERIOR LEMBAGA TERAPI AUTIS DI BANDUNG

Kharista Astrini Sakya¹, Imam Santosa²

Program Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung

Email: kharistaastrinisakya@yahoo.com

ABSTRAK

Beberapa tahun belakangan ini kasus kelahiran anak autis semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak 2010 dengan perkiraan hingga 2016, terdapat sekitar 140 ribu anak di bawah usia 17 tahun menyandang autis. Autis merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak, sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensori dan belajar, dan bukan suatu penyakit mental (Peeters, 1997). Seringkali dilupakan bahwa yang mempengaruhi perkembangan dan pendidikan seorang anak, bukan hanya pada lingkungan psikis saja, tetapi lingkungan fisik juga memiliki andil yang cukup besar. Oleh karena itu, lingkungan fisik yang ada diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam perkembangan anak autis. Lembaga terapi autis di Bandung berada di lokasi yang berbeda-beda tergantung dari lokasi pemukiman sekitar. Lokasi studi kasus berada di perkampungan pegunungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebutuhan aspek arsitektural pada lembaga terapi autis di Bandung sudah memadai, dan mengkaji mengenai lokasi tapak, ukuran tapak dan batas, eksisting zoning dan tata guna lahan, analisa sirkulasi, matahari, angin, kebisingan dan utilitas, tampak bangunan, program ruang, fungsi ruang, organisasi ruang, baik arsitektural maupun interior sehingga mampu menunjang kegiatan yang berkaitan dengan autis. Metode yang digunakan adalah menggunakan observasi dan studi literatur. Variabel pengamatan yang dipergunakan untuk penelitian adalah variabel bebas (lokasi lembaga berada di perkampungan gunung) dan variabel terikat (fasade dan tampak bangunan, zoning bangunan, organisasi ruang, fungsi, sarana prasarana, dll) pada lembaga terapi. Pada akhirnya penelitian ini dapat memberi wawasan dan kajian mengenai keadaan arsitektural dan desain interior lembaga terapi autis di Bandung.

Kata Kunci: Arsitektural, Desaininterior, Lembaga Terapi, Autis, Bandung.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini kasus kelahiran anak autis semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak 2010 dengan perkiraan hingga 2016, terdapat sekitar 140 ribu anak di bawah usia 17 tahun menyandang autis. Data terakhir pada tahun 2015 menunjukkan sebanyak 25.000 anak autis adadi Jawa Barat. Autis merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, disebabkan oleh adanya kerusakan pada otak, sehingga mengakibatkan gangguan pada perkembangan komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, sensori dan belajar, dan bukan suatu penyakit mental (Peeters, 1997). Seringkali dilupakan bahwa yang mempengaruhi perkembangan dan pendidikan seorang anak, bukan hanya pada lingkungan psikis saja, tetapi lingkungan fisik

juga memiliki andil yang cukup besar. Oleh karena itu, lingkungan fisik yang ada diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam perkembangan anak autis. Lembaga terapi autis di Bandung berada di lokasi yang berbeda-beda. Arsitektural dan penempatan lokasi lembaga tersebut sangat dipengaruhi dari pemukiman sekitar dilihat dari segi perkotaan atau pedesaan, atau bahkan perkampungan yang berada di pegunungan.

Pusat pendidikan, terapi, dan kesehatan autis memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku positif anak dan mengembangkan kemampuan mereka yang terlambat. Oleh karena itu diperlukan suatu wadah kegiatan pendidikan, terapi, dan kesehatan yang dapat menunjang pembentukan dan pengembangan perilaku serta kemampuan

mereka seperti lembaga-lembaga yang ada di Bandung.

Perencanaan dan perancangan bangunan dengan memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan anak-anak penyandang autisme memerlukan suatu pendekatan dalam arsitektural yang baik dan tepat. Arsitek dan desainer sebagai koordinator dari banyak disiplin yang terlibat dalam proses konstruksi dan desain saat sekarang ini adalah kunci dari keberhasilan dalam penerapan arsitektur bangunan yang tepat. Perancangan yang baik dapat memberi keuntungan dalam jangka panjang bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebutuhan aspek arsitektural pada lembaga terapi autisme di Bandung sudah memadai, baik dari segi sarana maupun prasarana, dan mengkaji mengenai lokasi tapak, ukuran tapak dan batas, eksisting zoning dan tata guna lahan, analisa sirkulasi, matahari, angin, kebisingan dan utilitas, tampak bangunan, program ruang, fungsi ruang, organisasi ruang, baik arsitektural maupun interior sehingga mampu menunjang kegiatan yang berkaitan dengan autisme, berpatokan dari referensi yang ada.

Permasalahannya adalah semakin banyaknya anak autisme di Bandung sehingga diperlukan lembaga terapi yang dapat menunjang pembentukan dan pengembangan perilaku serta kemampuan mereka.

Menurut John Jenkins dari Haverstock Associates, memberi penekanan bahwa jika ada masalah desain pada arsitektural rehabilitasi autisme, maka dapat merugikan dan menurunkan kemampuan anak autisme untuk belajar. Dikatakan pula bahwa anak nakal yang tidak menyandang autisme lebih mampu untuk mengatasi diri berada di lingkungan yang di rancang dengan buruk dibandingkan dengan anak autisme. Jadi, keadaan lingkungan fisik sangat menjadi tanggung jawab untuk para arsitek dan desainer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi dan studi literatur sebagai referensi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap perilaku & lingkungan, baik sosial dan material individu atau kelompok yang diamati (Gall, 2003). Studi literatur dilakukan untuk memperdalam hasil

kajian dan untuk menjadi referensi yang sesuai dengan permasalahan.

Studi kasus berada di Sekolah Khusus Autis Bunda Bening Selaksahati Bandung. Sekolah Khusus Autis Bunda Bening Selaksahati merupakan satu-satunya sekolah berbentuk yayasan di Bandung yang menangani anak-anak autisme dengan cara terapi dan memiliki asrama. Yayasan ini berada di Kampung Cibiru Beet Hilir, Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. Didirikan oleh Bening Selaksahati sejak tahun 2001.

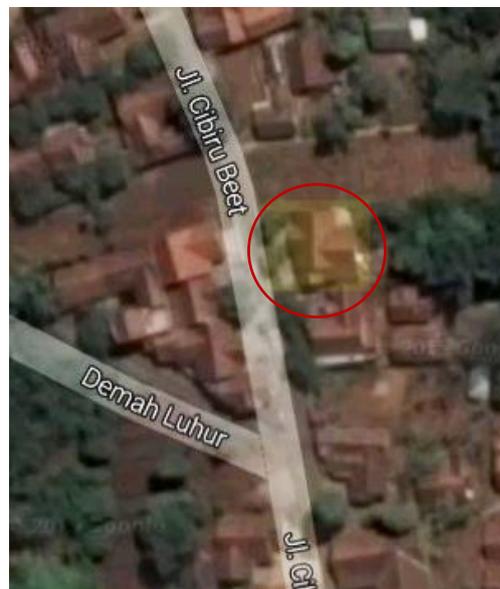
Survey dilakukan selama 2 bulan dengan mengamati perilaku penderita autisme dan keadaan arsitektural serta kegiatan dan proses yang terjadi langsung di lapangan. Proses pengamatan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dengan kamera berupa foto-foto dan wawancara secara langsung dengan pemilik yayasan. Anak autisme yang diamati di yayasan ini sebanyak 50 anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi tapak dalam lingkungan kawasan

Yayasan ini berada di Kampung Cibiru Beet Hilir, Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Indonesia. Dengan data fisik sebagai berikut (Gambar 1):

- Luas Lahan : 240 m²
- Luas Bangunan : 120 m²
- Kontur : Relatif datar
- KDB : 50%



Gambar 1. Lokasi Yayasan
Sumber: <http://maps.google.com>



Gambar 2. Yayasan Autis Bunda Bening Selaksahati

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Lokasi bangunan dekat dengan permukiman penduduk bahkan menyatu dengan lingkungan sekitar (Gambar 2). Keadaan sekitar yang tenang dan keadaan site yang masih hijau/dekat dengan alam sangat cocok untuk dijadikan tempat terapi autis. Masyarakat sekitar menerima dengan baik adanya bangunan terapi autis ini

Ukuran Tapak dan Batas-batas

Batas sebelah Utara adalah kebun dan tanah kosong. Batas Sebelah Timur adalah kebun dan tanah kosong. Batas Sebelah Selatan adalah perumahan penduduk. Batas Sebelah Barat adalah Jalan Cibiru Beet.

Eksisting Zoning dan Tata Guna Lahan

Lokasi yayasan (warna merah). Pemukiman penduduk (warna orange) yang mendominasi dan masih banyaknya lahan hijau/pepohonan dan perkebunan (warna hijau) (Gambar 3).



Gambar 3. Eksisting Zoning dan Tata Guna Lahan
Sumber: <http://maps.google.com>

Suasana View Dari Berbagai Sisi

Suasana view ke arah Selatan, Tenggara, Utara, dan Barat Laut.



Gambar 4. Suasana View ke Arah Selatan dan Tenggara

Sumber: <http://maps.google.com>

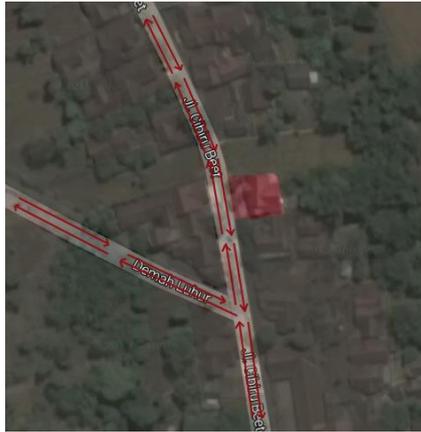


Gambar 5. Suasana View Ke Arah Utara dan Barat Laut

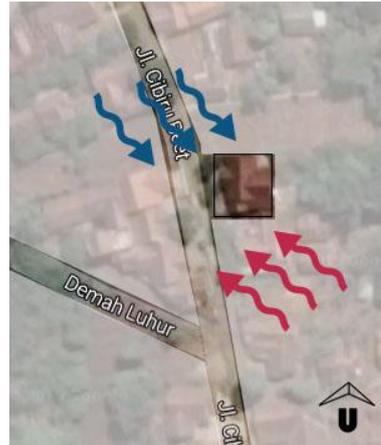
Sumber: <http://maps.google.com>

Analisa Sirkulasi

Jalan Cibiru Beet. Jalan lingkungan 2 arah. Lebar 5m. Dilewati mobil, motor, sepeda. Kepadatan rendah. Jalan Demah Luhur. Jalan lingkungan 2 arah. Lebar 4m. Dilewati mobil, motor, sepeda. Kepadatan rendah (Gambar 6).



Gambar 6. Analisa Sirkulasi
Sumber: <http://maps.google.com>



Gambar 8. Analisa Angin
Sumber: <http://maps.google.com>

Analisa Matahari

Kondisi pembayangan yang teduh karena di pagi hari di area depan yayasan (saat proses terapi) tidak silau terkena sinar matahari, juga akibat banyaknya vegetasi pada area sekitar (Gambar 7).



Gambar 7. Analisa Matahari
Sumber: <http://maps.google.com>

Analisa Angin

Angin pada bulan Oktober-Maret bergerak dari arah Tenggara ke Barat Laut (panah warna merah). Sementara angin pada bulan April-September bergerak dari arah Barat Laut ke Tenggara (panah warna biru). Yayasan memiliki bukaan yang tepat untuk angin dapat masuk ke dalam ruangan (Gambar 8).

Analisa kebisingan

Tidak ada sumber kebisingan karena lokasi yang berada di pegunungan/masih banyak vegetasi yang meredam suara. Sehingga penempatan yayasan autisme ini sudah tepat karena anak autisme sangat sensitif terhadap suara/bising.

Analisa utilitas

Terdapat instalasi utilitas air bersih (karena lokasi yang berada di gunung sehingga lokasi yang berada di gunung sehingga masih menggunakan air pegunungan yang bersih), listrik dan saluran telepon yang memadai. Untuk limbah seluruhnya bermuara ke drainase.

Program Ruang

Pada Tabel 1 menjelaskan program ruang pada Yayasan Autis.

Tabel 1. Program Ruang Yayasan Autis

No.	Ruang	Jumlah	Besaran (m2)
1.	Ruang Registrasi	1	9
2.	Ruang Terapi Besar	4	9
3.	Ruang Terapi Kecil	3	4
4.	Ruang Terapi Motorik	1	16
5.	Ruang Tengah	1	18
6.	Kamar Mandi	1	4
7.	Dapur	1	6
Sirkulasi			20%
Total			120

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fungsi Ruang

Fungsi ruang yang ada pada yayasan memiliki 8 ruang terapi, terbagi menjadi 4 ruang terapi besar (untuk usia 12 tahun keatas, kegiatan terapi untuk melatih membaca, menulis, berkomunikasi dan terapi perilaku), 3 ruang terapi kecil (untuk usia 12 tahun kebawah,

kegiatan terapi untuk melatih konsentrasi, bicara, menggambar), dan 1 ruang terapi motorik (untuk berbagai usia, kegiatan terapi melatih motorik kasar dan motorik halus). Ruang registrasi berfungsi untuk melakukan proses pendaftaran anak dan administrasi. Untuk tempat tinggal/srama anak autis berada di bangunan yang berbeda, berjarak sekitar 50 m dari lokasi yayasan autis Bunda Bening Selaksahati.

Organisasi Ruang

Adapun organisasi ruang pada Yayasan Autis dapat dilihat pada Gambar 8.



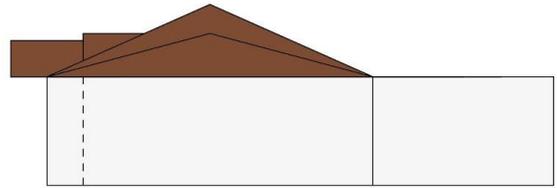
Gambar 8. Organisasi Ruang
Sumber: Dokumentasi pribadi

Keadaan Arsitektural dan Interior

Keadaan arsitektur dan interior pada bangunan yayasan pada dilihat pada Gambar 9-12.

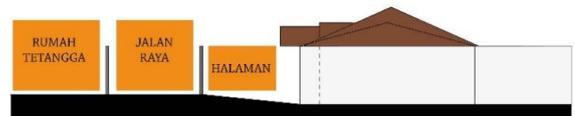


Gambar 9. Tampak Depan Bangunan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

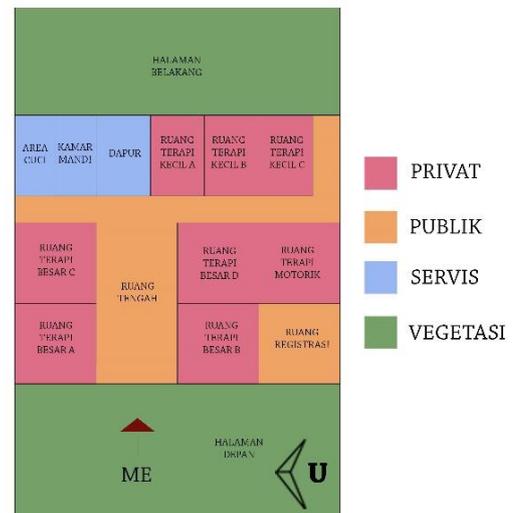


Gambar 10. Tampak Samping Bangunan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Lembaga terapi menggunakan jenis atap pelana berbahan genteng tanah liat. Sesuai untuk digunakan di daerah perkampungan pegunungan Bandung karena dapat menyerap panas matahari dan menyesuaikan dengan keadaan pemukiman sekitar.



Gambar 11. Zoning Tampak Samping Bangunan
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 12. Zoning Bangunan Lembaga
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Zoning bangunan memiliki tata letak yang sederhana dan tidak membingungkan. Memiliki area bukaan di bagian depan dan belakang lembaga terapi. Untuk area ruang terapi, berada di tempat yang terpisah-pisah dan tidak berkelompok. Menggunakan proporsi ruang yang cukup untuk anak-anak autis karena anak autis tidak menyukai ruang yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Area servis terjangkau dari berbagai area.



Gambar 13. Fasad Bangunan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fasad bangunan memiliki area halaman yang memadai, memiliki fasilitas untuk bermain basket dan vegetasi yang cukup. Dibatasi dengan pagar yang tinggi agar anak tidak dapat kabur dan diberi cat warna-warni untuk mengesankan warna anak yang ceria. Yayasan menggunakan material lantai keramik berwarna hijau, cat tembok putih dan keramik putih pada dinding bata, menggunakan atap genteng, langit-langit bahan *gypsumboard*, jendela besar dengan bingkai kayu, dan penempatan furniture yang seadanya. Tidak memiliki *sign system* sehingga menyulitkan untuk mencari ruangan. Tidak memiliki pintu darurat sehingga membahayakan apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.



Gambar 14. Ruang Terapi Besar A
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ruang terapi besar A. Berisi 3 meja dan 3 kursi berwarna hijau, serta 1 lemari penyimpanan buku. Dengan pencahayaan alami dari jendela besar yang terdapat pada 1 sisi dinding. Jendela diberi penutup agar anak masih dapat fokus pada saat terapi berlangsung. Menggunakan cat tembok berwarna putih, mengurangi warna yang terlalu banyak agar dapat membuat anak autis fokus saat proses terapi/belajar berlangsung. Menggunakan material keramik putih pada lantai. Menggunakan furniture meja dan kursi yang sesuai untuk anak usia 12 tahun keatas.



Gambar 15. Ruang Terapi Besar B
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 16. Ruang Terapi Besar B
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ruang terapi besar B. Berisi 5 meja dan 5 kursi berwarna biru. Dengan pencahayaan alami dari jendela besar yang terdapat pada 1 sisi dinding. Menggunakan cat tembok berwarna putih, mengurangi warna yang terlalu banyak agar dapat membuat anak autis fokus saat proses terapi/belajar berlangsung. Menggunakan material keramik putih pada lantai. *Layout furniture* yang terlalu berdesakkan dapat mengganggu proses terapi karena dikhawatirkan antar anak autis dapat saling mengganggu.



Gambar 17. Ruang Terapi Kecil
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Salah satu ruang terapi kecil pada yayasan. Berisi 2 kursi dan 1 meja untuk anak autis, dan 1 kursi besar untuk terapis. Pada ruangan ini dilakukan terapi bagi anak usia 12 tahun kebawah seperti terapi wicara. Ruangan menggunakan pencahayaan buatan karena tidak memiliki jendela. Menggunakan material keramik merah pada lantai dan cat dinding berwarna putih. Dinding pemisah antar ruang terapi kecil menggunakan partisi multipleks. Masih dapat menghasikan bising antar kelas karena tidak menggunakan dinding peredam suara.



Gambar 18. Ruang Terapi Motorik
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ruang terapi motorik. Berisi alat-alat untuk melatih motorik seperti bola besar dan trampoline untuk mereka berbagai usia. Ruangan memiliki pencahayaan alami yang berasal dari

bouvenlight. Terdapat bagian dinding yang belum di finishing (masih menggunakan bata ekspos) sehingga menjadi tekstur yang kasar dan dapat membahayakan anak autis karena sering berlari dan dikhawatirkan dapat membentur dinding.

KESIMPULAN ANALISA

Menurut Mostafa (2014), arsitektural lembaga autis sebaiknya memiliki zoning antar area yang di kelompokkan, baik untuk anak autis yang bersifat intelegensi rendah dan intelegensi tinggi. Area kelas tidak didekatkan karena masing-masing anak memiliki karakteristik yang berbeda. Menggunakan banyak area terbuka karena anak autis menyukai berada di lingkungan hijau/alam. Membuat ruang terapi yang khusus (contohnya ruang terapi wicara sebaiknya dibedakan dengan ruang terapi membaca). Selain itu, peletakkan *sign system* sebaiknya jelas dan dapat mempermudah anak. Memiliki pintu darurat agar dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.

Menurut Building Bulletin (BB) 77, *Designing for Pupils with Special Educational Needs and Disabilities in Schools*, dipublikasikan oleh *Department for Education and Skills*, Kriteria untuk mendesain bangunan bagi orang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas adalah:

1. Bangunan harus memiliki tata letak sederhana yang mencerminkan ketertiban, ketenangan, kejelasan dan memiliki signage/tanda yang baik dan cara menemukan ruang tersebut dengan mudah.
2. Pengguna ruang dapat menunjukkan kepekaan yang berbeda untuk ruang: beberapa takut dengan ruang yang besar, ruang terbukadan lebih suka dengan ruang yang lebih kecil , sementara yang lain tidak menyukai ruang tertutup.
3. Merancang lingkungan sensorik - stimulus yang dapat mengurangi stres dan kecemasan.
4. Membuat desain yang sesuai, baik proporsional ruang, dengan warna dan tekstur yang polos, dinding menggunakan peredam suara, menggunakan warna-warna lembut.
5. Kelas diatur dengan layout yang baik, dengan memperkirakan jarak/pemisah antar anak/pengguna.

6. Gunakan pencahayaan tidak langsung dan hindari kebisingan atau gangguan lainnya (kabel yang berantakan dapat membahayakan keselamatan anak).
7. Menyediakan pintu darurat yang mudah dijangkau prosedur melarikan diri.
8. Menggunakan material dan bahan yang kuat (seperti pada pintu, jendela, kaca, plester dll).
9. Tenang dan sederhana

Sementara menurut Simon Humphrey (*Architecture and Autism Brussels*, 2008), arsitektural bangunan untuk rehabilitasi penyandang autisme adalah : Menggunakan ruang yang tenang dan sederhana. Membuat detail yang minimal dan penggunaan material yang sedikit (sejenis). Memperhatikan proporsi yang sesuai untuk usia anak autisme. Menggunakan pencahayaan alami seperti peletakan jendela. Memperhatikan jarak prokemik antar anak autisme yang membutuhkan jarak khusus. Memperhatikan keamanan (seperti mendapat pengawasan dari orang lain/terapis, penggunaan material yang aman). Menggunakan akustik yang baik (tidak berisik dan bising karena anak autisme sensitif terhadap suara).

Dari studi kasus yang dianalisa yaitu Lembaga Yayasan Terapi Autis Bunda Bening Selaksahati Bandung, ternyata belum seluruhnya menggunakan referensi yang baik untuk arsitektural dan desain interior lembaga terapi autisme.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa kebutuhan aspek arsitektural dan desain interior pada lembaga terapi autisme di Bandung (pada studi kasus) masih kurang memadai, dilihat dari referensi yang ada, sehingga kurang mampu menunjang kegiatan yang berkaitan dengan autisme. Selain itu penelitian ini telah melakukan kajian mengenai lokasi tapak, ukuran tapak dan batas, eksisting zoning dan tata guna lahan, analisa sirkulasi, matahari, angin, kebisingan dan utilitas, tampak bangunan, program ruang, fungsi ruang, organisasi ruang, baik arsitektural maupun interior.

Oleh karena itu, arsitektural dan desain interior lembaga terapi autisme di Bandung sebaiknya diperhatikan dan menjadi sebuah kajian yang bisa lebih diperdalam lagi agar dapat membuat suatu lembaga terapi autisme yang

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas anak autisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Building Bulletin (BB) 77. (2005) *Designing for Pupils with Special Educational Needs and Disabilities in Schools*. Department for Education and Skills.
- Gall, dkk. (2003) *Educational Research: an Introduction*. Seventh Edition. Boston: Allyn dan Bacon.
- Humphrey, Simon (2008) *Architecture and Autism. Brussels*.
- Jenkins, John (2009) *Designing Learning Spaces for Children on the Autism Spectrum*. University of Birmingham.
- Mostafa, Magda (2014) *Architecture for Autism*. Archnet-IJAR, International Journal of Architectural Research
- Petters, Theo (1997) *Autism : From Theoretical Understanding to Educational Intervention*. J.A Majors Company.
- <http://maps.google.com>

PENGARUH WISATA *BACKPACKERS* TERHADAP TRANSFORMASI SPASIAL KAWASAN PERMUKIMAN: STUDI EMPIRIS

Vika Haristianti¹, Wiwik Dwi Pratiwi², Widjaja Martokusumo³

¹Program Studi Magister Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, Pengembangan Kebijakan,
Institut Teknologi Bandung

²Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

³Kelompok Keahlian Perancangan Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
Email: ¹vikaharistianti@gmail.com

ABSTRACT

A large number of backpackers who come to a settlements area generate the birth of backpackers enclave phenomenon. The role of enclave as a place to socialize results the emergence of empathy, respect and tolerance among fellow backpackers and eventually makes something called 'badges of honor' which is regarded as basic symbol for the establishment of backpackers identity and sense of community that is different from other types of travelers. The article discusses how identity and sense of community created by backpackers, make residential areas and settlements they live in have got a spatial transformation. Data was collected from the study of literature by collecting the results of former research and then analyzed using data text by sorting and comparing each of the results. The results of the analysis showed that the demand of the backpackers leads authority control providing supply to meet their needs by changing the physical building (exterior and interior in the temporal and permanent space) and providing the change to the image of the furniture layout, building and room function, facade and corridor in the area of housing-settlements. While the settings that use for describes the changes in spatial transformation is seasonality (low-season and peak-season). These factors are still in the form of a complex variable and will be detailed into operational variables in the future research stages.

Keywords: Transformation, Spatial, Backpacker, Enclave, Housing And Settlements.

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan salah satu tujuan destinasi wisata yang paling populer bagi para *backpackers*¹ baik yang berasal dari ASEAN maupun Negara lain. Jalur wisata di Asia Tenggara merupakan salah satu jalur *backpackers* tertua di dunia (Hampton, 2010). Banyaknya *backpackers* yang datang ke sebuah

kawasan permukiman akhirnya menimbulkan sebuah fenomena lahirnya *backpackers enclave*, termasuk dikawasan Indonesia (Gambar 1). *Backpackers enclave* dapat diartikan sebagai tempat dimana komunitas *backpackers* tinggal saat melakukan perjalanan wisata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa secara spesifik, kaum *backpackers* memiliki perbedaan dibandingkan jenis wisatawan lain terutama dalam hal waktu, biaya dan pengetahuan (Cohen, 2004).

Perkembangan *backpacking* di kalangan masyarakat semakin meluas ditandai dengan diangkatnya isu tersebut kedalam film maupun acara televisi seperti *Hostel* (2006), dan *Crash Palace* (Hannam et al., 2010). Sebuah *enclave* biasanya terdapat di persimpangan jalan, serta dekat dengan stasiun dimana daerah tersebut merupakan pertemuan dari beberapa arah dan

¹*Backpackers* adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat tanpa membawa barang-barang yang memberatkan atau membawa koper. Adapun barang bawaan hanya berupa tas yang digendong, pakaian secukupnya, dan perlengkapan lain yang dianggap perlu. Biasanya orang yang melakukan perjalanan seperti ini adalah dari kalangan berusia muda, tidak perlu tidur di hotel tetapi cukup di suatu tempat yang dapat dijadikan untuk beristirahat atau tidur. (Riley, 1988)

dapat dijadikan tempat *backpackers* berinteraksi (Kozak et al., 2010). Beberapa *enclave* terdapat di pusat keramaian (Popies lane Kuta, Jalan Jaksa Jakarta, Khaosan Road Bangkok), di pedesaan (Ubud, Bali). Ada juga diantaranya sebuah *enclave* sementara seperti di *Glastonbury Festival*, *Fiestas de San Fermin*, Pamploa atau *Oktoberfest* di Muenchen.



Gambar 1. Keadaan permukiman di Jalan Jaksa, Jakarta sebagai salah satu contoh *backpackers enclave* di Indonesia

Enclave memungkinkan *backpackers* bersosialisasi dengan sesamanya setelah mereka menjelajahi wilayah asing, memperkuat jiwa mereka dan berkontribusi membentuk identitas individu dan kelompok (Hannam et al., 2010). Peran lain sebuah *enclave* dan sarana akomodasi didalamnya adalah sebagai tempat pertukaran informasi. Saat bertukar informasi, terjadi sosialisasi yang memungkinkan *backpackers* sadar akan adanya peristiwa lokal, pekerjaan, dan juga membuat jejaring pertemanan temporer untuk saling berbagi menyangkut hal-hal seperti biaya, resiko serta pengalaman (Binder, 2004:98-100). Sosialisasi ini mengakibatkan munculnya empati, respek dan toleransi antar sesama *backpackers* (Willis et al., 2007).

Backpackers dengan latar belakang sosio-demografi yang berbeda tentu memberikan dampak bagi sebuah kawasan yang dimasuki. Bagaimana kemudian pengaruh mereka masuk ke sebuah kawasan perumahan (menekankan pada rumah) dan permukiman (perpaduan antara perumahan dan masyarakat yang menempatinya), (Kuswartojo, 2004) lama-lama akan mengubah gaya hidup penduduk dikawasan tersebut. Perubahan pada sebuah kawasan biasanya ditandai dengan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat serta munculnya penemuan baru akibat pengaruh kontak dengan budaya lain (Pakilaran, 2006). Proses konsumsi dalam sebuah perdagangan memungkinkan adanya interaksi dari

backpackers terhadap warga sekitar ataupun pengelola sebuah fasilitas wisata.

Banyaknya jumlah *backpackers* membuat warga sekitar dan pengelola berlomba memenuhi kebutuhan mereka (*demand*) dengan cara membangun (*supply*) kios-kios, restoran, serta sarana akomodasi lainnya (Hannam et al., 2010). Transisi identitas tersebut berjalan sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam interaksi sesama pengelola, warga, pekerja dan kaum *backpackers*. Sarana akomodasi bersifat ruang fisik (Hostel, bar dan restoran, agen wisata, warung internet, toko buku dll) merupakan kunci bagaimana infrastruktur terkait ilmu arsitektur dan desain menjadi representasi dari proses lahirnya transformasi spasial sebuah kawasan. Fenomena lahirnya transformasi spasial pada sebuah kawasan karena pengaruh pariwisata (dalam hal ini *backpackers*) menjadi menarik untuk diteliti dan dikaitkan dengan ilmu Arsitektur. Selain karena fenomena kelahirannya yang menjamur dan serupa pada banyak kota di dunia, proses transformasi ini juga memiliki pengaruh pada aspek lainnya di kehidupan masyarakat permukiman tersebut, diantaranya sosial, budaya dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan konsep maupun teori-teori dari para penulis yang telah melakukan penelitian pada topik serupa. Data yang dipilih adalah data yang berhubungan dengan permasalahan dan dijadikan sebagai bahan perbandingan. Studi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mencatat hal-hal penting yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian dari sumber berupa literatur, jurnal, artikel, dokumen dan data sekunder lainnya.

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif (Kumar, 2005), yaitu analisis data teks. Berbagai hasil penelitian dari berbagai sumber tersebut dianalisis dengan cara dibandingkan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kegiatan Pariwisata Terhadap Perubahan Lingkungan

Undang-undang No. 9 tahun 1990 dalam Susanti (2014) mendefinisikan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata, baik untuk wisatawan maupun pemilik objek serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Sebuah daerah yang berkembang menjadi daerah wisata biasanya mengekspose karakter khas daerah tersebut agar nantinya citra yang mereka miliki menjadi lebih baik. Setiap daerah wisata tentu memerlukan fasilitas penunjang. Maka dari itu, perkembangan pembangunan infrastruktur berupa lahan parkir, toilet umum, sarana akomodasi (penginapan, restoran, toko cinderamata dll) memiliki tujuan untuk menunjang perkembangan sebuah daerah wisata.

Susanti (2014), mengelompokkan komponen pariwisata berdasarkan sistem fungsionalnya melalui pendekatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Adapun komponen pariwisata pada pendekatan *demand* adalah masyarakat/pasar wisata, motivasi (*motivation*), harapan wisatawan (*expectation*), tanggapan wisatawan (*perceptions*) dan pola kunjungan wisatawan. Sedangkan pada komponen *supply*, meliputi 4A yaitu daya tarik wisata (*atraksi*), *aksesibilitas*, fasilitas pendukung pariwisata (*amenitas*), dan aktivitas. Ryan (2003), menyatakan bahwa kegiatan pariwisata dalam perkembangannya menuntut peningkatan ketersediaan sarana dan jasa pelayanan pendukung kegiatan wisata. Perkembangan kawasan wisata akomodasi juga dipengaruhi oleh karakter wisatawan. Mason (2003), menyatakan bahwa hal-hal yang berpengaruh terhadap arah perkembangan sebuah kawasan pariwisata diantaranya adalah karakter wisatawan (lama menginap, jarak perjalanan), asal wisatawan, motivasi dan tingginya interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal.

Walaupun pariwisata dapat memberikan dampak positif, diantaranya perkembangan infrastruktur kawasan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, namun ada juga hal

negatif yang dapat timbul seperti yang digambarkan Levi-Straus dimana proses pariwisata merupakan model penurunan kualitas tradisi suatu daerah. Contoh dari penurunan kualitas diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Frost (2009), sebagai proses komodifikasi yaitu terjadinya proses perubahan nilai suatu barang. Jadi, bagaimana masyarakat merubah fungsi rumahnya sangat berkaitan dengan istilah ini. Jika awalnya rumah merupakan area privat, setelah adanya intervensi dari kegiatan pariwisata dan ditanggapi masyarakat lokal untuk merubah fungsi rumahnya sebagai sarana akomodasi, maka ia telah melakukan komodifikasi. Biasanya, kegiatan komodifikasi ini sangat berkaitan dengan sistem penanggalan atau *seasonality* yang berhubungan dengan keadaan wisata saat *low-season* dan *peak-season*.

Transformasi Fisik Kawasan Perumahan Permukiman

Hunian merupakan sebuah sistem sosial terkecil dalam suatu permukiman, bukan sebatas artefak fisik melainkan tempat dimana nilai, norma dan tradisi ikut mempengaruhi bentuk ruang. Selain itu, bentuknya pun ikut dipengaruhi faktor aktivitas ekonomi, dan sosial budaya masyarakatnya (Pakilaran, 2006). Habraken (1978) menyatakan bahwa bentuk dan tatanan fisik hunian dapat dipandang sebagai kesatuan sistem yang terdiri dari *sistem spasial* yaitu sistem yang berhubungan dengan sistem organisasi ruang yang terdiri dari hubungan ruang, pola hirarki dan orientasi. Lalu, *sistem fisik*, yang berhubungan dengan sistem konstruksi dan material yang diidentifikasi melalui karakter komponennya (bahan-bahan konstruksi). Serta *sistem stilistik*, berhubungan dengan tampilan gaya yang memberikan tipe suatu bangunan secara spesifik yaitu *fasade* bangunan.

Adapun Newmark et al., (1977) dalam Pakilaran (2006) mengadakan pengaturan ruang dalam hunian menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya yaitu:

1. Ruang publik, merupakan area dimana anggota keluarga dan orang lain dapat berkomunikasi dan saling berhubungan satu sama lain
2. Ruang privat, mengacu pada bagian-bagian dari hunian yang memerlukan keleluasaan pribadi yaitu, ketenangan dan kenyamanan.

Ruang yang tidak bisa dimasuki pihak luar dengan leluasa.

3. Ruang servis, meliputi area yang mencakup ruang-ruang pemenuh kebutuhan aktivitas menyiapkan makanan, penyimpanan atau gudang.

Jika hunian diartikan sebagai sistem sosial terkecil dalam sebuah permukiman, maka permukiman sendiri dapat diartikan sebagai suatu tempat hidup dan totalitas dari aspek tinggal atau bermukim, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, serta tempat berinteraksi (Harun, 2003). Pakilaran (2006) menyatakan bahwa perumahan menekankan pada rumahnya, sedangkan permukiman menekankan pada penghuninya atau perpaduan antara perumahan dengan masyarakat yang menempatinnya. Maka dari itu, sebuah perubahan yang terjadi dalam suatu area permukiman tidak lepas dari adanya pengaruh masyarakat dan kegiatan yang mereka lakukan diantaranya kegiatan pariwisata. Pengembangan kegiatan pariwisata menyebabkan berbagai perubahan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup masyarakat (*local residents*). Sebuah kegiatan pariwisata dapat menghasilkan berbagai macam perubahan pada masyarakat sekitar dari berbagai sisi diantaranya ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan dimana skala nya tidak merata.

Proses perubahan atau transformasi menurut Antoniades (1990) merupakan sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur hingga sampai ke tahap *ultimate*. Perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. Proses transformasi mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya masyarakat yang menempatinnya. Proses ini berlangsung secara panjang dan selalu terkait dengan aktifitas yang terjadi pada saat itu (Alexander, 1987 dalam Pakilaran, 2006). Perubahan ini ditandai dengan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat atau munculnya penemuan baru akibat pengaruh kontak dengan budaya budaya lain (Habraken, 1976).

Bukit (2012) menyatakan bahwa sebuah lingkungan binaan memiliki sifat seperti organisme, senantiasa berkembang, bertahan hidup dan terus bertransformasi. Lingkungan binaan merupakan representasi tata nilai sebuah

daerah atau tempat yang dianut dari generasi ke generasi yang didalamnya tidak hanya diisi oleh entitas fisik (bangunan, jalan dan infrastruktur) namun juga oleh penghuni. Penghuni merupakan *agent* yang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah transformasi sebuah lingkungan binaan. Habraken, (1998) membagi transformasi lingkungan binaan menjadi tiga tatanan yaitu tatanan fisik (*physical order*), tatanan teritorial atau daerah kekuasaan (*territorial order*), dan tatanan budaya (*cultural order*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses transformasi ruang atau spasial yang terjadi di sebuah permukiman dapat terjadi karena adanya hubungan antara penghuni (*internal*) dan lingkungan tempat tinggalnya (*eksternal*). Proses perubahannya juga mengandung dimensi waktu dan perubahan aktivitas masyarakat yang menempatinnya baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Proses perubahan atau transformasi ini dapat disimpulkan sebagai sebuah proses perubahan bentuk awal menjadi bentuk akhir, dari satu kondisi ke kondisi lainnya, bisa secara terus-menerus maupun berulang-ulang secara cepat ataupun lambat. Maka untuk mengamati proses transformasi, hal yang harus diperhatikan adalah aspek hubungan antara proses perubahan fisik lingkungan (fisik) dan masyarakat yang menempatinnya (non fisik).

Dampak Aktivitas *Backpackers* dan Masyarakat Lokal Terhadap Perkembangan *Backpackers Enclave*

Riley (1998) mengartikan *backpackers* sebagai seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat tanpa membawa barang-barang yang memberatkan atau membawa koper. Kemunculan *backpackers enclave* sebagai sebuah kawasan khusus *backpackers* tidak direncanakan seperti sebuah sarana pariwisata lainnya. *Enclave* tumbuh seiring bagaimana perkembangan *backpackers* dipermukiman tersebut tumbuh. *Backpackers enclave* diibaratkan sebagai sebuah magnet didalam sungai dengan berbagai macam partikel. Maksudnya, merupakan tempat bertemunya berbagai macam kebudayaan (Westerhausen et al., 2003). Peran dari masyarakat lokal sendiri dapat menentukan bagaimana sebuah kegiatan pariwisata dapat berlanjut (Gursoy et al., 2010) di sebuah kawasan hingga akhirnya membentuk sebuah *landspaces of tourism* (Shaw et al., 2004).

Lestari (2009) menyatakan bahwa sebuah tempat yang berubah menjadi daya tarik wisata akan menimbulkan dampak bagi lingkungannya. Dampak tersebut dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Bagi ilmu arsitektur, dampak dari kegiatan yang paling nyata menurut Resa (2014) adalah tekanan terhadap lahan yang sejalan dengan perubahan fungsi lahan tempat tinggal menjadi lahan komersial, kemacetan lalu lintas, polusi udara dan polusi estetika (terutama ketika bangunan didirikan tanpa aturan penataan yang benar). Namun, jika dikelola dengan baik kegiatan pariwisata tersebut bisa mendatangkan kebaikan yang lebih banyak bagi lingkungan binaan dari berbagai aspek (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Dampak Kegiatan Wisata Backpackers terhadap Transformasi Fisik Kawasan

Sebuah kegiatan pariwisata menghasilkan berbagai macam perubahan pada masyarakat sekitar dari berbagai sisi diantaranya ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan dimana skalanya tidak merata (Leo, 2003). Perubahan bidang satu dapat menjadi lebih dominan dibanding lainnya. Peran dari masyarakat lokal sendiri dapat menentukan bagaimana sebuah kegiatan pariwisata dapat berlanjut (Gursoy et al., 2010) di sebuah kawasan. Wisata ransel (selanjutnya disebut *backpacking*) merupakan kegiatan dengan *flow* istimewa didalam sebuah wujud pariwisata (Alneng, 2000) sering disebut sebagai salah satu penyebab rusaknya bentuk kegiatan pariwisata normal karena pada perjalanannya, *backpacking* tidak memiliki integrasi dan struktur yang sama dengan kegiatan berwisata para *mainstream tourists* (Hannam et al., 2010).

Banyaknya jumlah *backpackers* membuat warga sekitar dan pengelola berlomba memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membangun kios-kios, restoran, serta sarana akomodasi lainnya (Hannam et al., 2010). Transisi identitas tersebut berjalan sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam interaksi sesama pengelola, warga, pekerja dan kaum *backpackers*. Sarana akomodasi bersifat fisik (Hostel, restoran, dll) merupakan kunci bagaimana infrastruktur terkait ilmu arsitektur dan desain menjadi representasi dari lahirnya transformasi sebuah kawasan. Bagaimana kemudian aspek arsitektur dan desain berubah

seharusnya tetap dibarengi dengan pengetahuan dan kemampuan warga lokal menggunakan bahan alam yang berasal dari daerah tersebut secara ekonomis dan berkelanjutan agar perubahan yang terjadi tetap ramah lingkungan. Dari situ didapat kesimpulan bahwa pariwisata tidak hanya menciptakan peluang di bidang ekonomi, tapi sebenarnya juga dapat memperkuat kebudayaan di sebuah daerah dengan cara mengedepankan simbol dan tradisi lokal.

Perkembangan hostel dan perkembangan *backpackers enclave* akan berjalan berkesinambungan dan linear hingga akhirnya terjadilah transformasi pada kawasan permukiman. Pada akhirnya sarana akomodasi pariwisata bagi *backpackers* akan terlihat perannya dalam proses transformasi spasial dikawasan *backpackers (backpackers enclave)* tersebut. Bagaimana perkembangannya dibaca dengan memperhatikan tanda-tanda pada perubahan karakteristik, tidak hanya dari segi fisik, namun kualitas servis sebuah Hostel pun terus meningkat dengan cara melebarkan sayap bekerja sama dengan travel agensi, *online booking* dan transportasi, maupun mengikuti forum manajemen yang bertujuan untuk melatih staff agar kualitas pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

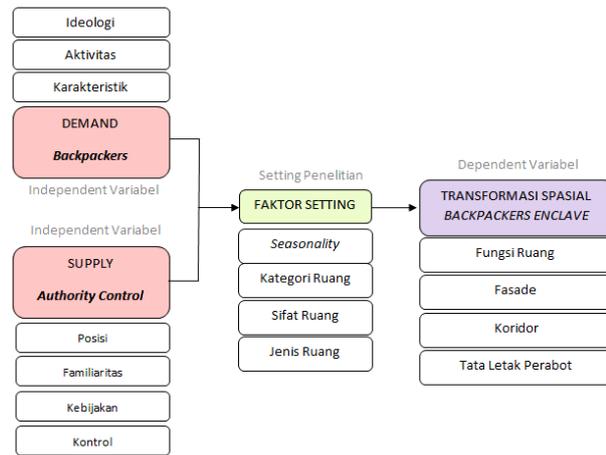
Kegiatan pariwisata merupakan salah satu penyebab berubahnya sebuah ruang kota diakibatkan oleh meningkatnya komodifikasi dan tingkat konsumerisme. Tidak hanya itu, perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi sedikit-banyak pun dipengaruhi oleh pariwisata. Dewasa ini, pariwisata terbagi kedalam beberapa segmentasi. Salah satu diantaranya adalah segmen *backpackers*. *Backpacking* tidak memiliki integrasi dan struktur yang sama dengan kegiatan berwisata para *mainstream tourists*. *Flow* tersebut tanpa sadar menyebabkan sebuah *enclave* lahir. *Enclave* merupakan tempat *backpackers* berinteraksi dengan sesamanya, memupuk persahabatan dan berbagi pengalaman lebih spesifik disebut sebagai *backpackers sanctuary*.

Perkembangan sebuah *backpackers enclave* berjalan linear dengan pertumbuhan kunjungan *backpackers* pada *enclave* itu sendiri.

Sebuah kawasan perumahan dan permukiman yang terkena dampak pariwisata dari kebutuhan *backpackers* akan memiliki infrastruktur yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jumlah, serta kebutuhan para *backpackers*. Kelahiran dan perkembangan *enclave* ini membuat sebuah kawasan permukiman secara perlahan berubah atau bertransformasi. Proses transformasi di sebuah kawasan *backpackers* terjadi karena adanya respon dari pengaruh eksternal dan internal yang ada (*supply-demand*) berupa kebutuhan *backpackers* dan respon pihak yang memiliki kontrol otoritas (*authority control*) dimana salah satunya adalah masyarakat lokal.

Transformasi pada penggunaan ruang bangunan mempengaruhi identitas kawasan yang mewadahi bangunan tersebut. Habraken (1998) membagi transformasi lingkungan binaan menjadi tiga tatanan, salah satunya adalah tatanan fisik (*physical order*). Tatanan transformasi fisik merupakan perubahan yang terjadi pada elemen pembentuk lingkungan binaan yang disebut *nominal classes* dari tingkat atau level terendah (*utensils*) hingga level tertinggi (*major arteries*). Perubahan fisik ruang perumahan dan permukiman akibat *backpackers* tersebut bisa terjadi di ruang permanen dan temporal sesuai dengan Susanti (2014) yang menjelaskan bahwa sebuah ruang yang dipengaruhi sebuah kegiatan atau *event* yang dilakukan manusia dapat berupa ruang permanen dan temporal dimana ruang permanen memiliki penggunaan fungsi ruang yang tetap atau sama dalam kondisi apapun, sedangkan ruang temporal memiliki penggunaan fungsi yang berbeda pada waktu tertentu.

Waktu tertentu merupakan sebuah waktu dimana terjadi perbedaan antara waktu satu dan lainnya tergantung *seasonality*. *Seasonality* dibagi kedalam dua jenis yaitu *low season* dan *peak season*. dengan pemilihan waktu masing-masing yaitu hari biasa (*weekdays*) dan akhir pekan (*weekends*). Dari dua waktu tersebut, elemen transformasi spasial dari level tertinggi hingga level terendah di sebuah kawasan (*major artery* hingga *utensils*) di ruang permanen dan temporal diamati serta dilihat perubahannya sesuai dengan konsep penelitian yaitu Wisata *backpackers* dan transformasi spasial. Berangkat dari rumusan tersebut maka dihasilkan simpulan sebagai berikut (Gambar 2).



Gambar 2. Bagan Kerangka Penelitian
Sumber: Penulis, 2015

Gambar 2 menjelaskan bahwa terdapat dua buah konsep variabel bebas penelitian yaitu *backpackers* sebagai *demand* atau faktor pendorong dan *authority control* sebagai *supply* atau pihak yang merespon kebutuhan. Masing-masing konsep variabel tersebut memiliki variabel operasional berupa ideologi, aktivitas dan karakteristik untuk *backpackers* serta posisi, familiaritas, kebijakan dan kontrol bagi *authority control* yang nantinya dikaitkan dengan faktor *setting* berupa *seasonality*, kategori, sifat dan jenis ruang. Kedua variabel konsep dan *setting* tersebut menyebabkan transformasi spasial pada kawasan permukiman terjadi dimana hasilnya dapat dilihat pada perubahan fungsi ruang, tata letak perabot, perubahan fasade dan koridor di kawasan perumahan-permukiman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ayten, A, et al. (2013) Involvement with backpacking: A Research on Backpackers visiting Istanbul. *Tourism Vol.61 No.4*.

Bukit, E.S. (2012) Aplikasi Metode N.J Habraken pada Studi Transformasi Permukiman Tradisional. *JLBI Vol. 1 No. 1 Juli 2012*.

Cohen, E. (2004) Backpacking: Diversity and Change. *Journal of Tourism and Cultural Change Volume 1, Issue 2*.

- Frost, W, et al. (2009) *Tourism and National Parks: International Perspectives on Development, Histories and Change*. New York: Routledge.
- Gursoy, D, et al. (2004) Host attitudes toward tourism: An improved structural modeling approach. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 495–516.
- Habraken, N.J (1998) *The Structure of The Ordinary: Form and Control in the Built Environment*. Massachusetts: The MIT Press.
- Hampton, M.P, et al. (2010) *The Changing Geographies of Backpackers Tourism in South-East Asia*. University of Kent Working Paper No. 210 April 2010. Canterbury: University of Kent.
- Hannam, K, et al. (2010) *Beyond Backpacker Tourism: Mobilities and Experiences*. United Kingdom: Channel View Publications.
- Harun, I.B. (2003) *Bahan Kuliah: Analisis Perumahan dan Permukiman*, Institut Teknologi Bandung.
- Hibrawan, A. (2008) *Fasade Bangunan-bangunan Rumah Tinggal Kolonial di Kawasan Perumahan Tjitroem Plein Bandung*, Tesis Institut Teknologi Bandung.
- Kozak M, et al. (2010) *Advance in Tourism Destination Marketing: Managing Network*. New York: Routledge.
- Kumar, R. (2005) *Research Methodology: A Step by Step Guide for Beginner*. London: Sage Publication.
- Kuswartodjo, T. (2004) *Dari Involusi ke Reformulasi*, Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.
- Lestari, A.P. (2009) *Pengaruh Pariwisata dan Peran Pengendali Bhisama Pada Perubahan Tata Hunian Sekitar Pura Besakih dan Batur*. Tesis Institut Teknologi Bandung.
- Manik, I.W.Y. (2007) *Pengaruh Demografi, Gaya Hidup, dan Aktifitas Terhadap Transformasi Tipo-Morfologi Hunian Tradisional di Desa Bayung Gede, Bali*. Tesis Institut Teknologi Bandung.
- Mason, P. (2003) *Tourism Impacts, Planning and Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Ombeni, S. (2009) Transformation of Residential Unit into Commercial Spaces in the Central Business District of Dar es Salaam, Tanzania. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering (JAABE)/May 2009/166*.
- Riley, P. (1988) Road Culture of International Long-Term Budget Travelers. *Annals of Tourism Research* 15: 337-352.
- Ryan, C. (2002) Equity, Management, Power Sharing and Sustainability- 'Issues new tourism'. *Journal Tourism Management* 23(2002) 17-26.
- Ryan, C. (2003) *Recreational Tourism: Demands and Impacts*. United Kingdom: Channel View Publications.
- Susanti, I. (2014) *Transformasi Temporal Pada Ruang Hunian dalam Kegiatan Wisata Religi Umat Muslim*. Tesis Institut Teknologi Bandung.

ISSN 2086-910x



9 772086 910092